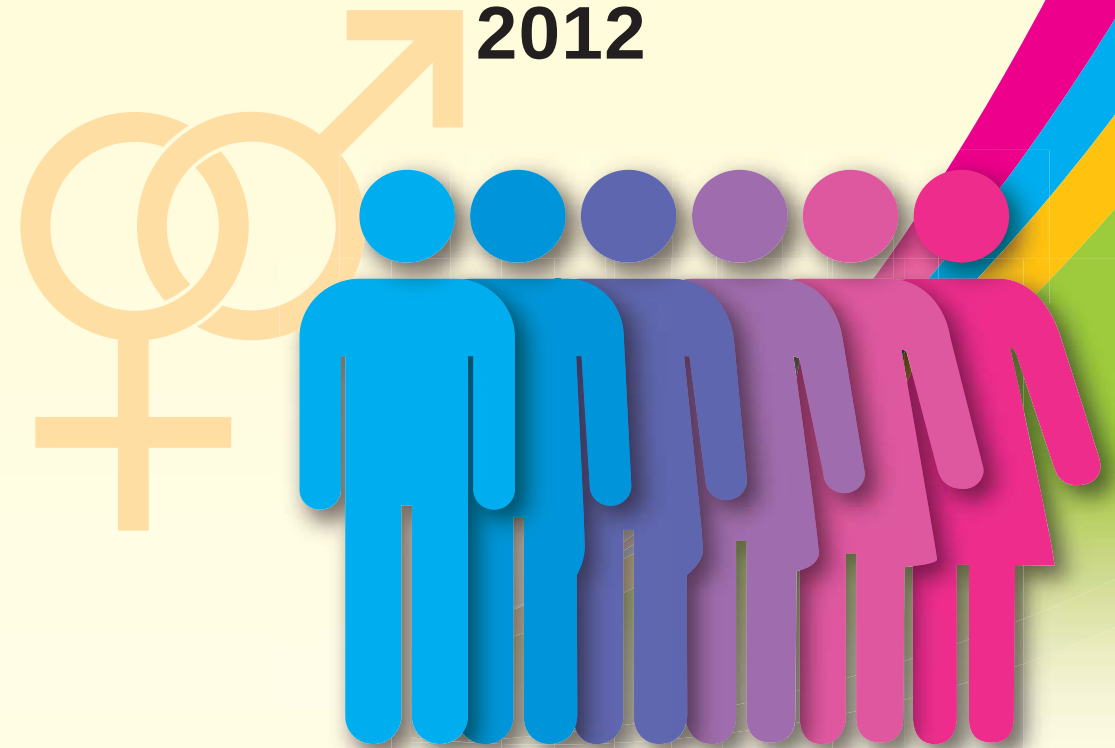




REPUBLIK INDONESIA

PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER 2012



PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER 2012



ISSN 2089-3531



9 772089 353131



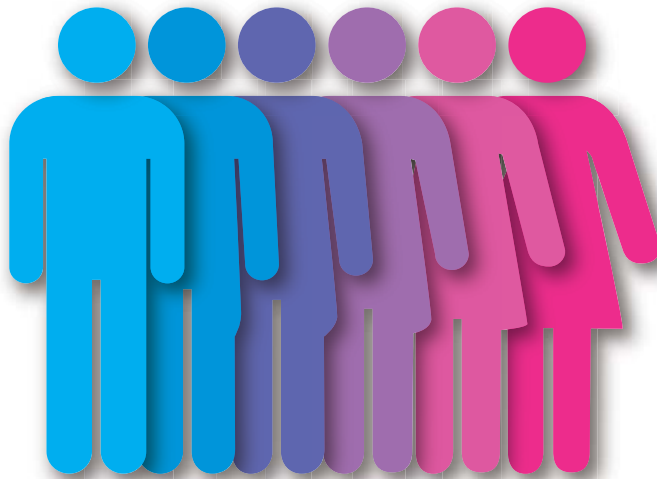
KERJASAMA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK





REPUBLIK INDONESIA

PEMBANGUNAN MANUSIA BERBASIS GENDER 2012



KERJASAMA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK



Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012

© 2012 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

ISSN : 2089-3531
 Ukuran Buku : ISO B5 (17 x 24 Cm)
 Naskah : Badan Pusat Statistik
 Layout dan Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik
 Diterbitkan Oleh : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Dicetak Oleh : CV. Permata Andhika



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

SAMBUTAN



Keberhasilan pencapaian pembangunan nasional, tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Secara umum pencapaian pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi telah menunjukkan kemajuan yang nyata. Namun, apakah pembangunan kapabilitas manusia di Indonesia ini telah memberikan manfaat yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan? Apakah masih ada kesenjangan pencapaian pembangunan dasar antara laki-laki dan perempuan yang mengarah pada persoalan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender?

Publikasi ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan menyajikan indikator pembangunan manusia, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dirinci sampai tingkat kabupaten/kota. IPM memberikan gambaran pembangunan kapabilitas dasar manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sama dengan IPM, IPG juga mengukur kapabilitas dasar manusia pada ketiga bidang tersebut, tetapi terfokus pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan membandingkan kedua indikator tersebut, dapat diketahui ada tidaknya kesenjangan pembangunan sumber daya manusia antara laki-laki dan perempuan. Lebih rendahnya pencapaian IPG dibandingkan IPM, menunjukkan masih adanya kesenjangan gender pada ketiga bidang pembangunan tersebut, dan sampai saat ini perempuan masih

berada pada posisi yang tertinggal. Sedangkan IDG merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Secara umum, peranan perempuan dalam pengambilan keputusan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Meskipun demikian, peranan perempuan dalam pengambilan keputusan terus menunjukkan perkembangan yang dapat dilihat dari pencapaian IDG yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Data yang disajikan sampai tingkat kabupaten/kota bertujuan untuk membandingkan pencapaian pembangunan manusia dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Publikasi ini tentunya sangat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender di masing-masing wilayah dan tentunya juga bagi para pemangku kepentingan terkait.

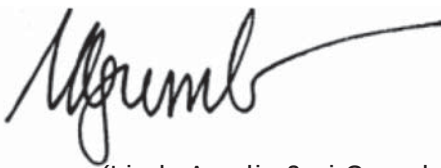
Semoga publikasi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang adil dan setara sebagai tujuan akhir pembangunan nasional. Akhirnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Jakarta, November 2012

Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Linda Amalia Sari Gumelar', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Linda Amalia Sari Gumelar)

KATA PENGANTAR

Publikasi “Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2012” merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini berisi ulasan tentang perkembangan pencapaian tiga (3) indeks komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).



IPM merupakan ukuran kualitas hidup berbasis pada kapabilitas dasar penduduk yang diperluas. Sedangkan IPG mengukur hal sama tetapi terfokus pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dan politik dalam pengambilan keputusan. Prinsipnya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana kapabilitas yang dicapai perempuan dapat dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan.

Publikasi ini dapat digunakan sebagai alat *monitoring* hasil pembangunan yang meliputi pencapaian kualitas hidup semua penduduk, perbedaan (*gap*) pencapaian antara laki-laki dan perempuan, serta kemajuan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan prioritas program-program pembangunan selanjutnya.

Disadari publikasi ini masih memiliki banyak kelemahan. Untuk itu kritik dan saran demi perbaikan di masa datang sangat diharapkan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Jakarta, November 2012
Kepala Badan Pusat Statistik



(Dr. Suryamin, M.Sc.)

DAFTAR ISI

Sambutan	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel	xi
Ringkasan Eksekutif	xiii
 Bab I. Pendahuluan	 1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan Penulisan	6
1.3. Sistematika Penulisan	6
1.4. Sumber Data	7
 Bab II. Gambaran Umum Gender di Indonesia	 9
2.1. Perbandingan Capaian di Negara ASEAN.....	11
2.2. Permasalahan Gender di Indonesia	16
 Bab III. Pencapaian Pembangunan Gender	 25
3.1. Pencapaian Pembangunan Gender	28
3.2. Pencapaian Komponen IPG	31
3.3. Disparitas Pembangunan Manusia (IPM) dan Pembangunan Gender (IPG)	37
3.4. Disparitas Pencapaian Pembangunan Gender Antar	40
 Bab IV. Pencapaian Pemberdayaan Gender	 47
4.1. Perkembangan Pemberdayaan Gender	51
4.2. Pencapaian Komponen IDG	52
4.3. Disparitas IDG	58

Bab V. Hubungan Pembangunan Gender Dengan Indikator Sosial Ekonomi.....	65
5.1. Hubungan antara IPM dengan IPG.....	67
5.2. Hubungan IPM dan IDG.....	74
5.3. Hubungan IPG dan IDG.....	76
5.4. Perbandingan Antara IPM, IPG, dan IPG.....	79
 Bab VI. Kesimpulan	 87
 Daftar Pustaka	 91
Tim Penulis	93
Lampiran.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Perbandingan IPM Negara-Negara ASEAN, 1990 – 2011.....	12
Gambar 2.2.	IPM Negara-Negara ASEAN Menurut Komponennya, 2011	13
Gambar 2.3.	Indeks Ketimpangan Gender Di Negara ASEAN, 1995 – 2011	14
Gambar 2.4.	Indeks Ketimpangan dan Rasio Perempuan dan Laki-Laki di Parlemen Negara ASEAN, 2011	15
Gambar 2.5.	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Ijazah yang Dimiliki, Jenis Kelamin, dan Tempat Tinggal, 2011	18
Gambar 2.6.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan Terhadap Laki-Laki , 2007 – 2011	19
Gambar 2.7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki dan Perempuan, 2007 – 2011.....	20
Gambar 2.8.	PersentasePenduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2011	21
Gambar 2.9.	Persentase Jumlah TKI Menurut Jenis Kelamin, 2007 – 2011	22
Gambar 2.10.	Persentase Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin, 2007-2011	23
Gambar 3.1.	Perkembangan IPG Periode 2004-2011	29
Gambar 3.2.	Perkembangan Angka harapan Hidup, 2004-2011	32
Gambar 3.3.	Perkembangan Angka Melek Huruf, 2004-2010 ...	33
Gambar 3.4.	Perkembangan Rata-rata Lama sekolah, 2004-2010	34
Gambar 3.5.	Perkembangan Sumbangan Pendapatan, 2004-2011.....	35
Gambar 3.6.	Disparitas Sumbangan Pendapatan Perempuan Antar Provinsi di Indonesia, 2011	38

Gambar 3.7.	Disparitas IPM-IPG Menurut Provinsi, 2011 .	39
Gambar 3.8.	IPG Provinsi Menurut Peringkat, 2011.....	41
Gambar 3.9.	IPG Provinsi Menurut Peringkat, 2010.....	41
Gambar 4.1.	Tren IDG Indonesia, 2004-2011.....	51
Gambar 4.2.	Pencapaian Komponen IDG Tahun 2011	53
Gambar 4.3.	Perkembangan Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional, 2004-2011	55
Gambar 4.4.	Perkembangan TPAK dan Persentase Angkatan Kerja Perempuan, 2009-2011	56
Gambar 4.5.	Persentase PNS Menurut Jenis Kelamin, 2007-2011	57
Gambar 4.6.	Persentase Pejabat Struktural PNS Menurut Jenis Kelamin, 2011.....	57
Gambar 4.7.	IDG Provinsi Menurut Peringkat, 2010	59
Gambar 5.1.	Tren IPM dan IPG Indonesia, 2004-2011	68
Gambar 5.2.	Tren Selisih IPM dan IPG Indonesia, 2004- 2011	69
Gambar 5.3.	Sebaran Provinsi Menurut Susunan Kuadran Berdasarkan IPM 2011 dan IPG 2011	70
Gambar 5.4.	Hubungan antara IPG 2011 pada IPM 2011 Kabupaten.....	71
Gambar 5.5.	Sebaran Provinsi Menurut Susunan Kuadran Berdasarkan IPM 2011 dan IDG 2011	74
Gambar 5.6.	Sebaran Provinsi Menurut Susunan Kuadran Berdasarkan IPG 2011 dan IDG 2011.....	77
Gambar 5.7.	Hubungan antara IPG 2011 dan IDG 2011...	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Upah Pekerja/Buruh Menurut Jenis Kelamin, 2007-2011	21
Tabel 3.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Rasio (IPG/ IPM), 2004-2011.....	30
Tabel 3.2. Provinsi Dengan Peringkat Tertinggi dan Terendah Berdasarkan Rasio IPG terhadap IPM, 2011.....	37
Tabel 3.3. Provinsi dengan IPG Tertinggi, 2010-2011	42
Tabel 3.4. Provinsi dengan IPG Terendah, 2010-2011	43
Tabel 3.5. Kabupaten/Kota dengan IPG Tertinggi, 2010-2011 ..	43
Tabel 3.6. Kabupaten/Kota dengan IPG Terendah, 2010-2011..	44
Tabel 4.1. Perkembangan Jumlah Anggota DPR RI, 1955-2009..	54
Tabel 4.2. Provinsi dengan IDG Tertinggi, 2010-2011	61
Tabel 4.3. Provinsi dengan IDG Terendah, 2010-2011	61
Tabel 4.4. Kabupaten/Kota dengan IDG Tertinggi, 2010-2011 ..	62
Tabel 4.5. Kabupaten/Kota dengan IDG Terendah, 2010-2011..	63
Tabel 5.1. Selisih IPM dan IPG menurut Provinsi, 2010-2011	73
Tabel 5.2. Pengelompokan Provinsi Berdasarkan IPM, IPG, dan IDG, 2010	81
Tabel 5.3. Pengelompokan Provinsi Berdasarkan IPM, IPG, dan IDG, 2011	82

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Persoalan paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Belum lagi, persoalan lain seperti budaya, atau agama yang terkadang dapat menjadi faktor penghambat untuk mencapai kesetaraan gender.

Disadari, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peranserta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus pemanfaat hasil pembangunan. Secara tuntutan akan kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan paling tidak memiliki dampak pada dua hal. Pertama, dengan kualitas yang dimiliki, perempuan akan menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Kedua, perempuan yang berkualitas turut mempengaruhi kualitas generasi penerus, mengingat fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia di masa datang. Tetapi pada kenyataannya, selama ini peranserta kaum perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Faktor penyebab belum optimalnya peranserta perempuan dalam pembangunan karena masih rendahnya kualitas sumber daya perempuan sehingga tidak mampu untuk bersaing dalam berbagai bidang dengan mitra seajarnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kualitas hidup menunjukkan perkembangan yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Pada tahun 2004, IPM nasional mencapai 68,69 kemudian meningkat menjadi 72,77 pada tahun 2011. Hanya sayangnya, keberhasilan pembangunan kualitas hidup yang diukur melalui IPM masih belum cukup efektif memperkecil kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian kapabilitas dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Fenomena kesenjangan ini secara statistik dapat ditunjukkan oleh pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang nilainya lebih kecil dari pencapaian IPM, baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota. Meski demikian, perkembangan pencapaian IPG dari tahun ke tahun terus meningkat, akan tetapi tidak secepat peningkatan IPM.

Dalam aspek pemberdayaan terutama keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, perempuan juga relatif tertinggal dibandingkan laki-laki. Ketertinggalan ini sangat berpengaruh terhadap hasil keputusan apapun yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Hasil pemilu legislatif tahun 2009 menempatkan keterwakilan perempuan sebagai anggota DPR hanya sekitar 17,49 persen dari keseluruhan jumlah anggota DPR RI. Bahkan di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD jauh lebih kecil. Sementara itu, perempuan sebagai tenaga profesional, manager, administrasi dan teknisi yang bekerja di lembaga eksekutif, yudikatif serta lembaga swasta lainnya tidak lebih dari 45,75 persen dari seluruh tenaga tenaga profesional, manager, administrasi dan teknisi. Namun demikian, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai ukuran keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, meski relatif lambat.



1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, perhatian dunia terhadap pembangunan yang berbasis gender semakin besar. Telah lama diketahui bahwa hampir di seluruh negara telah terjadi diskriminasi gender. Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender merupakan akibat dari adanya sistem (struktur) sosial dimana salah satu jenis kelamin (laki-laki maupun perempuan) menjadi korban. Hal ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk dan cara yang menimpa kedua belah pihak, walaupun dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak dialami oleh perempuan (BKKBN, 2007).

Beragam permasalahan yang dialami perempuan pada masa lalu maupun kini, kian menjadi perhatian komunitas negara-negara di dunia. Perhatian ini sebagai wujud ungkapan keprihatinan sesama manusia atas terjadinya ketidakadilan di berbagai hal yang menyangkut perempuan. Dalam berbagai kesempatan kerap perempuan mengalami diskriminasi seperti dijadikan objek eksploitasi, mengalami kekerasan, subordinasi, serta adanya upaya marginalisasi perempuan. Kemudian permasalahan lain yang kerap dialami perempuan yaitu *double burden* (beban ganda) dimana peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik, tetapi tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.

Keprihatinan negara-negara di dunia diwujudkan dalam berbagai bentuk pertemuan yang menghasilkan serangkaian deklarasi dan konvensi dan telah tercatat dalam dokumen sejarah. Dimulai dari dicetuskannya *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), oleh

Majelis Umum PBB di tahun 1948 yang kemudian diikuti oleh berbagai deklarasi serta konvensi lainnya.

Didalam perkembangannya, konvensi yang menjadi landasan hukum tentang hak perempuan adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB tahun 1979. Konvensi tersebut disebut juga Konvensi Wanita, atau Konvensi Perempuan atau Konvensi CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*). Selanjutnya, Hak Asasi Perempuan yang merupakan Hak Asasi Manusia kembali dideklarasikan dalam Konferensi Dunia ke-IV tentang Perempuan di Beijing tahun 1995. Konferensi tersebut mengangkat 12 bidang yang menjadi keprihatinan Negara-negara di dunia, mencakup:

1. Perempuan dan Kemiskinan,
2. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Perempuan,
3. Perempuan dan Kesehatan,
4. Kekerasan Terhadap Perempuan,
5. Perempuan dan Konflik Bersenjata,
6. Perempuan dan Ekonomi,
7. Perempuan dan Kekuasaan serta Pengambilan Keputusan,
8. Mekanisme Kelembagaan Untuk Kemajuan Perempuan,
9. Hak Asasi Perempuan,
10. Perempuan dan Media,
11. Perempuan dan Lingkungan Hidup, serta
12. Anak Perempuan.

Selanjutnya pada tahun 2000, 189 negara anggota PBB telah menyepakati tentang Deklarasi Milenium (*Millennium Declaration*) untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*) atau MDG's dengan menetapkan target keberhasilannya pada tahun 2015. Ada delapan komitmen kunci yang ditetapkan dan disepakati dalam MDGs, salah satunya adalah mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan (Tujuan 3 MDG's).

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia ikut serta melaksanakan komitmen dengan mendorong upaya

pembangunan menuju kesetaraan gender. Untuk itu, pemerintah berkomitmen melaksanakan tujuan Pembangunan Milenium (MDG's) dengan salah satu targetnya, menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.

Berdasarkan data statistik, tampaknya tujuan MDG's dalam bidang gender sudah pada jalurnya (*on the track*). Dua dari enam indikator yang tercantum dalam target MDG's bahkan sudah melampaui target yang ditetapkan. Dua indikator tersebut yaitu rasio anak perempuan di Sekolah Menengah Pertama dan rasio anak perempuan di Sekolah Menengah Atas dengan capaian pada tahun 2011 masing-masing sebesar 103,45 persen dan 101,41 persen, dimana target dari kedua indikator tersebut sebesar 100 persen. Sementara keempat target lainnya capaiannya sudah sangat bagus di atas 97 persen. Apabila capaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan, maka harapan untuk mencapai target MDG's sangat mungkin diwujudkan.

Dalam publikasinya *Human Development Report* tahun 1995, UNDP mengangkat tema gender. Dalam publikasi ini pertama kali diperkenalkan suatu indeks untuk mengukur pembangunan gender suatu wilayah yaitu *Gender Development Index/GDI* (Indeks Pembangunan Gender/IPG) dan indeks untuk mengukur peranan perempuan dalam bidang ekonomi dan pengambilan keputusan yaitu *Gender Empowerment Measure/GEM* (Indeks Pemberdayaan Gender/IDG). Dalam publikasi tersebut terdapat kalimat "*Development, if not engendered, is endangered*", kalimat ini sepertinya hendak menunjukkan bahwa apabila mengabaikan aspek gender maka akan menghambat suatu wilayah dalam melakukan pembangunan.

UNDP mengelompokkan tingkatan pembangunan manusia ke dalam empat kategori, yaitu :

1. Kelompok Tinggi, jika $IPM/IPG \geq 80$,
2. Kelompok Menengah Atas, jika $IPM/IPG 66 \leq x < 80$,
3. Kelompok Menengah Bawah, jika $IPM/IPG 50 \leq x < 66$,
4. Kelompok Rendah, jika $IPM/IPG < 50$.

Makin disadarinya arti pentingnya aspek gender dalam segala bidang pembangunan membawa dampak positif dalam upaya menuju pengarusutamaan gender. Menanggapi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dalam dan penguasaan terhadap proses pembangunan. Melalui Inpres ini muncul momentum bagi kemajuan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender yang akhirnya diperluas hingga perencanaan dan penganggaran yang inklusif gender.

Untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan-peraturan perundangan sudah responsif gender dan mendukung pengarusutamaan gender dapat dilihat dari data-data terpilah. Indikator-indikator yang menunjukkan capaian-capaian pembangunan berbasis gender akan memberikan gambaran yang nyata tentang pengarusutamaan gender di Indonesia. Diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai pembuka wawasan tentang pembangunan manusia yang berbasis gender.

1.2. Tujuan Penulisan

Publikasi ini disusun untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan manusia serta pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang yang direpresentasikan dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Selain itu juga menelusuri hubungan antara IPM, IPG, dan IDG.

1.3. Sistematika Penulisan

Penulisan pembangunan manusia berbasis gender ini terdiri dari 5 (lima) bab. Bab 1, menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan, sistematika penulisan, serta sumber data. Bab 2, menjelaskan tentang gambaran umum gender di Indonesia dan capaiannya terutama jika dibandingkan dengan capaian negara-negara lain di ASEAN. Bab 3, menjelaskan tentang pencapaian IPG. Bab 4, menjelaskan tentang pencapaian IDG. Bab 5 menjelaskan mengenai hubungan antara IPM, IPG, dan

IDG.

1.4. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan (khususnya dalam penghitungan IPG dan IDG) adalah data Susenas Kor, Susenas Modul Konsumsi dan data Sakernas. Sementara untuk data penunjang digunakan data Supas, Proyeksi Penduduk (SP 2000), dan Indeks Harga Konsumen (IHK) serta data sekunder lainnya. Data Susenas Kor digunakan untuk menghitung indikator pembentuk IPG, yaitu Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara angka harapan hidup dihitung menggunakan data Susenas yang dikoreksi dengan data Supas dan Proyeksi Penduduk. Sementara data Sakernas digunakan untuk menghitung komponen IPG dan IDG yang menyangkut indikator ketenagakerjaan.



2

Gambaran Umum Pembangunan Manusia di Indonesia

Gambaran Umum Pembangunan Manusia di Indonesia

2

2.1. Perbandingan Capaian Pembangunan Manusia di Negara ASEAN

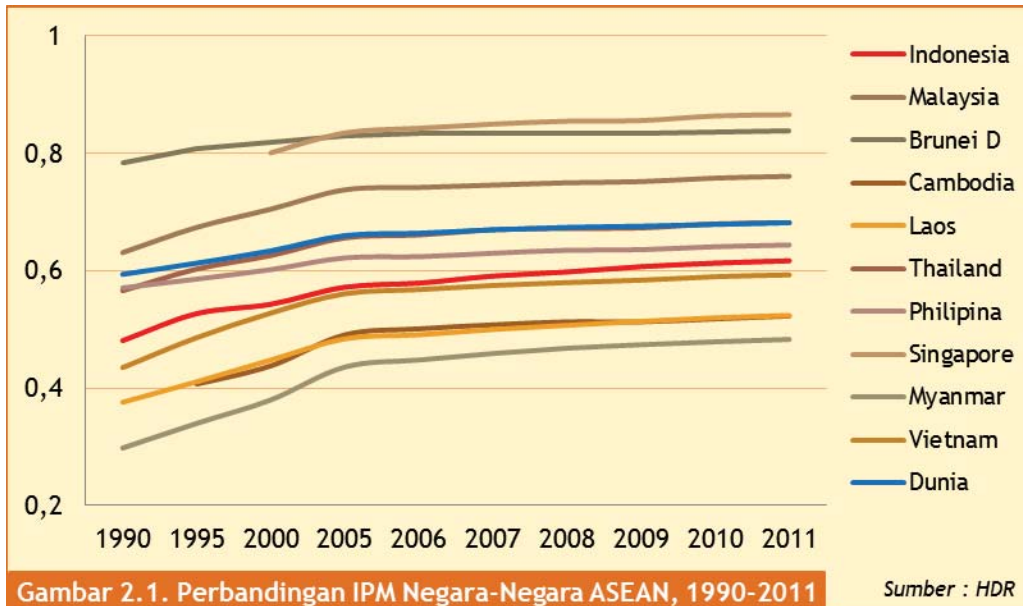
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya

Persoalan pembangunan manusia berbasis gender di wilayah ASEAN sudah mulai mendapat perhatian yang cukup serius yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan indikator-indikator pembangunan yang berkaitan dengan gender. Berbagai masalah mengenai pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan mulai terlihat bergeser. Secara singkat perbandingan antar Negara ASEAN bisa dilakukan dengan membandingkan indikator-indikator yang menggambarkan variabel-variabel tersebut seperti Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Ketimpangan Gender.

Indeks Pembangunan Manusia adalah salah satu indeks yang mengukur tentang tingkat pembangunan manusia yang diukur dari tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Sementara Indeks ketimpangan gender menggambarkan ketimpangan gender dalam tiga dimensi yaitu kesehatan, reproduksi, dan pemberdayaan perempuan.

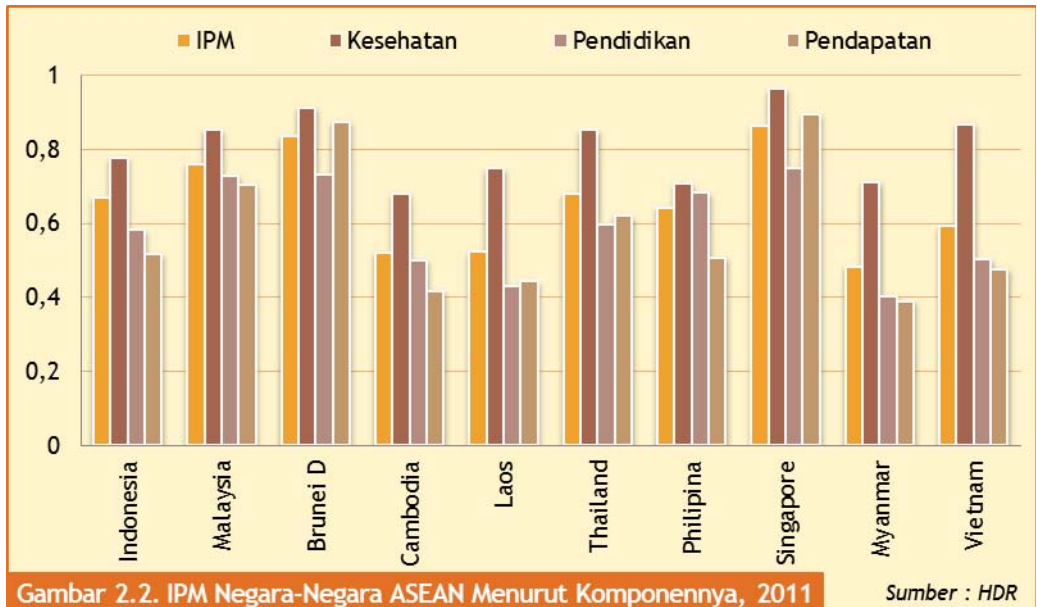
Secara umum perbandingan IPM antar negara ASEAN menunjukkan disparitas yang cukup tinggi sejak tahun 1990. Peningkatan IPM tidak secara langsung menggambarkan peringkat kualitas pembangunan manusia. Sebagai contoh, meskipun selama dua dekade IPM Myanmar telah meningkat secara signifikan, namun Myanmar tetap menjadi negara dengan IPM terkecil di kawasan ASEAN. Angka IPM Myanmar merupakan yang terkecil dibandingkan Negara ASEAN lainnya yaitu 0,483 pada tahun 2011. Peringkat terendah berikutnya adalah Laos dan Cambodia dengan nilai IPM di tahun 2011 berturut-turut adalah 0,523 dan 0,524. Di sisi lain, Negara-negara dengan nilai IPM tinggi di kawasan ASEAN berturut-turut adalah Singapura, Brunei

Darussalam dan Malaysia masing-masing dengan IPM 0,866, 0,838, dan 0,761 untuk tahun 2011. Untuk Negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi ke 7, dengan nilai capaian sebesar 0,617. Rata-rata IPM dunia tahun 2011 adalah 0,682. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.1.



Bila ditelusuri lebih jauh berdasarkan komponen pembentuknya, maka Negara-negara yang berada pada peringkat tinggi untuk nilai IPM-nya mempunyai nilai tinggi untuk dimensi kesehatan, ataupun gabungan dari tiga dimensi pembentuk IPM¹. Dimensi kesehatan diukur berdasarkan angka harapan hidup pada saat lahir (e_0). Nilai tertinggi untuk dimensi kesehatan dicapai oleh Singapura dengan indeks dimensi kesehatan sebesar 0,965, sementara nilai terendah dicapai oleh Myanmar sebesar 0,713. Indonesia berada pada urutan ke enam indeks diemensi kesehatan dengan capaian sebesar 0,779. Negara-negara yang dimensi kesehatannya berada dibawah Indonesia adalah Laos, Myanmar, Philipna, dan Cambodia. Komponen kedua adalah dimensi pendidikan yang diukur berdasarkan harapan lama sekolah (EYS), dan rata-rata lamanya sekolah (*Mean Years of Schooling*). Negara yang mempunyai nilai dimensi pendidikan tinggi adalah Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Indonesia berada pada posisi ke enam dengan nilai 0,584. Negara-negara yang dimensi pendidikan dibawah Indonesia adalah

Vietnam, Cambodia, Myanmar, dan Laos. Komponen ketiga yang nilainya terbesar untuk Negara-negara dengan IPM tinggi di ASEAN adalah pendapatan. Komponen pendapatan ini diukur dari pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan (PPP). Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand mempunyai nilai per kapita riil di atas Indonesia, sementara Myanmar, Cambodia, Laos, Vietnam dan Philipina mempunyai pendapatan perkapita riil dibawah Indonesia. Gambaran secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2.2.

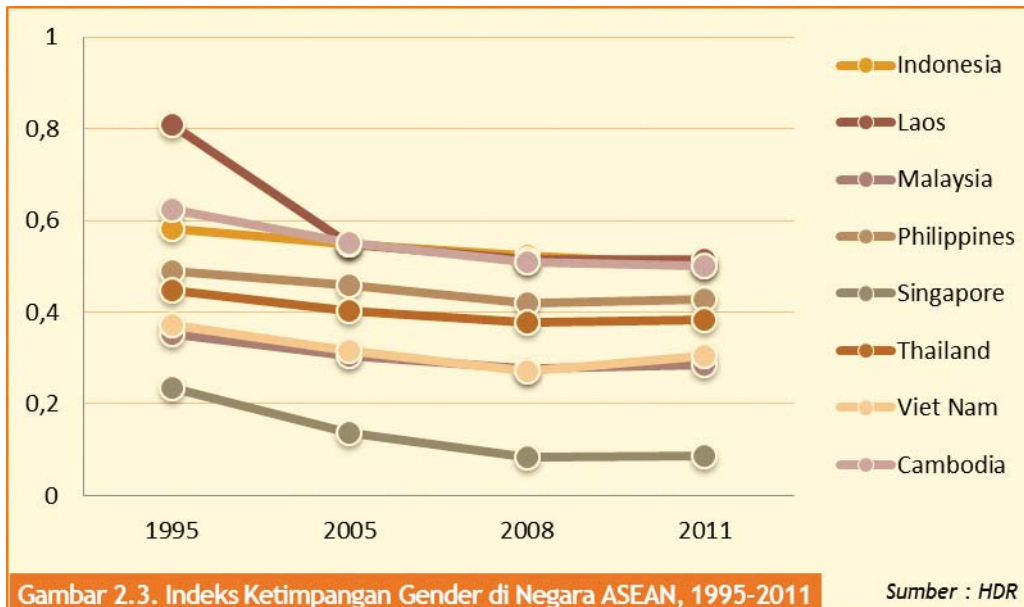


Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender (*Gender Inequality Index*) mencerminkan ketimpangan perempuan yang dilihat dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Indeks yang terbentuk menunjukkan kehilangan dalam pembangunan manusia yang diakibatkan oleh adanya perbedaan gender. Nilainya berkisar dari 0, yang menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki kehilangan kesempatan yang sama, dan 1, yang menunjukkan bahwa perempuan kehilangan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Dimensi kesehatan diukur menggunakan dua indikator yaitu tingkat kematian ibu (*maternal mortality rate*) dan tingkat kesuburan remaja (*adolescent fertility rate*). Dimensi

pemberdayaan juga didekati dengan dua indikator yaitu proporsi kursi parlemen dipegang oleh laki-laki atau perempuan, dan capaian tingkat pendidikan menengah dan tinggi dari tiap gender. Dimensi tenaga kerja diukur dengan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dirancang untuk mengungkapkan sejauh mana prestasi nasional dalam aspek pembangunan manusia yang hilang akibat adanya perlakuan ketidaksetaraan gender, dan juga untuk menyediakan data empiris untuk analisis kebijakan dan upaya

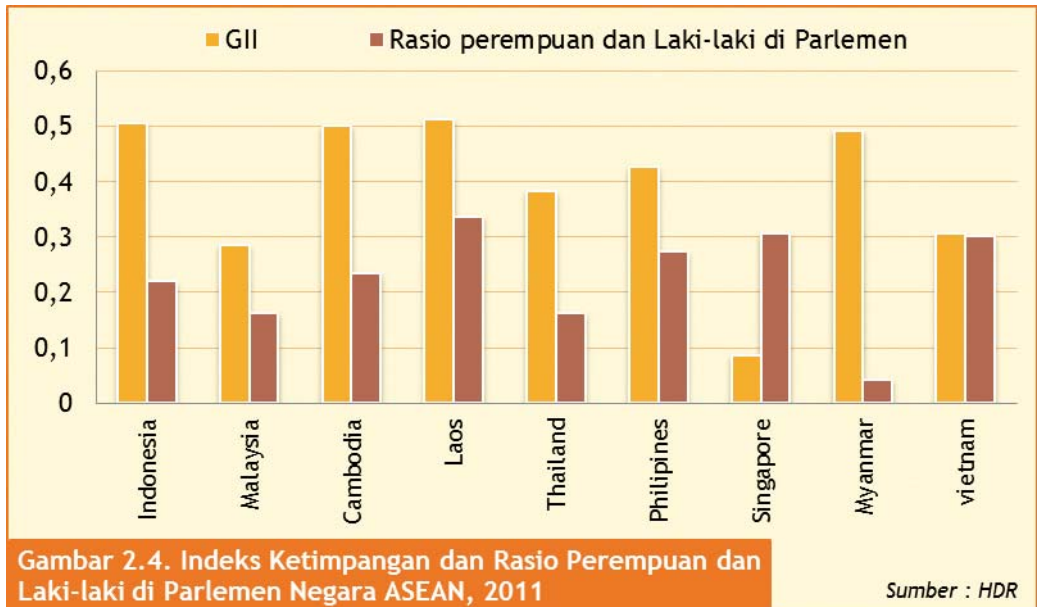


advokasi.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh HDR (*Human Development Report*), dalam kurun waktu 15 tahun telah terjadi penurunan indeks ketimpangan gender di kawasan Negara-negara ASEAN. Hal ini berarti telah terjadi penurunan ketimpangan akibat adanya perbedaan gender. Penurunan yang signifikan terjadi di Negara Laos dimana pada tahun 1995 IKD tercatat sebesar 0,8 menurun menjadi 0,5 pada tahun 2011. Indonesia juga mempunyai IKD yang hampir sama dengan Cambodia dan Laos yang termasuk pada kategori tertinggi di kawasan ASEAN. Untuk tahun 2011 negara dengan nilai IKD terendah adalah Singapura.

Bila dilihat lebih jauh berdasarkan komponennya maka salah satu penyebab terjadi ketimpangan adalah rasio

perempuan terhadap laki-laki di parlemen. Sudah bukan rahasia lagi bila jumlah keterwakilan perempuan di parlemen hampir di semua Negara sangat sedikit. Hal ini tidak sesuai dengan populasi perempuan di masing-masing Negara. Di beberapa Negara keterwakilan perempuan pada level pengambil keputusan merupakan posisi yang kritis bagi terlaksananya demokrasi di suatu Negara (Sun, 2005). Selain masalah persentase, kualitas perempuan yang duduk dalam parlemen juga menjadi penting karena akan mempengaruhi peraturan-peraturan atau keputusan



terkait perempuan.

Rasio keterwakilan perempuan terhadap laki-laki di parlemen di Negara ASEAN terlihat berbanding terbalik dengan nilai indeks ketimpangan gender di Negara yang bersangkutan. Myanmar yang mempunyai rasio keterwakilan perempuan dan laki-laki rendah mempunyai nilai indeks ketimpangan yang tinggi, sebaliknya Singapura yang mempunyai rasio keterwakilan perempuan yang tinggi mempunyai nilai indeks ketimpangan yang sangat rendah. Banyak penyebab dari rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen misalnya adanya pemikiran bahwa tanggung jawab pengasuhan anak sepenuhnya ada pada perempuan. Pekerjaan pengasuhan anak ini berakibat pada banyaknya perempuan yang tinggal di rumah sehingga akibat jangka panjangnya adalah tidak banyak perempuan yang

berinteraksi secara publik (Heines, 1992). Seager (1997) mengatakan kalau laju dari keterwakilan perempuan di Parlemen sangatlah lambat sehingga UN memperkirakan bahwa dengan laju seperti ini keseimbangan antara laki-laki dan perempuan di parlemen baru akan bisa dicapai pada tahun 2490.

2.2. Permasalahan Gender di Indonesia

Kesetaraan gender dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi, melakukan control dan menerima manfaat pembangunan di segala bidang kehidupan. Dalam realitas kehidupan telah terjadi perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan yang melahirkan perbedaan status sosial di masyarakat, dimana laki-laki lebih diunggulkan dari perempuan melalui konstruksi sosial. Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk, yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dibentuk melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos.

Perbedaan jenis kelamin sering dipergunakan masyarakat untuk membentuk pembagian peran (kerja) laki-laki dan perempuan atas dasar perbedaan tersebut. Akibatnya terjadilah pembagian peran gender yaitu Peran Domestik dan Peran Publik. Peran domestik cenderung tidak menghasilkan uang, kekuasaan, dan pengaruh. Peran ini lebih banyak diserahkan kepada kaum perempuan, sedangkan peran publik yang menghasilkan uang, kekuasaan dan pengaruh diserahkan kepada kaum laki-laki. Akibat pembagian kerja yang tidak seimbang melahirkan ketimpangan peran laki-laki dan perempuan yang berakibat ketidakadilan gender yang merugikan perempuan. Di Indonesia, ketimpangan gender terlihat dari segala aspek antara lain dalam lingkungan keluarga, kependudukan, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, dan dalam Pemerintahan.

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang ini juga sangat dipengaruhi oleh budaya dan kultural masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak etnis dan suku. Setiap masyarakat suku di Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri dalam memaknai peran gender di Indonesia. Namun

demikian, secara umum menunjukkan bahwa ada dominasi laki-laki dalam kehidupan sehari-hari.

Peran Domestik dalam Keluarga

Meskipun perempuan ditempatkan pada peran domestik di lingkungan keluarga, namun posisi perempuan Indonesia di lingkungan keluarga selalu dinomorduakan. Karena berperan sebagai pencari nafkah, posisi kepala rumah tangga pada umumnya akan diserahkan kepada laki-laki/suami kecuali jika perempuan tersebut adalah seorang janda atau tidak ada laki-laki dalam suatu keluarga. Meskipun peran perempuan sangat banyak dalam suatu keluarga seperti mengurus rumah tangga dan anak-anak, tetapi posisi kepala keluarga tetap diserahkan kepada laki-laki. Hanya ada sekitar 13,9 persen rumah tangga yang kepala rumah tangganya perempuan (Susenas 2010).

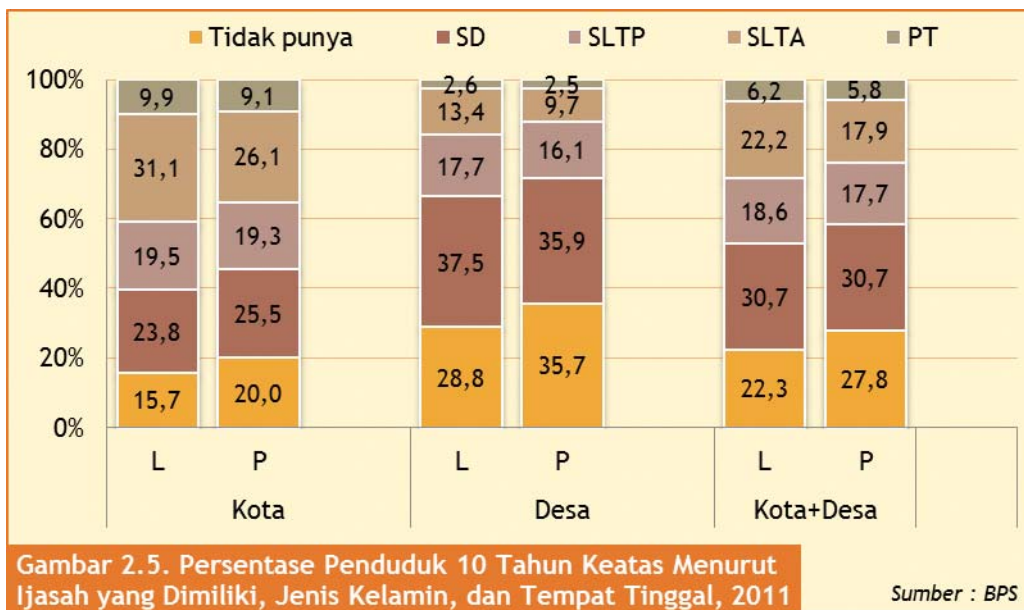
Selama ini pemahaman masyarakat Indonesia merekonstruksi bahwa secara kodrat perempuan lemah dan laki-laki kuat, sehingga untuk menjadi pemimpin dalam sebuah keluarga tetap diserahkan kepada laki-laki. Hal ini menunjukkan dominasi laki-laki pada peran domestik. Keadaan tersebut menyebabkan posisi perempuan sarat dengan pekerjaan yang beragam, dalam waktu yang tidak terbatas, dan dengan beban yang cukup berat, seperti memasak, mengurus rumah, mengurus anak, dan sebagainya. Pekerjaan domestik tersebut dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi, seperti haid, hamil, melahirkan, dan menyusui. Penempatan perempuan pada tugas domestik sepenuhnya mengakibatkan potensi perempuan untuk melakukan hal produktif menjadi berkurang. Tercatat ada sekitar 33,5 persen perempuan yang hanya mengurus rumah tangga sehingga tidak dimasukkan sebagai angkatan kerja (Sakernas Februari 2011). Bagi para perempuan/istri yang bekerja, maka tugasnya menjadi berlipat ganda yaitu tugas sebagai pencari nafkah sekaligus tugas untuk mengurus keluarga. Hal ini mengakibatkan jam kerja perempuan juga menjadi lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Lemahnya posisi perempuan dalam keluarga memungkinkan untuk mendapatkan perlakuan kekerasan fisik baik dari dalam lingkungan keluarga, maupun dari lingkungan

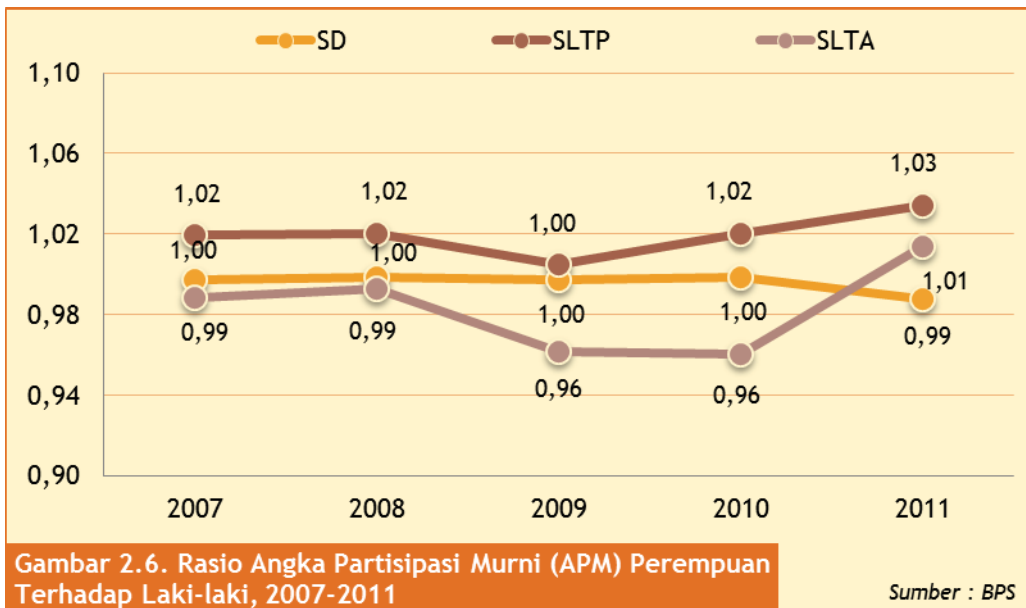
sekitarnya, seperti KDRT dan pemerkosaan. Biasanya kejadian-kejadian tersebut tidak dilaporkan karena merupakan aib bagi keluarga maupun bagi perempuan tersebut. Namun seiring dengan keterbukaan informasi dan mengemukakan pendapat maka kejadian-kejadian tersebut mulai banyak yang dilaporkan. Hasil survei Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menunjukkan adanya peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2011 terdapat 119.107 kejadian, meningkat 13,3 persen dibandingkan tahun 2010 (105.103 kejadian). Sebagian besar kejadian ini adalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Kesempatan Memperoleh Pendidikan

Selama ini kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan belum sepenuhnya terpenuhi. Beberapa indikator menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam pendidikan di Indonesia. Kecenderungannya adalah semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin meningkat kesenjangan gendernya, dimana proporsi laki-laki yang berpendidikan semakin lebih besar dibandingkan dengan proporsi perempuan yang bersekolah khususnya di perkotaan (Gambar 2.5). Dari penduduk perempuan berusia 10 tahun keatas, masih terdapat 27,8 persen yang tidak mempunyai ijazah, lebih besar daripada laki-laki yaitu 22,3 persen.



Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai hal di antaranya adalah pertimbangan prioritas bahwa nilai ekonomi anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan anak perempuan, karena laki-laki harus mencari nafkah sehingga harus lebih dibekali pendidikan dibandingkan anak perempuan. Hal ini banyak dijumpai pada

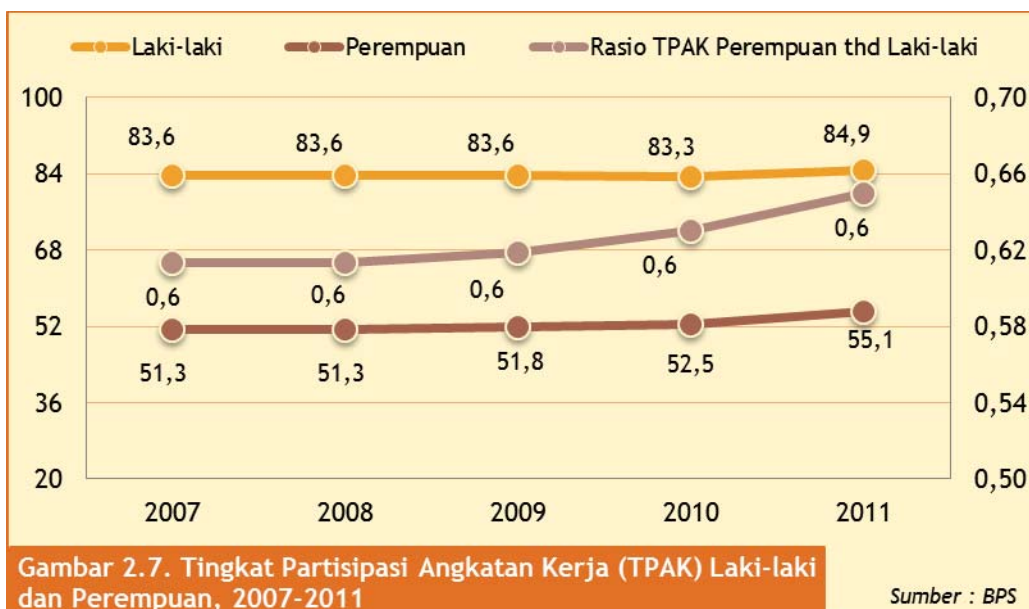


keluarga yang kondisi ekonominya terbatas, dimana harus mempunyai pilihan dalam prioritas pendidikan khususnya bagi anak laki-laki.

Pada era sekarang, pendidikan di Indonesia telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan bagi penduduk laki-laki dan perempuan. Hal itu dapat dibuktikan antara lain dengan semakin membaiknya rasio partisipasi pendidikan dan tingkat melek huruf penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki. Untuk mengukur kesenjangan partisipasi pendidikan antara perempuan dan laki-laki digunakan rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki. Pada jenjang pendidikan dasar (SD) rasio APM-nya telah mencapai angka 100 pada tahun 2011, bahkan pada tingkat SLTP diatas 100. Namun demikian pada jenjang SLTA rasio APM masih 95,9. Hal ini menunjukkan pada level yang lebih tinggi pencapaian kesetaraan pendidikan semakin berkurang.

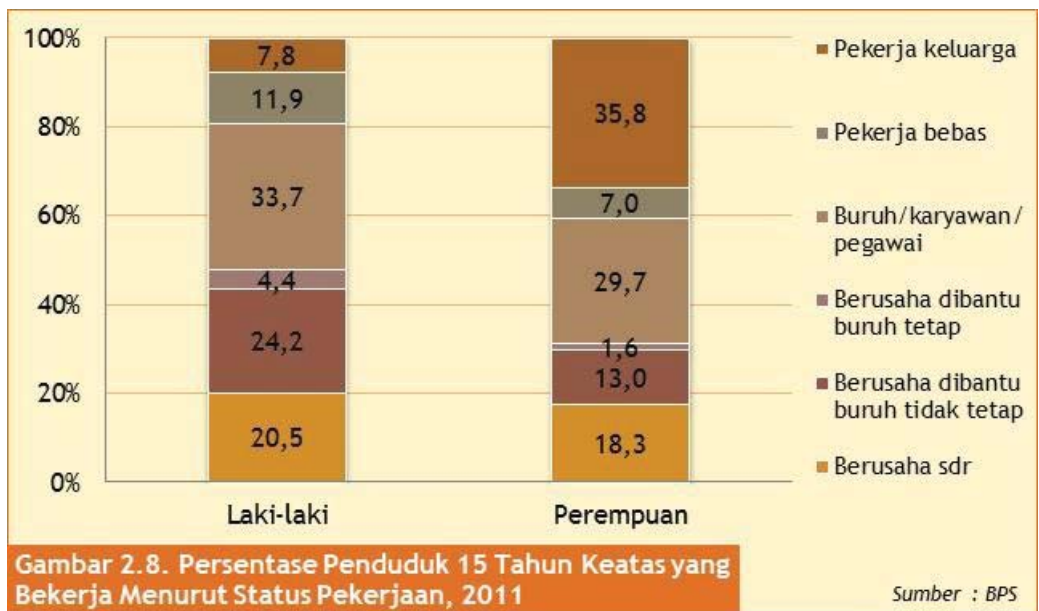
Kesempatan Bekerja dan Berusaha

Pada era sekarang ini, peran perempuan dalam pemenuhan



ekonomi keluarga semakin meningkat, namun demikian peluang untuk bekerja dan berusaha masih lebih kecil dibandingkan laki-laki. Pembagian tugas dalam keluarga, dimana laki-laki berkewajiban mencari nafkah menjadikan kesempatan bekerja untuk perempuan menjadi lebih kecil. Hal ini dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan, yaitu 84,9 berbanding 55,1 pada 2011. Hal ini juga menunjukkan bahwa penduduk perempuan 15 tahun keatas yang bukan merupakan angkatan kerja cukup besar yaitu 44,9 persen, dimana 33,5 persen mengurus rumah tangga. Sedangkan laki-laki yang bukan merupakan angkatan kerja hanya 15,1 persen. Meskipun angka TPAK perempuan kecil, namun rasio TPAK perempuan terhadap laki-laki cenderung mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir yaitu dari 0,61 pada tahun 2007 menjadi 0,65 pada tahun 2011. Ini menunjukkan partisipasi perempuan dalam memperoleh pekerjaan mengalami peningkatan setiap tahun.

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja juga masih belum maksimal, tercatat 39 persen penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja adalah perempuan dan sepertiganya merupakan pekerja keluarga yang secara ekonomi tidak mendapatkan imbalan jasa. Angka ini lebih besar dibandingkan pekerja keluarga laki-laki yang hanya 8,7 persen. Sementara



kesempatan bagi perempuan baik menjadi pengusaha atau sebagai buruh/pegawai masih dibawah laki-laki (Gambar 2.8).

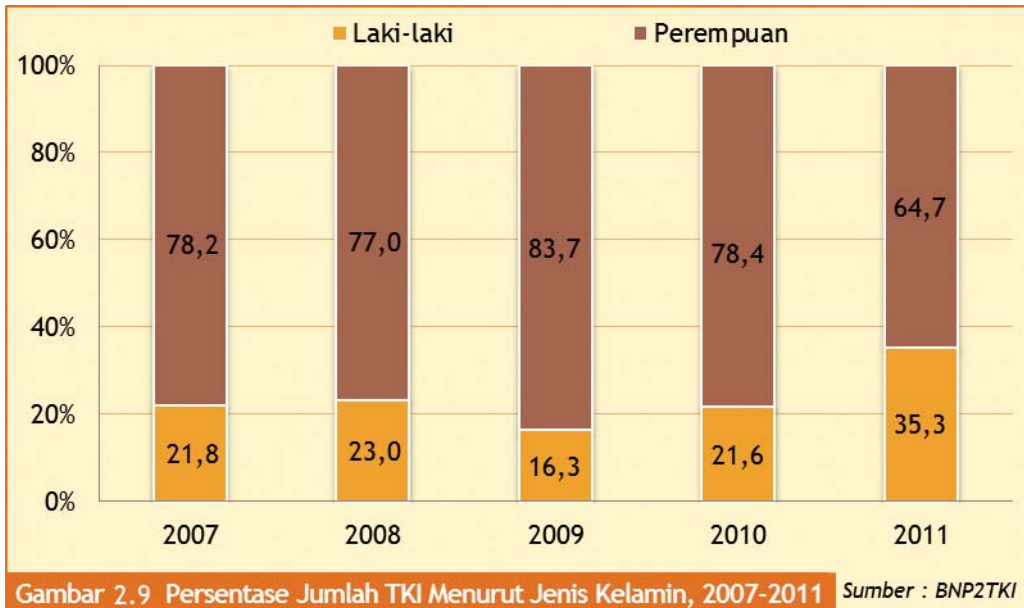
Meskipun setiap tahun terjadi peningkatan jumlah perempuan yang bekerja diluar rumah, namun pekerjaan yang diperoleh masih tetap berdasarkan konsep gender. Pekerjaan kaum perempuan lebih banyak pada posisi yang bukan sebagai pengambil keputusan. Hanya sebagian kecil perempuan yang mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan manager atau direktur. Demikian juga dengan kesetaraan dalam memperoleh imbal jasa belum sepenuhnya diterima para buruh/karyawan perempuan di Indonesia. Buruh/karyawan perempuan menerima upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu hanya sekitar 77,8 persen dari upah yang diterima laki-laki. Pada tahun

Tabel 2.1 Upah Pekerja/Buruh Menurut Jenis Kelamin, 2007-2011

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Rasio Upah
2007	1.141.308	854.052	0,75
2008	1.031.348	773.979	0,75
2009	1.165.697	873.103	0,75
2010	1.222.368	953.927	0,78
2011	1.640.472	1.275.653	0,78

Sumber : BPS

2011, rata-rata upah buruh perempuan selama sebulan sebesar Rp. 1.275.653, jauh lebih kecil dari upah buruh laki-laki yaitu sebesar Rp. 1.640.472. Selama 5 tahun terakhir proporsi upah



yang diterima buruh perempuan relatif mengalami sedikit peningkatan (Tabel 1).

Kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, mengakibatkan terjadinya migrasi keluar negeri untuk mendapatkan penghasilan. Tingkat permintaan tenaga kerja di beberapa negara, telah menarik minat sebagian orang untuk menjadi tenaga kerja di luar negeri. Namun demikian, karena minimnya pendidikan, maka sebagian besar tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga dan buruh bangunan. Ironisnya sebagian besar tenaga kerja Indonesia tersebut adalah perempuan atau yang dikenal dengan istilah TKW (Tenaga Kerja Wanita). Pada tahun 2011 terdapat 376.027 TKW atau sebesar 64,7 dari total TKI yang tercatat di BNP2TKI, belum termasuk TKW yang pergi secara ilegal. Angka persentase ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena adanya perjanjian moratorium TKI dengan beberapa Negara penerima TKI karena terjadinya kasus kekerasan terhadap TKW.

Kesempatan dalam Pemerintahan

Selama ini berkembang sebuah pandangan yang tidak adil bagi perempuan dimana perempuan dianggap memiliki sifat yang melekat antara lain irasional, emosional, lemah, bodoh, penakut, inferior, dan feminin yang menyebabkan perempuan ditempatkan dalam peran-peran yang dianggap kurang penting. Potensi perempuan sering dinilai lebih rendah oleh sebagian besar masyarakat sehingga mengakibatkan sulitnya mereka menembus posisi-posisi strategis dalam komunitasnya, terutama dalam peran pengambil keputusan. Hal ini terlihat dari jumlah perempuan yang menjadi pemimpin dalam masyarakat dinilai masih sangat jauh dibandingkan dengan laki-laki. Sebagai contoh dalam pilkada kabupaten/kota, hanya sedikit perempuan yang mencalonkan diri, apalagi kemudian terpilih menjadi bupati/walikota. Pada tahun 2012 hanya ada 10 perempuan yang menjadi bupati/walikota dibandingkan dengan jumlah seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang berjumlah 492. Sedangkan pada level provinsi hanya ada gubernur Banten yang berjenis kelamin perempuan.

Masalah kesenjangan gender juga terlihat dari perbedaan komposisi perempuan dan laki-laki yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun seiring dengan perkembangan waktu, jumlahnya semakin berimbang. Pada tahun 2011 persentase PNS



perempuan sebesar 46,5 persen. Persentase ini semakin berimbang, dimana pada 5 tahun yang lalu persentase PNS perempuan hanya 42,4 persen (Gambar 2.10).

Produk Undang-Undang Terkait Gender

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan kesepakatan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam UUD 45 Pasal 27. Namun demikian, dalam perkembangannya beberapa Undang-Undang (UU) yang selama ini berlaku di Indonesia, disadari mempunyai arti yang masih diskriminatif terhadap perempuan. Seperti dalam UU mengenai sistem pengupahan tenaga kerja perempuan, tunjangan keluarga dan tunjangan kesehatan-perempuan dianggap lajang sehingga suami dan anak-anak tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana yang diterima pekerja laki-laki. Ketentuan ini termuat dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 7 Tahun 1990 tentang Upah, PP No. 37 Tahun 1967 tentang Sistem Pengupahan di lingkungan perusahaan negara, Peraturan Menteri Pertambangan No.2/P/M/1971, Peraturan Menteri Pertanian No.K440/01/2/1984 dan No.01/GKKU/3/1978 dan SE Menaker No.4/1988 tentang tunjangan kesehatan, serta pasal 8 UU No.7/1983, pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No. 947/KMK/04/1983 dan Pasal 8 UU No. 10/1994 tentang prosedur memperoleh NPWP. Selain itu, berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2012 telah teridentifikasi ada sekitar 282 peraturan daerah yang diduga bias gender. Sejumlah peraturan perundangan tersebut tidak mampu mengakomodir kesetaraan gender yang telah dijamin oleh UUD.



3

Pencapaian Pembangunan Gender

Kesetaraan gender bukan dimaknai sebagai perbedaan fisik semata, namun jauh lebih luas pengertiannya, yakni kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi di segala bidang kehidupan. Sementara itu, keadilan gender merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki sehingga dalam menjalankan kehidupan tidak ada pembakuan peran, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki. Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pembangunan yang selama ini dilaksanakan dengan mengakomodasi persoalan gender, maka diperlukan sebuah ukuran yang dapat menjelaskan bahwa pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebijakan nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 dan dipertegas dalam instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Beberapa ukuran tentang kesetaraan dan keadilan gender telah digunakan banyak pihak, meski ukuran tersebut masih bersifat tunggal (*single variable*). Namun didalam perkembangannya, ukuran yang bersifat komprehensif dan representatif mutlak dibutuhkan. *United Nations Development Programs* (UNDP) melalui Laporan Pembangunan Manusia Tahun 1995 memperkenalkan ukuran pembangunan manusia yang bersifat gabungan (komposit) dari empat indikator, yang

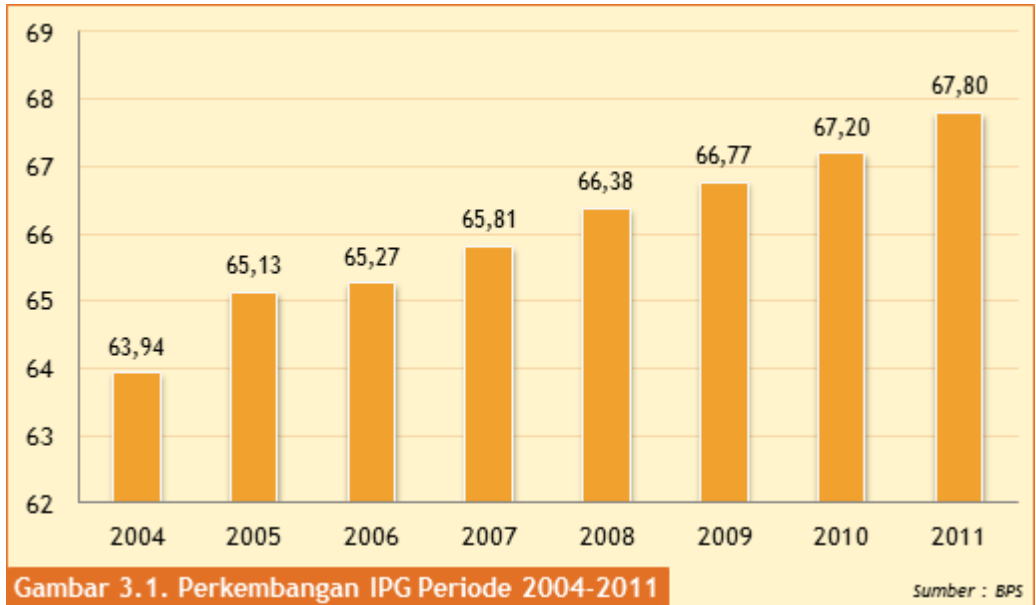
menyoroti tentang status perempuan khususnya mengukur prestasi dalam kemampuan dasar. Ukuran komposit yang dimaksud adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG)¹. Melalui IPG perbedaan pencapaian yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan. Sementara itu, pencapaian pembangunan manusia secara umum dapat dilihat dengan menggunakan indeks pembangunan manusia. Hasil pengurangan antara IPM dengan IPG mengindikasikan adanya kesenjangan pencapaian kapabilitas antara laki-laki dan perempuan. Pada bab ini akan dibahas mengenai pencapaian pembangunan gender di Indonesia yang mencakup perkembangannya hingga tahun 2011, pencapaian komponen IPG dan disparitas IPG antar wilayah.

3.1. Pencapaian Pembangunan Gender

Persamaan status dan kedudukan merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki yang tidak hanya dijamin oleh perundang-undangan, tetapi juga dalam praktek kehidupan sehari-hari. Jaminan persamaan status dan kedudukan ini meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program-program peningkatan kapabilitas dasar (BPS, 1998). Program peningkatan kapabilitas dasar yang dimaksud mencakup berbagai pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan pemerintah kepada semua penduduk. Namun kenyataannya, implementasi pada kehidupan sehari-hari khususnya upaya peningkatan kapabilitas dasar penduduk perempuan belum sepenuhnya dapat diwujudkan karena masih kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang patriarki. Nilai-nilai sosial budaya patriarki ini secara langsung maupun tidak langsung dapat menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Belum lagi persoalan ketidaktepatan pemahaman ajaran agama yang seringkali menyudutkan kedudukan dan peranan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat (Parawansa, 2003). Untuk itu, diperlukan upaya lebih serius dan berkesinambungan dalam mewujudkan persamaan status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan melalui berbagai program pembangunan seperti peningkatan peran perempuan

¹ IPG mengukur hal yang sama seperti IPM hanya komponen yang digunakan dibedakan menurut jenis kelamin.

dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, penguatan peran masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi pemerintah, organisasi perempuan dan lembaga-lembaga lainnya. Melalui upaya ini diharapkan peningkatan kapabilitas dasar perempuan akan dapat segera diwujudkan.



Secara umum pencapaian pembangunan gender di Indonesia dari waktu ke waktu memperlihatkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan IPG selama kurun waktu 2004-2011 (Gambar 3.1). Pada tahun 2004 IPG secara nasional telah mencapai 63,94, kemudian naik menjadi 65,81 pada tahun 2007 dan bergerak naik lagi secara perlahan hingga menjadi 67,80 pada tahun 2011.

Namun perlu diperhatikan bahwa peningkatan IPG dalam kurun waktu 2004-2011 tersebut belum memberikan gambaran yang menggembirakan apabila dilihat dari kerangka pencapaian persamaan status dan kedudukan menuju kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini dikarenakan pencapaian IPG selama kurun waktu tersebut masih belum mampu mengurangi jarak secara nyata dalam pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan. *Gap* antara IPM dengan IPG masih terlihat tetap dan cenderung tidak berubah dari besarnya

**Tabel
3.1****Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Rasio (IPG/IPM), 2004-2011**

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Rasio %
2004	68,69	63,94	93,1
2005	69,57	65,13	93,6
2006	70,08	65,27	93,1
2007	70,59	65,81	93,2
2008	71,17	66,38	93,3
2009	71,76	66,77	93,0
2010	72,27	67,20	93,0
2011	72,77	67,80	93,2

Sumber : BPS

Harus diakui, upaya pembangunan manusia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup selama beberapa dekade telah mengalami kemajuan. Namun, hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup masih tampak kentara yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG yang menunjukkan angka lebih rendah dibanding IPM. Pada perkembangannya, selama kurun waktu 2004-2011 secara nasional IPG selalu menunjukkan posisi lebih rendah dibandingkan IPM. Besaran rasio yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara IPG terhadap IPM pada kisaran 93 persen. Hal ini dapat dimaknai bahwa masih terjadi kesenjangan gender meski IPG memperlihatkan perkembangan yang selalu meningkat selama periode 2004-2011 (Tabel 3.1). Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kapabilitas dasar penduduk baik bagi penduduk laki-laki maupun perempuan melalui berbagai kebijakan pembangunan di berbagai bidang kehidupan sehingga *gap* yang terjadi antara kapabilitas dasar laki-laki dan perempuan dapat diperkecil jaraknya. Keberhasilan upaya peningkatan kapabilitas dasar penduduk pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan angka IPG.

3.2. Pencapaian Komponen Indeks Pembangunan Gender

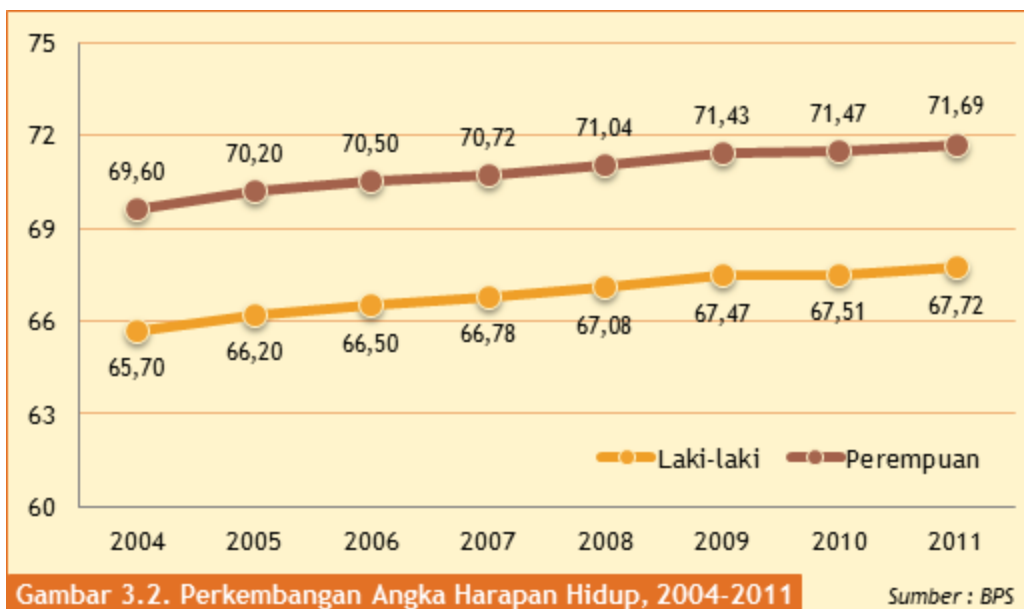
Peningkatan IPG selama kurun waktu 2004-2011 tersebut tentunya akan dipengaruhi oleh peningkatan beberapa komponen IPG itu sendiri. Hal ini berarti bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu 2004-2011 terus mengalami peningkatan seiring dengan pelaksanaan program-program pembangunan. Pada subbab ini akan dibahas perkembangan masing-masing komponen IPG.

Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Gambar 3.2 memperlihatkan AHH laki-laki dan perempuan selama periode 2004-2011.

Dari gambar tersebut terlihat bahwa perkembangan AHH perempuan mengalami peningkatan selama periode 2004-2011. Pada tahun 2004 AHH perempuan mencapai 69,60 tahun, kemudian tahun berikutnya meningkat lagi menjadi 71,69 tahun pada tahun 2011. Peningkatan AHH perempuan juga diikuti dengan peningkatan AHH laki-laki, hanya saja level yang dicapai masih dibawah perempuan yaitu di angka 60-an tahun. Pada tahun 2004 AHH laki-laki mencapai 65,70, meningkat menjadi 67,72 tahun pada tahun 2011. Lebih jauh, pada gambar tersebut terlihat pola peningkatan AHH perempuan yang juga diikuti oleh peningkatan AHH laki-laki namun peningkatan kedua AHH tersebut tidak cukup nyata untuk mempersempit *gap* antara pencapaian AHH perempuan dan laki-laki. Tetapi, dalam jangka panjang perbedaan tersebut diperkirakan semakin mengecil sejalan dengan perbaikan pelayanan di bidang kesehatan. Jika dilihat secara umum terlihat bahwa AHH laki-laki cenderung empat tahun lebih rendah dibanding AHH perempuan.

Secara umum pembangunan di bidang kesehatan di Indonesia telah membawa dampak semakin membaiknya kualitas kesehatan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan AHH yang meningkat dari waktu ke waktu baik laki-laki maupun



perempuan. Tetapi sayangnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa level AHH yang dicapai penduduk laki-laki masih jauh dibawah level AHH yang dicapai perempuan, yakni di level 60-an tahun untuk laki-laki berbanding level 70-an tahun untuk perempuan. Banyak faktor penyebab rendahnya AHH laki-laki dibandingkan AHH perempuan seperti kesehatan, perilaku, dan kemampuan bertahan hidup. Hasil kajian dari aspek kesehatan, salah satunya mengungkapkan bahwa banyaknya kejadian kematian pada laki-laki umumnya bersifat prematur yang seharusnya dapat dicegah melalui tindakan promosi kesehatan atau pencegahan yang dapat dilakukan sedini mungkin. Selain itu, beberapa penyakit yang menjadi penyebab utama kematian pada laki-laki adalah penyakit degenerasi seperti jantung, paru, stroke, hipertensi, diabetes dan kanker.

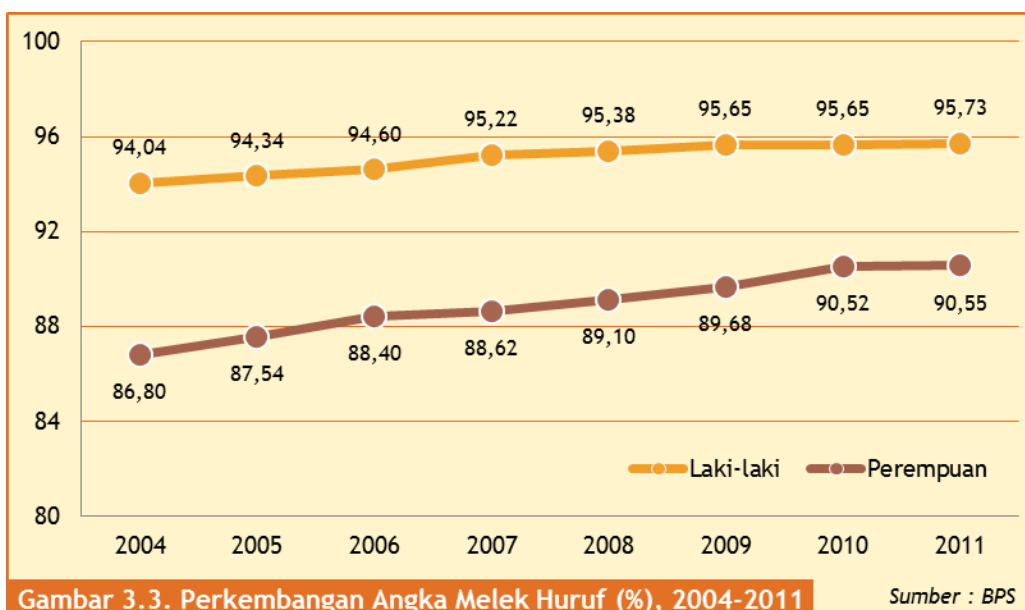
Angka Melek Huruf & Rata-rata Lama Sekolah

Kemajuan di bidang pendidikan memiliki andil yang sangat besar dalam kemajuan pembangunan manusia karena pendidikan membawa dampak positif bagi kualitas manusia. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka putus sekolah menjadi program prioritas dalam kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Pembangunan serta revitalisasi gedung-gedung sekolah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi

sekolah secara berkelanjutan.

Indikator pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan baik dalam IPM maupun IPG adalah Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata lama Sekolah (MYS). AMH menggambarkan persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang mampu baca tulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.

Gambar 3.3 menyajikan perkembangan Angka Melek Huruf



(AMH) laki-laki dan perempuan selama periode 2004-2011. Perkembangan AMH baik laki-laki maupun perempuan selama periode 2004-2011 terus meningkat meski peningkatannya berjalan lambat terutama untuk laki-laki. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peningkatan indikator sosial seperti kesehatan dan pendidikan tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek. Hal ini berlaku baik untuk AMH laki-laki maupun perempuan. Meski AMH perempuan masih lebih rendah dibanding AMH laki-laki, namun suatu hal yang menggembirakan adalah bahwa peningkatan AMH perempuan lebih cepat dibandingkan dengan AMH laki-laki. Pada periode 2004-2011 AMH perempuan meningkat hampir 4 persen, sementara AMH laki-laki hanya meningkat sekitar 1,7 persen. Pada tahun 2011,

AMH laki-laki mencapai 95,73 persen dan perempuan mencapai 90,55 persen. Hal ini berarti bahwa penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang buta huruf mencapai 9,45 persen, sedangkan laki-laki hanya 4,27 persen.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan pendidikan di Indonesia masih terjadi ketimpangan kemampuan baca tulis antara laki-laki dan perempuan. Salah satu penyebab ketimpangan tersebut adalah belum meratanya akses pendidikan dasar bagi perempuan terutama bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi yang sangat terbatas atau keluarga miskin yang jumlahnya masih cukup besar.

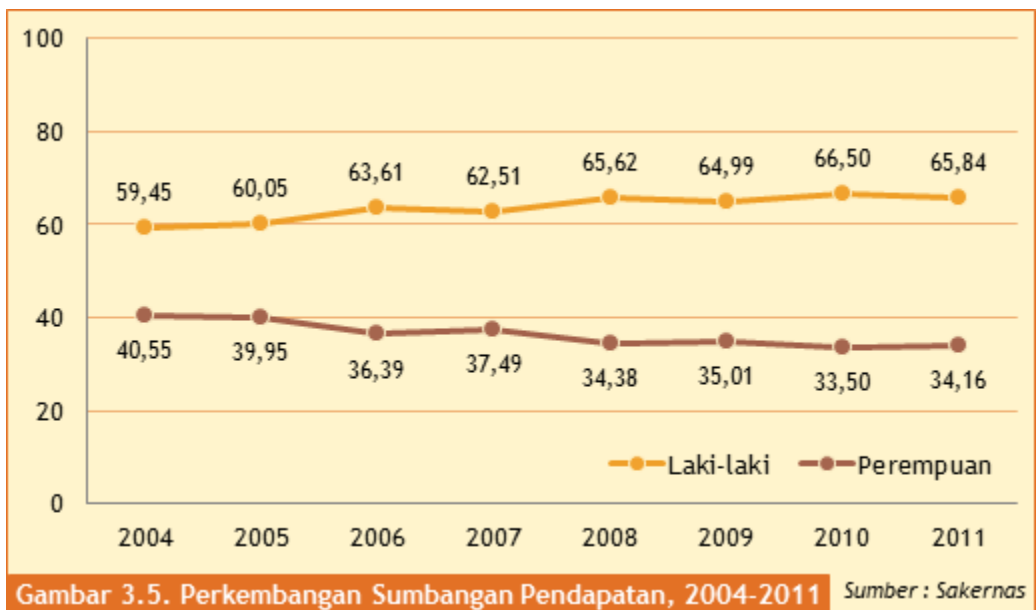
Seperti halnya dengan komposisi angka melek huruf penduduk, untuk angka rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki-pun secara umum lebih tinggi pada kisaran 1 tahun dibandingkan rata-rata lama sekolah penduduk perempuan (Gambar 3.4). Pada tahun 2011 MYS laki-laki mencapai 8,35 tahun, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 8,34. Artinya pada tahun 2010-2011 secara umum pendidikan penduduk laki-laki di Indonesia yang dijalani setara dengan kelas 2 SMP. Sedangkan MYS perempuan meningkat dari 7,50 pada tahun 2010 menjadi 7,54 pada tahun 2011, yang berarti setara dengan kelas 1 SMP. Pola seperti ini berlangsung dari tahun ke tahun selama periode 2004-2011. Perbedaan pencapaian rata-rata lama



sekolah antara laki-laki dan perempuan hampir tidak mengalami perubahan selama kurun waktu tersebut, hanya pada tahun 2008 pernah mengalami penyempitan *gap*.

Sumbangan Pendapatan

Gambar 3.5 menyajikan perkembangan sumbangan pendapatan dalam pekerjaan di sektor non pertanian baik laki-laki maupun perempuan secara nasional. Pada tahun 2011, sumbangan pendapatan perempuan dalam pekerjaan di sektor non pertanian mengalami peningkatan sebesar 0,66 persen dari tahun sebelumnya. Tahun 2011 sumbangan pendapatan perempuan mencapai 34,16 persen naik dari tahun 2010 yang mencapai 33,50 persen. Sumbangan pendapatan ini terkait dengan dua faktor yang memengaruhinya, yaitu faktor angkatan kerja dan upah yang diterima. Berdasarkan data Sakernas, angkatan kerja perempuan di Indonesia masih sekitar 38-39 persen dari seluruh angkatan kerja. Rendahnya proporsi angkatan kerja perempuan tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap sumbangan pendapatannya.



Faktor upah, secara nominal setiap tahun selalu mengalami peningkatan baik yang diterima pekerja laki-laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian upah nominal yang diterima pekerja sebagai dampak dari biaya

kebutuhan hidup yang selalu mengalami kenaikan agar kemampuan daya beli masyarakat tetap terjaga. Pada penghitungan IPG, komponen upah menggunakan data upah buruh di sektor non-pertanian. Tahun 2010, rata-rata upah perempuan non-pertanian di Indonesia mencapai 1.292.300 rupiah per bulan. Nilai upah ini masih lebih rendah dibanding upah yang diterima laki-laki mencapai 1.593.600 rupiah per bulan. Hal ini memberikan gambaran bahwa dalam dunia kerja ternyata masih terdapat perbedaan jumlah upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan. Penduduk perempuan menerima upah jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Perbedaan upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan berpengaruh terhadap IPG².

Banyak faktor yang diduga sebagai penyebab adanya perbedaan upah yang diterima laki-laki dan perempuan. Salah satu faktor yang berpengaruh pada perbedaan tingkat upah adalah tingkat pendidikan. Kecenderungan pendidikan perempuan lebih rendah dibanding pendidikan laki-laki jelas berpengaruh pada perbedaan upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan. Faktor lain juga erat kaitannya dengan faktor lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Berdasarkan data Sakernas sebagian besar pekerja perempuan bekerja di sektor jasa yang umumnya di perdagangan, dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan. Sedangkan jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan sebagai tenaga usaha perdagangan, dan status pekerjaannya sebagai buruh/karyawan dan pekerja tidak dibayar. Kategori pekerjaan seperti ini pada umumnya mempunyai produktivitas yang rendah dan upah yang dibayarkan relatif kecil. Sementara itu, pekerja laki-laki lebih banyak bekerja di sektor padat modal, sebagai tenaga profesional, teknisi dan kepemimpinan dengan upah yang diterima relatif besar. Disini, perbedaan yang mendasar tersebut menyebabkan *gap* upah yang diterima pekerja laki-laki dan perempuan.

² Semakin besar jarak (*gap*) upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan menyebabkan angka IPG makin kecil.

3.3. Disparitas Pembangunan Manusia (IPM) dan Pembangunan Gender (IPG).

Adanya perbedaan pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan (baca: kesenjangan gender) yang terjadi di tingkat nasional, tampaknya juga terjadi di tingkat provinsi. Fenomena ini, dapat ditunjukkan melalui besaran angka IPG yang lebih rendah dibanding angka IPM di semua provinsi. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa persoalan kesenjangan gender masih terjadi di semua provinsi. Berdasarkan besaran rasio IPG terhadap IPM, maka terdapat lima provinsi masuk dalam kategori urutan tertinggi dan terendah (Tabel 3.2). Lima provinsi yang masuk kategori urutan tertinggi berturut-turut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, DI. Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Maluku. Sedangkan provinsi dengan urutan terendah secara berurutan adalah Kepulauan Riau (Kepri), Papua Barat, Kep. Bangka Belitung (Babel), Gorontalo, dan Kalimantan Timur (Kaltim).

**Tabel
3.2**

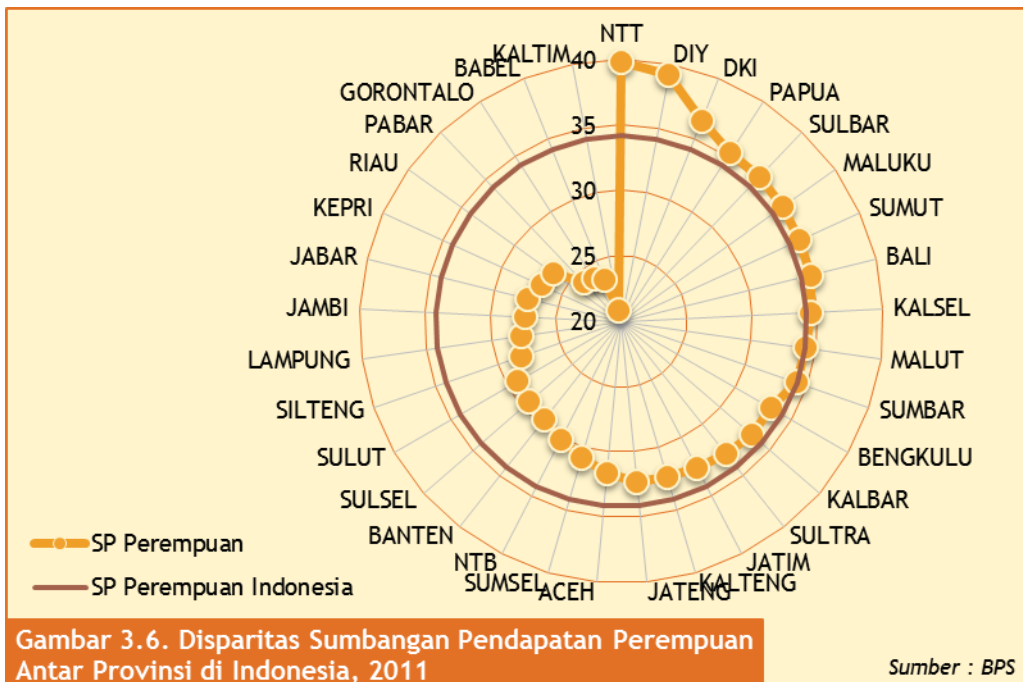
Provinsi Dengan Peringkat Tertinggi dan Terendah Berdasarkan Rasio IPG terhadap IPM, 2011

Kode	Provinsi	IPM 2011	IPG 2011	Rasio	Selisih
<i>Tertinggi</i>					
	N T T	67,75	65,33	96,43	2,42
	Papua	65,36	62,69	95,93	2,66
	D I Yogyakarta	76,32	73,07	95,75	3,25
	DKI Jakarta	77,97	74,01	94,91	3,97
	Maluku	71,87	67,76	94,28	4,11
<i>Terendah</i>					
	Kepulauan Riau	75,78	64,69	85,37	11,09
	Papua Barat	69,65	59,24	85,05	10,41
	Kep. Babel	73,37	60,79	82,86	12,58
	Gorontalo	70,82	57,67	81,43	13,15
	Kalimantan Timur	76,22	61,07	80,12	15,15

Sumber : BPS

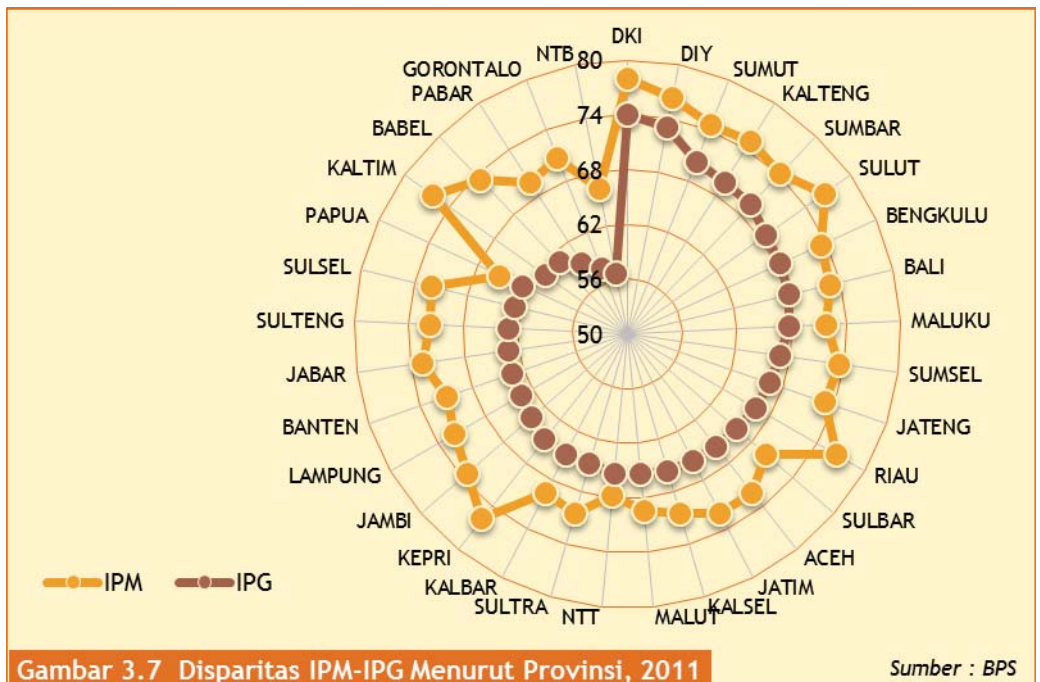
Provinsi NTT merupakan provinsi yang memiliki *gap* IPM dan IPG yang paling kecil dibandingkan provinsi lainnya, dengan besaran rasio tertinggi di sekitar 96,43 persen dengan selisih 2,42 satuan pada tahun 2011. Kecilnya *gap* pencapaian IPM dan IPG di Provinsi NTT memberikan petunjuk bahwa pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan di NTT pada tahun 2011 relatif tidak jauh berbeda. Hal ini berarti walaupun terdapat kesenjangan gender di NTT namun dengan perbedaannya relatif kecil. Jika dikaji lebih jauh, yang membuat angka IPG NTT mendekati angka IPM utamanya disebabkan oleh besaran sumbangan pendapatan penduduk perempuan terhadap total pendapatan. Sumbangan pendapatan ini dihitung dari upah buruh yang bekerja di semua sektor kecuali sektor pertanian³. Sementara itu, pada kasus Provinsi Maluku sedikit berbeda dibandingkan NTT. Provinsi Maluku merupakan provinsi dengan IPM relatif tinggi, yaitu sekitar 71,87 pada 2011. Namun tingginya IPM di Provinsi Maluku ternyata tidak diikuti oleh pencapaian IPG tinggi pula, yaitu hanya sekitar 67,76. Hal ini dapat dimaknai bahwa keberhasilan pembangunan kualitas hidup yang diukur melalui IPM di Provinsi Maluku kemajuannya hanya didorong oleh keberhasilan peningkatan kapabilitas dasar penduduk laki-laki. Selain itu sumbangan pendapatan perempuan yang diduga

³ Lihat pada tatacara penghitungan sumbangan pendapatan.



mampu mengungkit peningkatan IPG di Provinsi Maluku, ternyata hanya menyumbang rata-rata sekitar 35 persen dari seluruh total pendapatan. Besaran 35 persen sumbangan pendapatan penduduk perempuan, ternyata tidak mampu meningkatkan nilai IPG Provinsi Maluku. Sementara, mengharapkan peningkatan IPG dari sektor kesehatan dan pendidikan kemungkinannya sangat kecil.

Sementara itu untuk capaian IPM yang tinggi di Kalimantan Timur tidak diikuti oleh tingginya IPG. Pada tahun 2011, IPM Kaltim sebesar 76,22 berada di urutan ke-5 sementara IPG hanya sebesar 61,07. Jadi, fenomena tingginya IPM pada suatu daerah, tampaknya tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan IPG. Tidak berbeda dengan lima provinsi urutan tertinggi, lima provinsi urutan terendah juga mempunyai persoalan yang sama. Rendahnya IPG pada lima provinsi dengan urutan terendah disebabkan kecilnya sumbangan pendapatan perempuan terhadap total pendapatan. Besaran sumbangan pendapatan perempuan di lima provinsi urutan terendah (Riau, Papua Barat, Babel, Gorontalo, dan Kaltim) berkisar antara 20-27 persen (Gambar 3.6). Meskipun capaian IPG di lima besar provinsi ini relatif rendah, namun pembangunannya cukup berhasil dan termasuk dalam kelompok menengah atas (kecuali Papua Barat).



Berdasarkan skala internasional besaran IPM di level 70-an termasuk kategori status pembangunan menengah atas ($66 \leq \text{IPM} < 80$). Tingginya pencapaian IPM tidak selalu berbanding lurus dengan pencapaian IPG, contohnya Kaltim. Disparitas antara IPM dan IPJ tahun 2011 secara lengkap untuk seluruh provinsi disajikan pada Gambar 3.7.

3.4 Disparitas Pencapaian Pembangunan Gender Antar Wilayah

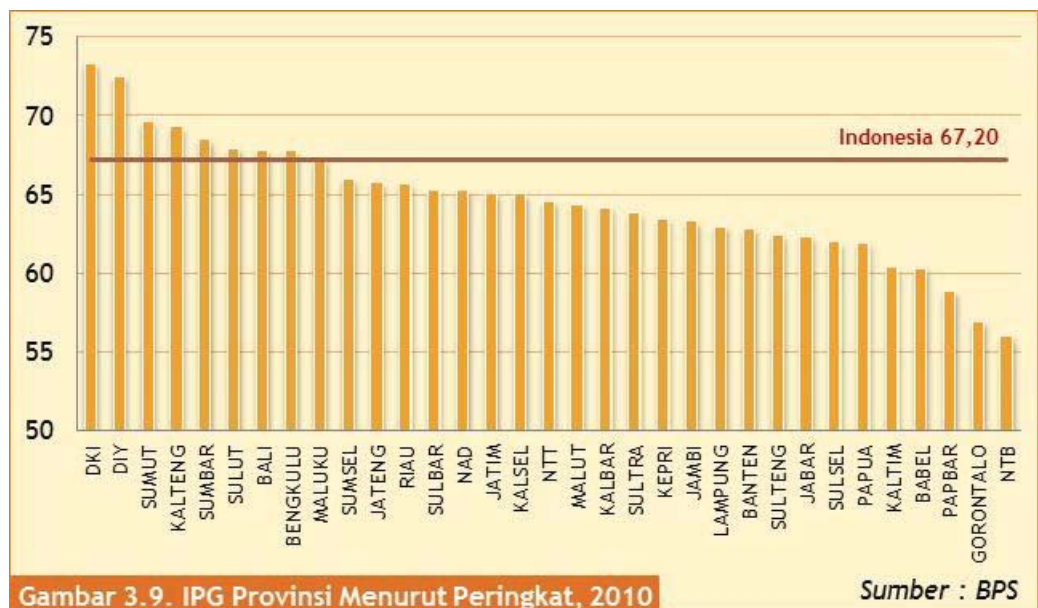
Pembangunan nasional seyogianya merupakan pembangunan merata di seluruh wilayah Indonesia, tetapi salah satu masalah pembangunan di Indonesia adalah kesenjangan pembangunan antar wilayah. Wilayah bagian barat Indonesia cenderung mengalami pembangunan yang lebih pesat dibandingkan wilayah bagian timur Indonesia. Akibatnya, kualitas sumber daya di wilayah timur Indonesia jauh tertinggal dibandingkan sumber daya manusia di wilayah bagian barat Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan ketertinggalan pembangunan di wilayah bagian timur Indonesia, salah satunya terkait dengan kondisi alamnya dan kondisi Infrastruktur di bagian pedalaman yang sangat buruk sehingga tercipta daerah-daerah kantong yang terisolasi (BPS, 2001). Ketertinggalan pembangunan di wilayah timur bagian Indonesia menyebabkan terjadinya kesenjangan antarwilayah yang tercermin dari hasil pencapaian pembangunan gender. Pada subbab ini akan mengulas lebih jauh tentang kesenjangan pembangunan gender antarwilayah di Indonesia.

Capaian IPG Provinsi

Gambaran lebih lengkap mengenai tingkat pencapaian pembangunan gender sebagai dampak dari kegiatan pembangunan di suatu provinsi dapat dilihat dari angka IPG provinsi. Gambar 3.8 menyajikan pencapaian IPG setiap provinsi pada tahun 2011. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa pencapaian IPG delapan provinsi melebihi rata-rata IPG nasional. Delapan provinsi tersebut berturut-turut adalah DKI Jakarta, DI.Yogyakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Bengkulu, dan Bali. Meskipun demikian, jika dilihat dari perkembangannya pencapaian IPG untuk seluruh



provinsi menunjukkan peningkatan. Hal ini berarti bahwa pembangunan gender di semua provinsi telah menunjukkan kemajuan, tetapi masih perlu upaya lebih kuat lagi untuk meningkatkan kapabilitas perempuan mengingat kesenjangan gender masih terjadi di semua provinsi. Secara nasional, pada tahun 2010 IPG Indonesia mencapai 67,20, setahun kemudian IPG Indonesia meningkat sebesar 0,60 poin menjadi 67,80. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Namun demikian, bila dibandingkan



dengan IPM (72,27), maka keberhasilan tersebut masih menyisakan kesenjangan.

Di tingkat provinsi pencapaian IPG relatif bervariasi. Pencapaian IPG tertinggi tahun 2011 diraih oleh DKI Jakarta dengan nilai 74,01, sedangkan IPG terendah sebesar 56,70 diraih oleh NTB. Dengan demikian perbedaan pencapaian IPG tertinggi dengan IPG terendah sekitar 17,31 poin. Jarak yang ditimbulkan oleh perbedaan pencapaian IPG tertinggi dan terendah tersebut menurun dibandingkan tahun 2010. Perbedaan pencapaian IPG tertinggi dan IPG terendah sekitar 17,33 poin (tertinggi DKI Jakarta dengan IPG sebesar 73,35 dan terendah NTB dengan IPG sebesar 56,02). Hal ini berarti bahwa disparitas pembangunan gender di tingkat provinsi pada tahun 2011 sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel
3.3**

Provinsi dengan IPG Tertinggi, 2010-2011

2010	IPG	2011	IPG
DKI Jakarta	73,35	DKI Jakarta	74,01
DI Yogyakarta	72,51	DI Yogyakarta	73,07
Sumatera Utara	69,63	Sumatera Utara	70,34
Kalimantan Tengah	69,32	Kalimantan Tengah	69,80
Sumatera Barat	68,50	Sumatera Barat	69,55

Sumber : BPS

Tabel 3.3 menyajikan 5 (lima) provinsi yang mencatat kemajuan pesat selama tahun 2010-2011. Provinsi yang menempati urutan lima besar selama dua tahun terakhir ditempati oleh DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat. Pada tahun 2011, IPG tertinggi tercatat di DKI Jakarta yang mencapai angka 74,01 meningkat dibanding tahun 2010 yang mencatat angka 73,35. Berikutnya disusul oleh DI Yogyakarta (73,07), Sumatera Utara (70,34), Kalimantan Tengah (69,80), dan Sumatera Barat (69,55).

Sementara itu, provinsi dengan pencapaian IPG terendah pada dua tahun terakhir ini diraih oleh lima provinsi yang sama.

**Tabel
3.4****Provinsi dengan IPG Terendah, 2010-2011**

2010	IPG	2011	IPG
KALIMANTAN TIMUR	60,37	KALIMANTAN TIMUR	61,07
KEP. BANGKA BELITUNG	60,36	KEP. BANGKA BELITUNG	60,79
PAPUA BARAT	58,87	PAPUA BARAT	59,24
GORONTALO	56,98	GORONTALO	57,67
NUSA TENGGARA BARAT	56,02	NUSA TENGGARA BARAT	56,70

Sumber : BPS

Provinsi yang menduduki peringkat IPG lima terendah adalah Kalimantan Timur, Kep. Bangka Belitung, Papua Barat, Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Nusa Tenggara Barat (NTB) menduduki peringkat terendah baik pada tahun 2010 maupun 2011 dengan nilai IPG berturut-turut sebesar 56,02 dan 56,70.

Capaian IPG Kabupaten/Kota

Perkembangan pencapaian IPG kabupaten/kota selama tahun 2010-2011 secara umum mengalami peningkatan. Dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang menduduki posisi sepuluh IPG

**Tabel
3.5****Kabupaten/Kota dengan IPG Tertinggi, 2010-2011**

2010	IPG	2011	IPG
Kota Yogyakarta	77,56	Kota Yogyakarta	77,92
Kota Padang Panjang	76,55	Kota Padang Panjang	77,16
Kota Denpasar	76,06	Kota Denpasar	76,49
Kota Ambon	76,01	Kota Ambon	76,47
Kota Surakarta	75,68	Kota Surakarta	76,37
Toba Samosir	74,78	Toba Samosir	75,21
Karo	74,60	Karo	75,13
Barito Utara	74,55	Barito Utara	74,91
Kota Jakarta Pusat	74,18	Kota Salatiga	74,78
Sleman	74,17	Tapanuli Utara	74,77

Sumber : BPS

tertinggi di tahun 2010 ternyata hanya 8 (delapan) kabupaten/kota yang mampu bertahan di posisi 10 besar pada tahun 2011. Dua kabupaten/kota lainnya yang pada tahun 2010 berada pada posisi 10 besar, yaitu Jakarta Pusat dan Kab. Sleman ternyata harus digantikan posisinya oleh kota Salatiga dan Kabupaten Tapanuli Utara. Baik pada tahun 2010 maupun 2011, sebagian besar kabupaten/kota tersebut berasal dari wilayah bagian barat dan hanya tiga kabupaten/kota yang berasal dari wilayah timur yaitu Kota Denpasar, Kota Ambon, dan Kab. Barito Utara.

Dilain pihak, tidak ada pergeseran urutan kabupaten/kota posisi lima besar. Urutan pertama sampai kelima masih ditempati kabupaten/kota lima besar di tahun 2010, yaitu Kota Yogyakarta (77,92), Kota Padang Panjang (77,16), Kota Denpasar (76,49), Kota Ambon (76,47), dan Kota Surakarta (76,37). Kota dengan IPG tertinggi baik pada tahun 2010 maupun 2011 diduduki oleh kota Yogyakarta dengan nilai IPG sebesar 77,56 pada tahun 2010 dan 77,92 pada tahun 2011.

Sedangkan untuk urutan sepuluh kabupaten/kota dengan IPG terendah terlihat mengalami perubahan posisi yang umumnya disebabkan oleh pembentukan kabupaten baru (pemekaran). Sebagian besar kabupaten/kota tersebut berasal

**Tabel
3.6**

Kabupaten/Kota dengan IPG Terendah, 2010-2011

2010	IPG	2011	IPG
Mamberamo Tengah	48,01	Mamberamo Tengah	48,21
Nduga	47,58	Sumbawa Barat	48,19
Asmat	47,56	Nduga	48,11
Sumbawa Barat	47,37	Asmat	48,10
Lombok Utara	46,86	Lombok Utara	47,84
Boven Digoel	46,69	Boven Digoel	47,54
Intan Jaya	46,29	Dogiyai	46,76
Dogiyai	45,63	Intan Jaya	46,55
Puncak	45,17	Puncak	45,87
Deiyai	42,70	Deiyai	43,37

Sumber : BPS

dari wilayah bagian timur dan memiliki IPG yang rendah. Pada tahun 2010, posisi sepuluh kabupaten/kota dengan IPG terendah didominasi oleh kabupaten/kota dari Provinsi Papua dan sebagian dari Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Sumbawa Barat dan Lombok Utara merupakan dua kabupaten dari Nusa Tenggara Barat yang menduduki posisi sepuluh terendah. Delapan kabupaten/kota lainnya berasal dari Papua, diantaranya Kabupaten Asmat, Boven Digoel dan enam kabupaten baru/pemekaran yaitu Mamberamo Tengah, Nduga, Intan Jaya, Dogiyai, Puncak, dan Deiyai. Hal ini menunjukkan adanya disparitas pembangunan dimana pembangunan di wilayah bagian timur Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan provinsi atau kabupaten/kota di bagian barat Indonesia



4

Pencapaian Pemberdayaan Gender

PENCAPAIAN PEMBERDAYAAN GENDER

4

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang mencerminkan terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Selain IPG, UNDP juga mengenalkan ukuran komposit lainnya terkait dengan gender, yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan di bidang politik maupun di bidang manajerial. Kedua ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang dicapai melalui berbagai program-program pembangunan.

Pencapaian pembangunan manusia secara kuantitatif dapat dilihat dari besaran IPM. Besaran angka IPM semata tidak dapat menjelaskan seberapa besar perbedaan (*gap*) pencapaian kualitas hidup perempuan dan laki-laki yang diukur melalui gabungan indikator kesehatan, pendidikan dan daya beli. Melalui IPG (Indeks Pembangunan Gender), perbedaan pencapaian yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dapat terjelaskan, yakni dengan mengurangi nilai IPM dengan IPG. Sedangkan IDG dapat menggambarkan perbedaan peranan antara perempuan dan laki-laki dari pencapaian kapabilitas berdasarkan status dan kedudukan perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Stereotip perempuan sebagai makhluk yang lemah dan hanya berkutat pada urusan rumah tangga saja lambat laun semakin memudar. Hal ini didukung oleh semakin terbukanya peluang perempuan untuk berpartisipasi di berbagai bidang

pembangunan. Namun keadaan ini terlihat lebih menonjol hanya di daerah perkotaan yang sarat dengan kemajuan di berbagai bidang. Sebenarnya peranan perempuan untuk berpartisipasi di berbagai bidang pembangunan telah diakui dan dihargai. Tidak ada satu katapun dalam pasal-pasal UUD 1945 yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Undang-undang telah mengatur persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga Negara baik laki-laki maupun perempuan untuk menjalankan perannya di berbagai bidang kehidupan.

Pada kenyataannya, perempuan masih mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan laki-laki pada bidang-bidang seperti pendidikan, ketenagakerjaan, maupun pengambilan keputusan. Namun demikian, pemerintah terus berupaya mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan melalui peningkatan kapabilitas dasar SDM. Keseriusan pemerintah dalam mengupayakan peningkatan kapabilitas perempuan untuk tercapainya kesetaraan gender ditandai dengan dibentuknya Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA). Tugas pokok KPP dan PA mengurus tentang berbagai hal yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan sudah mulai tampak hasilnya. Secara kuantitas banyak perempuan telah menduduki jabatan strategis yang memungkinkan perempuan dapat berperan sebagai pengambil keputusan. Namun dari aspek kualitas masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Untuk mengkaji lebih jauh peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, maka dapat digunakan indeks pemberdayaan gender (IDG).

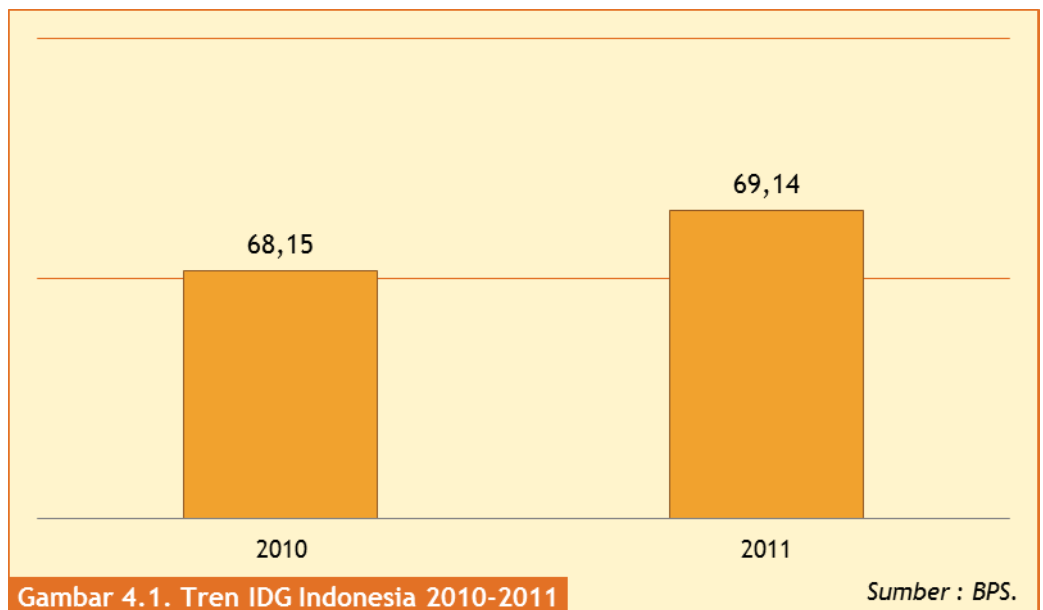
IDG dibentuk berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen pembentuk IDG. Besaran nilai indikator yang terekam dari kegiatan pengumpulan data (survey) merupakan hasil akumulasi dari berbagai kebijakan baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hasilnya

menggambarkan kondisi terkini (riil) perempuan sehubungan dengan peranannya dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan.

Pada bab ini pencapaian pemberdayaan gender akan dibagi ke dalam 3 (tiga) pokok bahasan, yaitu perkembangan pembangunan gender (IDG), pencapaian komponen IDG, dan disparitas IDG. Ketiga pokok bahasan ini diharapkan mampu memberikan gambaran pencapaian peranan perempuan secara umum dalam pengambilan keputusan, komponen/indikator yang berkontribusi terhadap capaian peranan perempuan, dan disparitas peranan perempuan antarwilayah/daerah.

4.1. Perkembangan Pemberdayaan Gender

Kesetaraan dan keadilan gender bisa dimaknai sebagai suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis, tanpa ada salah satu kelompok yang merasa dirugikan atau di-marginalkan. Kesetaraan gender tidak hanya merujuk pada persoalan persamaan status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, tetapi bisa juga bermakna pada persoalan persamaan peranan. Persamaan peranan dalam hal ini seperti partisipasi dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik maupun penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan ekonomi dan



sosial, khususnya kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga. Unsur-unsur persamaan peranan tersebut merupakan komponen yang tercakup dalam penghitungan indeks pemberdayaan gender (IDG). Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, IDG merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi maupun sosial.

Perkembangan IDG sejak tahun 2004 hingga tahun 2011 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2004, IDG Indonesia masih berada pada level 50-an yaitu sebesar 59,70. Namun dalam kurun waktu 7 tahun, IDG Indonesia terus meningkat hingga pada tahun 2011 nilainya hampir mencapai level 70-an, yaitu sebesar 69,14. Hal ini bisa diartikan bahwa peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi semakin menunjukkan arah yang lebih baik. Dengan demikian pemberdayaan dalam konteks ini, perempuan diposisikan memiliki peranan yang strategis. Untuk mengetahui lebih jauh peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, maka perlu mengkaji setiap komponen IDG.

4.2. Pencapaian Komponen IDG

Berdasarkan gambar 4.2, secara umum capaian komponen IDG pada tahun 2011 untuk perempuan masih lebih rendah dari laki-laki. Hal ini terjadi di semua komponen baik dalam partisipasi politik, pengambilan keputusan, maupun dalam perekonomian. Masih relatif rendahnya capaian perempuan jika dibandingkan laki-laki bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan lebih banyak menguntungkan laki-laki; dan yang kedua, pembangunan manusia telah memberikan kesempatan kepada semua penduduk tidak terkecuali, tetapi kesempatan ini tidak digunakan secara optimal oleh kelompok lain (dalam hal ini perempuan), sehingga terkesan bahwa perempuan selalu termarginalkan (BPS, 2006). Untuk melihat sejauh mana perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan, akan dibahas dalam uraian berikut ini.



Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kapabilitas penduduknya masih meninggalkan persoalan yaitu masih terjadinya ketimpangan aksesibilitas antara laki-laki perempuan. Pada uraian sebelumnya telah dipaparkan bahwa pencapaian perempuan dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan relatif masih tertinggal dari pencapaian laki-laki. Ketimpangan ini ternyata terjadi pula dalam bidang politik. Keterwakilan perempuan dalam parlemen masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 17,49 persen. Nilai ini masih dibawah kuota yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa kuota perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik sekitar 30 persen. Apabila kuota perempuan yang telah diatur dalam UU tersebut mampu dicapai secara optimal, tentu akan membawa dampak yang positif dalam pemberdayaan perempuan mengingat kebijakan-kebijakan yang dibuat akan lebih memperhatikan isu-isu gender. Meskipun belum mencapai kuota sesuai UU, tetapi jika dibandingkan dengan hasil pemilu 2004 yang hanya mencapai 65 kursi dari 550 kursi yang ada di DPR atau sekitar 11,82 persen, keterwakilan perempuan di parlemen menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan.

**Tabel
4.1****Perkembangan Jumlah Anggota DPR RI, 1955-2009**

Pemilu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Pesentase
1955	256	16	272	5,88
1971	429	31	460	6,74
1977	423	37	460	8,04
1982	418	42	460	9,13
1987	441	59	500	11,80
1992	438	62	500	12,40
1997	442	58	500	11,60
1999	456	44	500	8,80
2004	485	65	550	11,82
2009	460	100	560	17,86

Sumber : Statistik Indonesia 2011

Jika dilihat perkembangannya baik dari segi jumlah maupun persentase, anggota DPR perempuan sejak tahun 1955 relatif menunjukkan peningkatan. Persentase tertinggi terjadi pada saat pemilu 2009. Meskipun masih cukup jauh dari kuota yang ditetapkan dalam UU, tetapi dari tren yang menunjukkan peningkatan maka pemberdayaan perempuan khususnya dalam bidang politik mengindikasikan arah yang positif.

Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi

Indikator lain yang juga digunakan dalam mengukur indeks komposit IDG yaitu persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, kepemimpinan, dan teknisi. Indikator ini menunjukkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan ekonomi dan sosial. Keterlibatan perempuan di posisi ini memberikan gambaran kemajuan terhadap peranan perempuan, mengingat selama ini perempuan hanya dipandang sebagai makhluk berurusan dengan pekerjaan rumah tangga. Padahal perempuan memiliki potensi yang sama baiknya dengan laki-laki, hanya perempuan kurang memiliki kesempatan karena terbentur oleh persoalan budaya serta kodrat yang melekat terkait dengan



fungsi-fungsi reproduksi (Parawansa, 2003). Hanya sayangnya, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, swasta, dan organisasi sosial lainnya sangat kecil, mengingat masih terbatasnya perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan/managerial, administrasi, serta teknis.

Tak jauh berbeda dengan komponen sebelumnya, komponen ini juga masih menunjukkan bahwa capaian perempuan lebih rendah dari laki-laki. Persentase perempuan sebagai tenaga profesional pada 2011 mengalami peningkatan setelah tahun lalu sempat menurun. Capaian tahun 2011 sebesar 45,75 persen, meningkat sebesar 1,73 persen dari capaian 2010 dan 0,27 persen dari capaian tahun 2009. Jika melihat pada pola grafik 4.3, meskipun cukup berfluktuasi, capaian perempuan saat ini dalam pengambilan keputusan dan perekonomian menunjukkan peningkatan yang signifikan, karena capaian pada tahun 2004 masih sebesar 38,16 persen. Meningkatnya persentase perempuan sebagai tenaga profesional menandakan bahwa keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam perekonomian semakin bisa disejajarkan dengan laki-laki.

Jika dilihat dari struktur penduduk dalam ketenagakerjaan terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)



menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2009 TPAK Indonesia sebesar 67,23 persen, meningkat menjadi 67,72 persen pada tahun 2010, dan menjadi 68,34 persen pada tahun 2011. Peningkatan TPAK menandakan bahwa semakin besarnya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Jika dilihat dari komposisi angkatan kerja, tampak bahwa masih didominasi oleh laki-laki. Persentase angkatan kerja perempuan masih berkisar pada angka 38 persen, sementara laki-laki berkisar pada angka 61 persen. Namun meskipun perlahan, persentase angkatan kerja perempuan meningkat tiap tahunnya.

Semakin meningkatnya persentase angkatan kerja perempuan, seharusnya diiringi dengan peningkatan lapangan pekerjaan yang tidak bias gender sehingga mampu menyerap angkatan kerja tanpa ada diskriminasi gender. Pada formasi pegawai negeri sipil (PNS), tampak bahwa persentase PNS perempuan sejak 2007 hingga 2011 relatif tidak tertinggal jauh dari laki-laki. Persentase terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 43,63 persen, sementara persentase tertinggi terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 47,16 persen. Berdasarkan data pada gambar 4.4 bisa diartikan bahwa penerimaan pegawai negeri sipil relatif tidak terjadi diskriminasi gender melihat hampir setaranya persentase PNS laki-laki dan perempuan.



Persentase PNS laki-laki dan perempuan yang tidak terlalu timpang bisa dikatakan sebagai sebuah langkah yang cukup positif dalam menuju keadilan dan kesetaraan gender. Namun masih terdapat persoalan lain, yaitu jika melihat persentase pejabat struktural PNS yang dipilah menurut jenis kelamin. Berdasarkan gambar 4.6 tampak bahwa laki-laki masih mendominasi jabatan struktural dengan persentase sebesar 75,91 persen. Sementara persentase pejabat struktural perempuan hanya sebesar 24,09 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif kecil. Untuk itu masih diperlukan upaya lebih serius dari berbagai pihak terutama penentu kebijakan dalam rangka mendorong perempuan lebih



maju dalam mencapai kapabilitas yang optimum sehingga dapat berpeluang menduduki jabatan-jabatan strategis.

4.3. Disparitas IDG

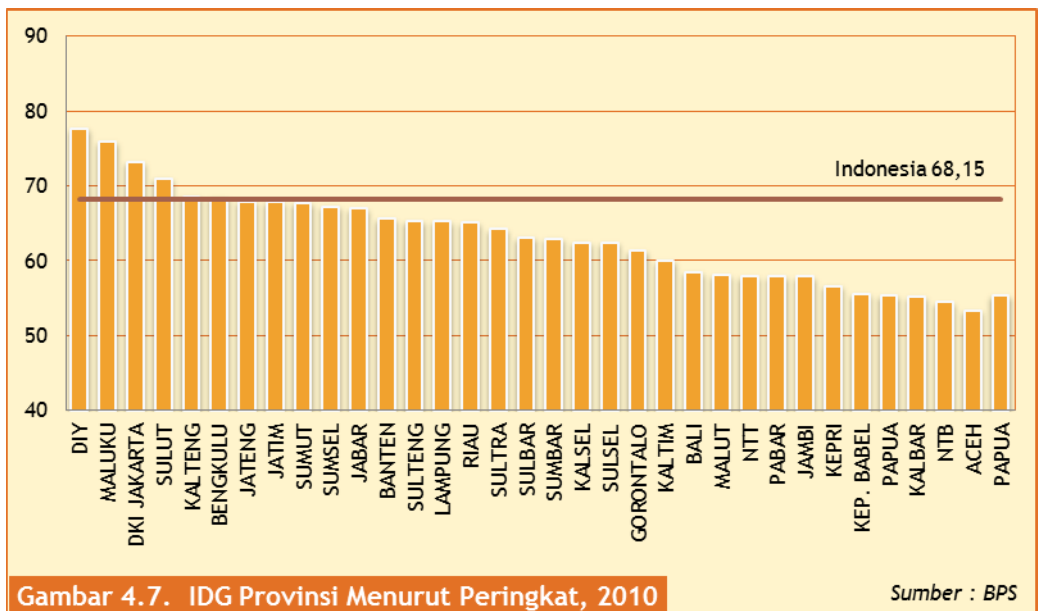
Pembangunan nasional seyogianya merupakan pembangunan merata di seluruh wilayah Indonesia, tetapi salah satu masalah pembangunan di Indonesia adalah kesenjangan pembangunan antar wilayah. Wilayah bagian barat Indonesia cenderung mengalami pembangunan yang lebih pesat dibandingkan wilayah bagian timur Indonesia. Akibatnya, kualitas sumber daya di wilayah timur Indonesia jauh tertinggal dibandingkan sumber daya manusia di wilayah bagian barat Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan ketertinggalan pembangunan di wilayah bagian timur Indonesia, salah satunya terkait dengan kondisi alamnya dan kondisi Infrastruktur di bagian pedalaman yang sangat buruk sehingga tercipta daerah-daerah kantong yang terisolasi (BPS, 2001).

Ketertinggalan pembangunan di wilayah bagian timur Indonesia menyebabkan terjadinya kesenjangan capaian pembangunan di berbagai bidang kehidupan antarwilayah. Kesenjangan pemberdayaan gender antar wilayah masih menjadi fenomena yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pada subbab ini akan mengulas lebih jauh tentang kesenjangan pemberdayaan gender antarwilayah di Indonesia.

Capaian IDG Provinsi

Indeks Pemberdayaan Gender secara nasional pada tahun 2010 sebesar 68,15 dan setahun kemudian meningkat 0,99 poin menjadi 69,14. Peningkatan nilai indeks tersebut mencerminkan adanya peningkatan persamaan peranan perempuan dan laki-laki secara nasional dalam pengambilan keputusan di bidang politik maupun bidang manajerial. Namun demikian, peningkatan nilai IDG nasional tersebut masih menunjukkan kesenjangan yang relatif besar antarwilayah di tingkat provinsi.

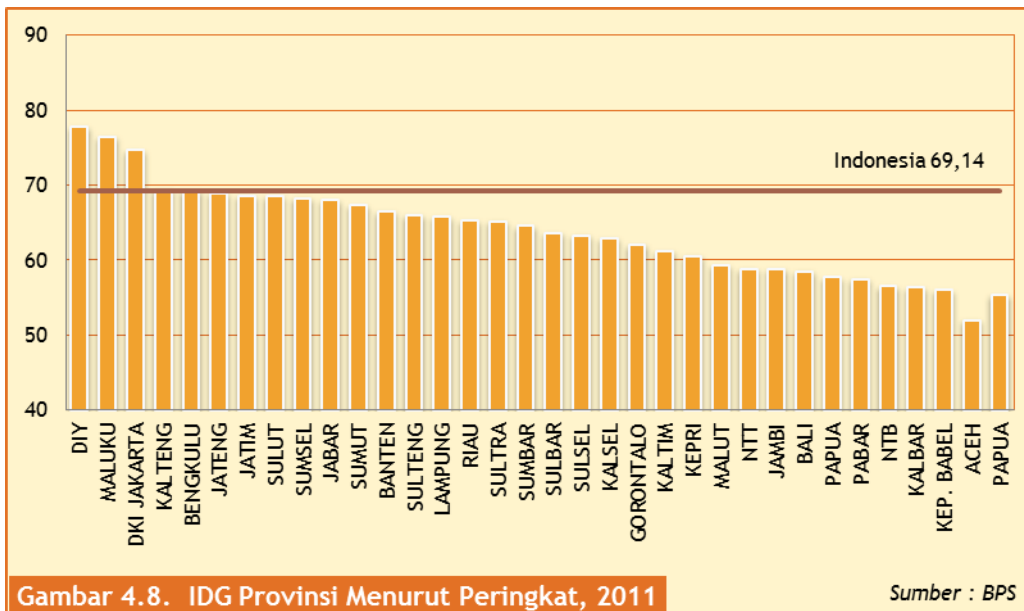
Indeks Pemberdayaan Gender di tingkat provinsi memberikan gambaran lengkap pencapaian persamaan peranan perempuan dan laki-laki sebagai dampak dari kegiatan



pembangunan di suatu provinsi. Perkembangan pencapaian IDG menurut provinsi tahun 2010 dapat dilihat pada Gambar 4.8. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa pencapaian IDG enam provinsi melebihi rata-rata IDG nasional. Keenam provinsi tersebut berturut-turut adalah Bengkulu, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Bali, dan Bengkulu.

Sedangkan pencapaian IDG pada tahun 2011 yang melebihi rata-rata IDG nasional hanya terjadi di lima provinsi, yaitu DI Yogyakarta, Maluku, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Bengkulu (Gambar 4.9). Pada periode 2010-2011, provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan pencapaian nilai IDG (turun 2,44 poin) sehingga nilai IDG tahun 2011 yang dicapai dibawah rata-rata IDG nasional.

Namun demikian, jika dilihat dari perkembangannya pencapaian IDG pada periode 2010-2011 terlihat bahwa ada empat provinsi menunjukkan penurunan, yaitu Sulawesi Utara (turun 2,44), Aceh (turun 1,34), Papua Barat (turun 0,44), dan Sumatera Utara (turun 0,40). Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan gender di beberapa provinsi menunjukkan kemunduran. Kondisi ini perlu perhatian khusus dan upaya lebih kuat lagi untuk meningkatkan peranan perempuan mengingat kesenjangan gender masih terjadi di beberapa provinsi.



Di tingkat provinsi pencapaian IDG tahun 2011 relatif bervariasi. Pencapaian IDG tertinggi diraih oleh DI Yogyakarta dengan nilai 77,84, sedangkan IDG terendah sebesar 52,06 diraih oleh Aceh. Perbedaan pencapaian IDG tertinggi dengan IDG terendah sekitar 25,78 poin. Jarak yang ditimbulkan perbedaan pencapaian IDG tertinggi dan terendah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2010 dimana perbedaan pencapaian IDG tertinggi dan IDG terendah sekitar 17,33 poin. Hal ini berarti bahwa disparitas pembangunan gender di tingkat provinsi semakin meningkat.

Tabel 4.2 memperlihatkan 6 provinsi yang mencatat kemajuan pesat selama tahun 2010-2011. Provinsi yang menempati urutan tiga besar selama dua tahun terakhir ditempati oleh DI Yogyakarta, Maluku, dan DKI Jakarta. IDG tertinggi diperoleh DI Yogyakarta pada tahun 2010 mencapai angka 77,70 dan meningkat menjadi 77,84 di tahun 2011. Berikutnya disusul oleh Maluku (76,51), dan DKI Jakarta (74,70). Untuk posisi keempat dimana pada tahun sebelumnya ditempati oleh Sulawesi Utara maka pada tahun 2011 digantikan oleh Kalimantan Tengah (69,48). Untuk posisi kelima dimana pada tahun sebelumnya ditempati Kalimantan Tengah maka pada tahun 2011 ditempati oleh Bengkulu (69,33). Sedangkan posisi keenam yang sebelumnya ditempati

**Tabel
4.2****Provinsi dengan IDG Tertinggi, 2010-2011**

2010	IDG	2011	IDG
DI Yogyakarta	77,70	DI Yogyakarta	77,84
Maluku	75,94	Maluku	76,51
DKI Jakarta	73,23	DKI Jakarta	74,70
Sulawesi Utara	71,05	Kalimantan Tengah	69,48
Kalimantan Tengah	68,62	Bengkulu	69,33
Bengkulu	68,50	Jawa Tengah	68,99

Sumber : BPS

oleh Bengkulu pada tahun sebelumnya maka pada tahun 2011 digantikan oleh Jawa Tengah (68,99). Sedangkan provinsi Sulawesi Utara yang menempati urutan keempat pada tahun 2010 tergeser menempati urutan kedelapan (68,61). Namun demikian perlu dicatat bahwa berbeda dengan lima provinsi lainnya tercatat hanya Jawa Tengah yang memiliki indeks dibawah IDG nasional pada tahun 2011.

Enam provinsi dengan pencapaian IDG terendah pada dua tahun terakhir ini diraih oleh lima provinsi yang sama dan satu provinsi yang berbeda antar tahun (Tabel 4.3). Kelima provinsi yang sama mengalami pergeseran atau pertukaran tempat antarprovinsi kecuali Aceh dan Kalimantan Barat berturut-turut menempati urutan terendah dan ketiga

**Tabel
4.3****Provinsi dengan IDG Terendah, 2010-2011**

2010	IDG	2011	IDG
Kepulauan Riau	56,70	Papua	57,74
Kep. Bangka Belitung	55,62	Papua Barat	57,54
Papua	55,42	NTB	56,57
Kalimantan Barat	55,26	Kalimantan Barat	56,39
NTB	54,49	Kep. BABEL	56,03
Aceh	53,40	Aceh	52,06

Sumber : BPS

terendah. Provinsi yang menduduki peringkat IDG enam terendah tahun 2011 adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat, Kep. Bangka Belitung, dan Aceh. Kep. Bangka Belitung menduduki peringkat kedua terendah di tahun 2011, tetapi pada tahun 2010 posisi tersebut diduduki oleh NTB dengan angka IDG sebesar 54,49. Hal ini bukan berarti Kep. Bangka Belitung mengalami kemunduran karena angka IDG Kep. Bangka Belitung mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak sepesat peningkatan yang terjadi di NTB. Peringkat kelima terendah pada tahun 2011 ditempati oleh Papua Barat tetapi mengalami kemunduran dibanding tahun sebelumnya dengan angka IDG sebesar 57,97). Secara keseluruhan, sebagian besar angka IDG provinsi mengalami peningkatan tetapi laju kecepatan peningkatan IDG masing-masing provinsi berbeda sehingga terjadi pergeseran peringkat IDG provinsi.

Capaian IDG Kabupaten/Kota

Perkembangan pencapaian IDG sebagian besar kabupaten/kota selama tahun 2010-2011 mengalami peningkatan, kecuali 154 kabupaten/kota (30,99 persen dari

**Tabel
4.4**

Kabupaten/Kota dengan IDG Tertinggi, 2010-2011

2010	IDG	2011	IDG
Gunung Mas	82,53	Gunung Mas	83,08
Kota Madiun	78,69	Kota Salatiga	81,45
Kota Kendari	78,52	Kota Kendari	79,37
Kota Banjarmasin	78,44	Kota Madiun	79,21
Kota Tomohon	78,40	Kota Banjarmasin	78,77
Minahasa Utara	77,63	Kota Malang	78,75
Kota Surabaya	77,53	Kep. Siau Tagulandang Biaro	78,75
Kota Depok	77,29	Barito Utara	78,56
Minahasa	76,66	Kota Tomohon	78,40
Barito Utara	76,63	Minahasa	78,27

Sumber : BPS

**Tabel
4.5**

Kabupaten/Kota dengan IDG Terendah, 2010-2011

2010	IDG	2011	IDG
Pulau Morotai	38,91	Luwu Utara	39,29
Sumbawa Barat	38,85	Melawai	39,13
Labuhan Batu Utara	38,61	Lingga	38,59
Sorong	38,27	Dogiyai	38,53
Lingga	37,88	Yahukimo	38,27
Tambrau	37,02	Teluk Bintuni	38,09
Halmahera Selatan	35,36	Tambrau	31,61
Paniai	32,58	Asmat	31,44
Teluk Bintuni	30,83	Labuhan Batu Utara	23,59
Deiyai	19,61	Deiyai	20,24

Sumber : BPS

497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa tercatat 65 kabupaten/kota yang memiliki indeks diatas IDG nasional, dan setahun kemudian berkurang menjadi 61 kabupaten/kota. Sebagian besar kabupaten/kota tersebut berasal dari wilayah bagian barat dan memiliki IDG yang cukup tinggi.

Dari sepuluh Kabupaten/kota yang memiliki IDG tertinggi di tahun 2010 hanya tujuh yang mampu mempertahankan posisinya di tahun 2011 meskipun terjadi beberapa pergeseran urutan. Pada posisi pertama dan ketiga tidak ada pergeseran urutan kabupaten/kota dengan kata lain masih ditempati kabupaten/kota tahun 2010, yaitu Gunung Mas (83,08) dan Kota Kendari (79,37). IDG tertinggi kabupaten/kota tahun 2011 mencapai 83,08, angka ini naik sebesar 0,55 poin dari tahun 2010.

Sedangkan untuk urutan sepuluh kabupaten/kota dengan IDG terendah terlihat mengalami perubahan posisi yang umumnya disebabkan oleh pembentukan kabupaten baru (pemekaran). Sebagian besar kabupaten/kota tersebut berasal dari wilayah bagian timur dan memiliki IDG yang rendah. Pada tahun 2011, posisi sepuluh kabupaten/kota

dengan IDG terendah didominasi oleh kabupaten/kota dari Provinsi Papua dan Papua Barat, sisanya masing-masing satu kabupaten dari provinsi Sumatera Utara (Labuhan Batu Utara), Kepulauan Riau (Lingga), Kalimantan Barat (Melawai), dan Sulawesi Selatan (Luwu Utara). Enam kabupaten/kota lainnya adalah Teluk Bintuni, Tambrau, Asmat, Yalohimo, dan dua kabupaten baru/pemekaran yaitu Dogiyai dan Deiyai. Hal ini menunjukkan adanya disparitas pembangunan dimana pembangunan di wilayah bagian timur Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan provinsi atau kabupaten/kota di bagian barat Indonesia.



5

**Keterkaitan Antara IPM,
IPG, dan IDG**

KETERKAITAN ANTARA IPM, IPG, DAN IDG

5

5.1. Hubungan Antara IPM Dengan IPG

Keterkaitan Antara IPM 2011 dengan IPG 2011

Pembangunan merupakan suatu proses yang kompleks dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara menyeluruh, baik secara ekonomi, sosial, budaya atau aspek lain. Untuk mengukur kinerja pembangunan diperlukan suatu indikator pembangunan.

Oleh karena kompleksitas dari suatu kegiatan pembangunan, sampai saat ini belum ada satu indikator yang disepakati semua pihak sebagai ukuran tunggal tentang capaian pembangunan secara keseluruhan. Itulah sebabnya, untuk melakukan analisis dan perbandingan capaian pembangunan (baik antar waktu maupun antar wilayah) pada umumnya digunakan indikator-indikator pembangunan yang secara khusus memiliki fokus terhadap aspek tertentu.

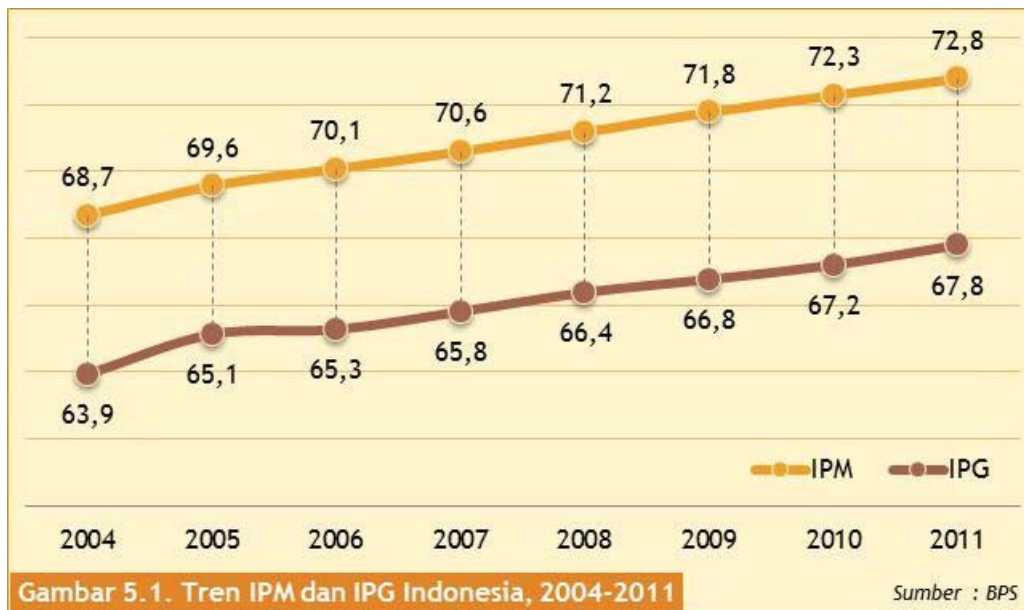
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan dua jenis indikator yang sering digunakan dalam analisis capaian pembangunan negara dan wilayah. IPM secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia yang terdiri dari tiga komponen: pembangunan ekonomi (diukur dengan pendapatan per kapita dan didekati dengan pengeluaran per kapita), pembangunan kesehatan (diukur dengan angka harapan hidup) dan pembangunan pendidikan (diukur dengan angka melek huruf). IPM yang lebih tinggi menunjukkan capaian pembangunan yang lebih baik pula.

Walaupun dengan menggunakan IPM akan dapat dilakukan analisis terhadap capaian pembangunan di suatu wilayah, akan tetapi indikator ini tidak mampu mencerminkan disparitas gender yang justru sedang menjadi perhatian global. Untuk memenuhi kebutuhan terakhir maka disusun Indeks

Pembangunan Gender (IPG), yang pada dasarnya hampir sama dengan IPM tetapi dilakukan pemilahan jenis kelamin untuk masing-masing komponennya.

Jadi, dengan menggunakan IPG akan dapat diukur capaian pembangunan manusia yang telah memasukkan aspek disparitas gender. Penting untuk dicatat bahwa IPG sebenarnya merupakan IPM setelah dikoreksi dengan tingkat disparitas gendernya. Artinya, nilai maksimal dari IPG di suatu wilayah tidak akan pernah melampaui nilai IPM-nya. Nilai IPG yang semakin jauh dari nilai IPM-nya memperlihatkan bahwa disparitas gender yang terjadi di wilayah pengamatan juga akan semakin tinggi pula.

Secara nasional, disparitas gender masih terjadi di dalam proses pembangunan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh Gambar 5.1 yang memperlihatkan bahwa sepanjang periode 2004 - 20011, nilai IPG Indonesia masih selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai IPM-nya. Pada tahun 2011, misalnya, IPM Indonesia telah mencapai 72,77 akan tetapi IPG-nya ternyata baru sebesar 67,80.



Selisih antara IPM dan IPG sebenarnya menunjukkan tingkat koreksi terhadap IPM yang diakibatkan oleh adanya disparitas gender. Dalam kondisi ideal, yaitu ketika disparitas gender relatif rendah, maka nilai selisih antara kedua indeks ini

akan mendekati nol. Berdasarkan data selisih antara IPM dan IPG yang disajikan pada Gambar 5.2 dapat dilihat bahwa disparitas dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia pada periode 2004 – 2011 berfluktuasi dengan kecenderungan terus meningkat secara perlahan. Walaupun demikian perkembangan tahun terakhir telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan, nilai selisih antara IPM dan IPG pada tahun 2011 adalah sebesar 4,97, menurun dibandingkan nilai selisih tahun sebelumnya yang mencapai 5,07.

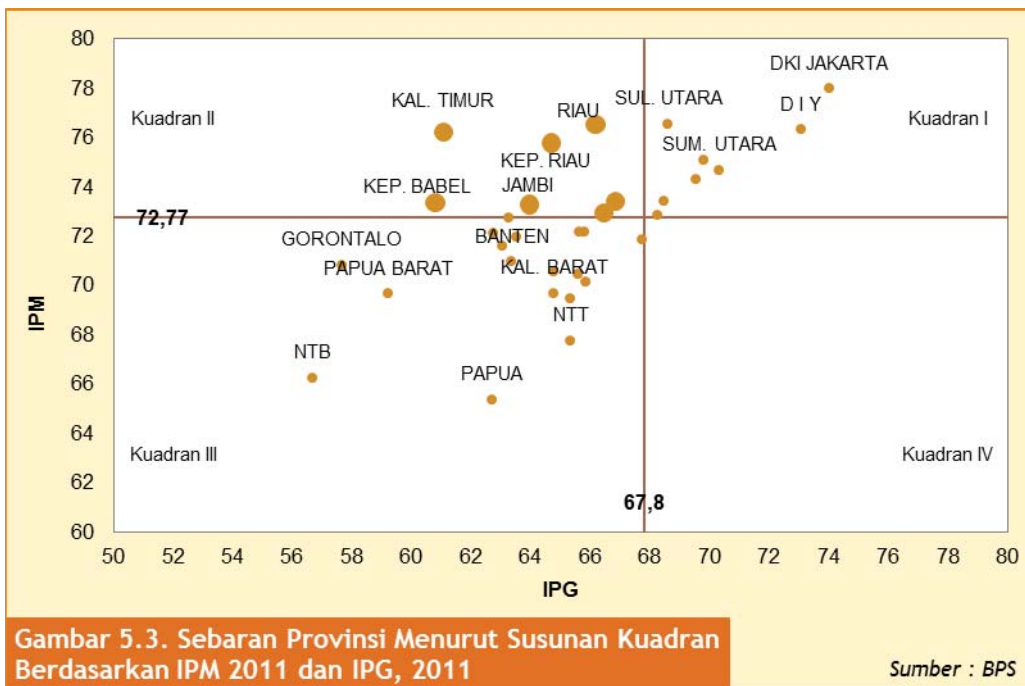


Dengan menggunakan nilai IPM dan IPG nasional tahun 2011 sebagai tolok ukur⁴, provinsi-provinsi di Indonesia hanya tersebar ke dalam tiga kelompok atau kuadran seperti yang disajikan pada Gambar 5.3.

KUADRAN I : IPM dan IPG di atas rata-rata nasional.

Terdapat 8 (sekitar 24 persen dari seluruh jumlah provinsi) yang termaduk di dalam kuadran ini, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara. Capaian delapan provinsi ini secara umum lebih baik dibandingkan dengan provinsi lainnya, baik dari sisi pembangunan manusia maupun dari sisi pembangunan gender.

⁴ Sebagai pembandingan untuk mengklasifikasikan apakah nilai indeks dari suatu provinsi berada di atas atau di bawah nilai indeks nasional.



Gambar 5.3. Sebaran Provinsi Menurut Susunan Kuadran Berdasarkan IPM 2011 dan IPG, 2011

Sumber : BPS

KUADRAN II : IPM di atas rata-rata nasional tetapi IPG di bawah rata-rata nasional.

Terdapat 7 (sekitar 21 persen) provinsi yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur. Walaupun capaian pembangunan manusia di provinsi-provinsi tersebut secara umum sudah relatif lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain, akan tetapi kondisi kesetaraan gender dalam pembangunan di masing-masing provinsi tersebut masih relatif rendah.

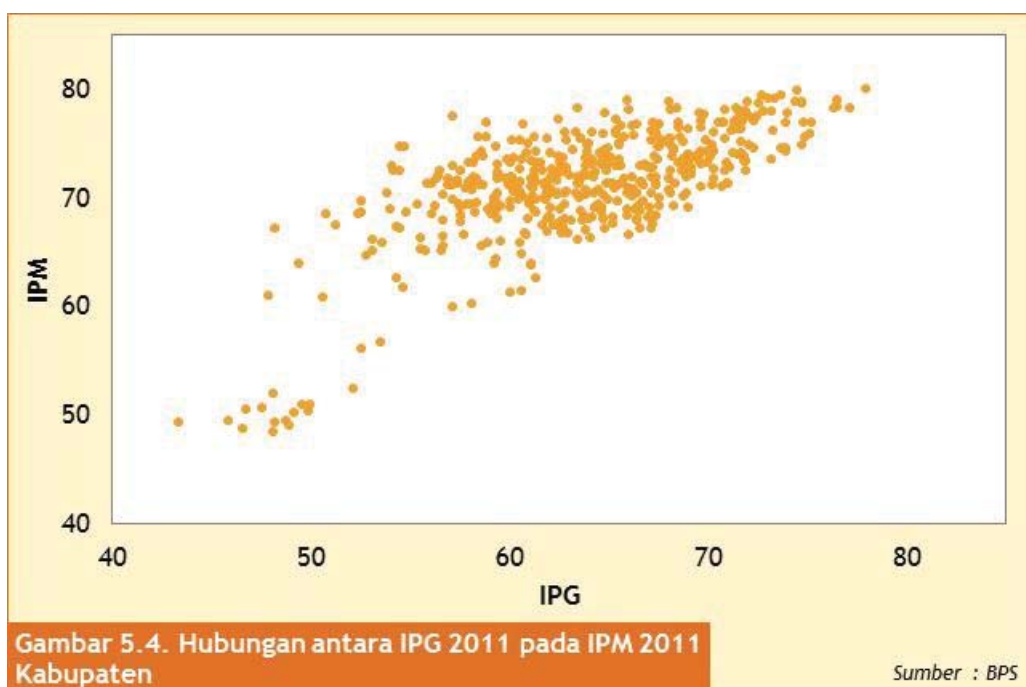
KUADRAN III : IPM dan IPG di bawah rata-rata nasional.

Provinsi-provinsi yang capaian pembangunan manusia dan kesetaraan gendernya belum terlalu baik mencapai 18 (sekitar 55 persen), yaitu Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Dibandingkan dengan provinsi lainnya, diperlukan usaha yang lebih keras bagi semua provinsi di kelompok ini untuk mengejar ketertinggalannya dengan provinsi lain.

Dari Gambar 5.3 dapat dilihat bahwa tidak ada satu pun provinsi yang masuk dalam Kuadran IV (IPM rendah dan IPG tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011 provinsi-provinsi yang memiliki IPG lebih rendah dibandingkan dengan IPG nasional, bukan semata-mata disebabkan oleh buruknya kondisi disparitas gender di provinsi yang bersangkutan, melainkan oleh karena pencapaian pembangunan manusia di provinsi yang bersangkutan memang masih relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Pengelompokan provinsi sesuai dengan nilai IPM dan IPG seperti yang telah diuraikan memperlihatkan bahwa secara umum asosiasi antar IPM dan IPG adalah searah. Maksudnya, provinsi yang memiliki nilai IPM tinggi akan cenderung memiliki nilai IPG yang tinggi pula, begitu juga sebaliknya. Hal yang sama ternyata berlaku juga untuk hubungan antara IPM dan IPG pada tingkat kabupaten/kota seperti yang disajikan pada Gambar 5.4.



Kesetaraan Gender Antar Propinsi 2010-2011

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, selisih antara IPM dan IPG di suatu wilayah tertentu pada dasarnya memperlihatkan tingkat disparitas atau kesetaraan gender dalam capaian pembangunan manusia di wilayah tersebut. Maksudnya, jika selisih antara IPM dan IPG untuk suatu wilayah semakin besar maka kesetaraan gender dalam pembangunan manusia di wilayah tersebut semakin buruk, sebaliknya jika selisihnya semakin kecil maka kesetaraan gendernya akan semakin baik.

Perbandingan kesetaraan gender dalam pembangunan manusia antar provinsi untuk tahun 2010 dan 2011 adalah seperti yang disajikan pada Tabel 5.1. Hal menarik yang patut dicatat adalah bahwa kesetaraan gender di suatu provinsi tidak hanya ditentukan oleh tinggi rendahnya IPM yang dicapai, melainkan dipengaruhi sekaligus oleh nilai IPM dan IPG dari provinsi tersebut. Provinsi-provinsi yang memiliki IPM dan IPG tinggi (berada pada Kuadran I dalam pembahasan sebelumnya) atau IPM dan IPG rendah (Kuadran III) akan cenderung memiliki kesetaraan gender yang baik. Sementara provinsi-provinsi dengan IPM tinggi dan IPG rendah atau dengan IPM rendah dan IPG tinggi disparitas gendernya akan cenderung tinggi.

Dari Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa Provinsi NTT, Papua dan Maluku tergolong sebagai provinsi yang dalam melakukan pembangunan manusia memiliki kesetaraan gender yang baik, karena selisih IPM dan IPG untuk ketiga provinsi ini relatif sangat rendah dibandingkan dengan provinsi lain. Di sisi lain, IPM untuk ketiga provinsi ini justru relatif rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Artinya, walaupun kesetaraan gender dalam pembangunan manusia di ketiga provinsi tersebut termasuk yang terbaik dibandingkan dengan provinsi lain, akan tetapi capaian pembangunan manusia secara umum justru termasuk yang rendah.

Sebaliknya, capaian IPM yang tinggi ternyata juga tidak selalu sejalan dengan tingginya tingkat kesetaraan gender. Kalimantan Timur, misalnya, walaupun nilai IPM-nya tergolong tinggi (urutan ke-5 tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain) ternyata memiliki tingkat kesetaraan gender yang paling buruk.

Gambaran tentang kesetaraan gender seperti yang telah diuraikan menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan manusia di berbagai provinsi di Indonesia masih belum selalu sejalan

**Tabel
5.1**

Selisih IPM dan IPG menurut Provinsi Tahun 2010-2011

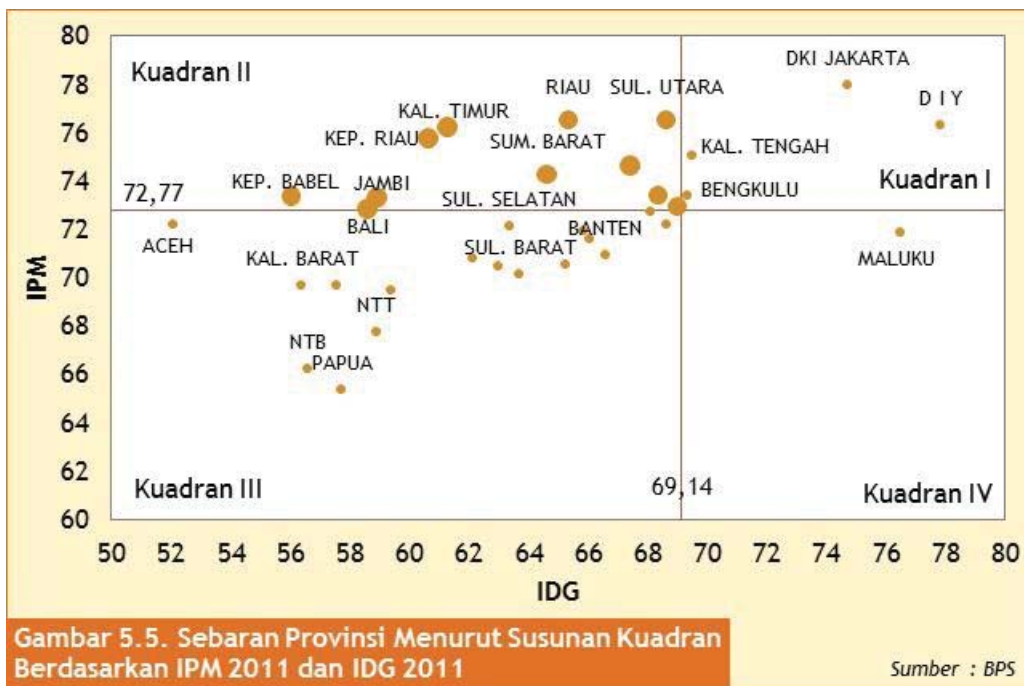
Provinsi	2010	2011	Perubahan
SUMATERA BARAT	5,28	4,73	-0,56
KEP. RIAU	11,59	11,09	-0,50
MALUKU UTARA	4,62	4,13	-0,49
JAWA BARAT	9,90	9,48	-0,43
SUMATERA SELATAN	6,95	6,58	-0,38
SULAWESI TENGGARA	6,12	5,76	-0,36
PAPUA	2,95	2,66	-0,29
DKI JAKARTA	4,25	3,97	-0,28
SUMATERA UTARA	4,56	4,31	-0,25
SULAWESI SELATAN	9,62	9,39	-0,23
NTT	2,64	2,42	-0,23
JAWA TENGAH	6,69	6,49	-0,20
SULAWESI UTARA	8,12	7,93	-0,19
BENGKULU	5,13	4,95	-0,18
GORONTALO	13,30	13,15	-0,15
SULAWESI TENGAH	8,72	8,59	-0,13
MALUKU	4,19	4,11	-0,08
SULAWESI BARAT	4,33	4,25	-0,08
JAMBI	9,42	9,35	-0,08
KALIMANTAN BARAT	4,94	4,88	-0,07
KALIMANTAN TENGAH	5,32	5,27	-0,05
KALIMANTAN TIMUR	15,20	15,15	-0,04
ACEH	6,40	6,37	-0,03
D I YOGYAKARTA	3,26	3,25	-0,01
BANTEN	7,60	7,59	-0,01
RIAU	10,36	10,36	0,00
KALIMANTAN SELATAN	4,85	4,85	0,00
LAMPUNG	8,42	8,43	0,01
JAWA TIMUR	6,51	6,56	0,06
KEP. BANGKA BELITUNG	12,50	12,58	0,08
BALI	4,47	4,60	0,13
PAPUA BARAT	10,28	10,41	0,13
NTB	9,17	9,53	0,36

Sumber: BPS, 2011

dengan peningkatan kesetaraan gender. Namun demikian, upaya perbaikan kesetaraan gender pada umumnya telah memberikan hasil yang positif di sebagian besar provinsi. Terdapat 25 provinsi yang mengalami penurunan selisih antara IPM dan IPG-nya (lihat Tabel 5.1), yang menunjukkan bahwa kesetaraan gender di semua provinsi ini mengalami peningkatan. Sementara hanya 8 provinsi (Riau, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Papua Barat dan NTB) yang nilai selisihnya justru meningkat atau tetap.

5.2. Hubungan IPM dan IDG

Selain IPM dan IPG, indeks lain yang sering digunakan untuk melihat capaian pembangunan dalam konteks gender adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan IPG yang pada dasarnya hanya merupakan IPM setelah dikoreksi dengan kesetaraan gender untuk setiap komponennya, IDG merupakan angka indeks komposit yang secara khusus dimaksudkan untuk mengukur pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Terdapat tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara



ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknis).

Secara umum, tingkat pencapaian pembangunan manusia di Indonesia ternyata memiliki keterkaitan secara positif dengan tingkat pencapaian pemberdayaan gender (lihat Gambar 5.5). Provinsi dengan IPM yang lebih tinggi pada umumnya akan diikuti dengan IDG yang lebih tinggi pula.

Dengan menggunakan IDG nasional sebesar 69,14 dan IPM nasional sebesar 72,77 sebagai tolok ukur, maka keseluruhan provinsi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut:

Kuadran I : IPM tinggi dan IDG tinggi.

Provinsi yang termasuk dalam kategori ini adalah Bengkulu, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Tengah. Tingginya capaian pembangunan manusia di masing-masing provinsi ini ternyata berjalan seiring dengan tingginya pemberdayaan gendernya. Artinya, peluang bagi perempuan untuk mengambil peran di bidang politik, ekonomi dan sosial dalam kegiatan pembangunan juga relatif tinggi.

Kuadran II : IPM tinggi dan IDG rendah.

Kelompok ini terdiri dari provinsi-provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Di masing-masing provinsi, IPM yang tinggi ternyata belum disertai dengan pemberdayaan gender yang tinggi. Artinya, peran perempuan dalam kegiatan politik, ekonomi dan sosial di masing-masing provinsi yang termasuk ke dalam kelompok ini masih relatif rendah dibandingkan dengan peranan perempuan di tingkat nasional.

Kuadran III : IPM rendah dan IDG rendah.

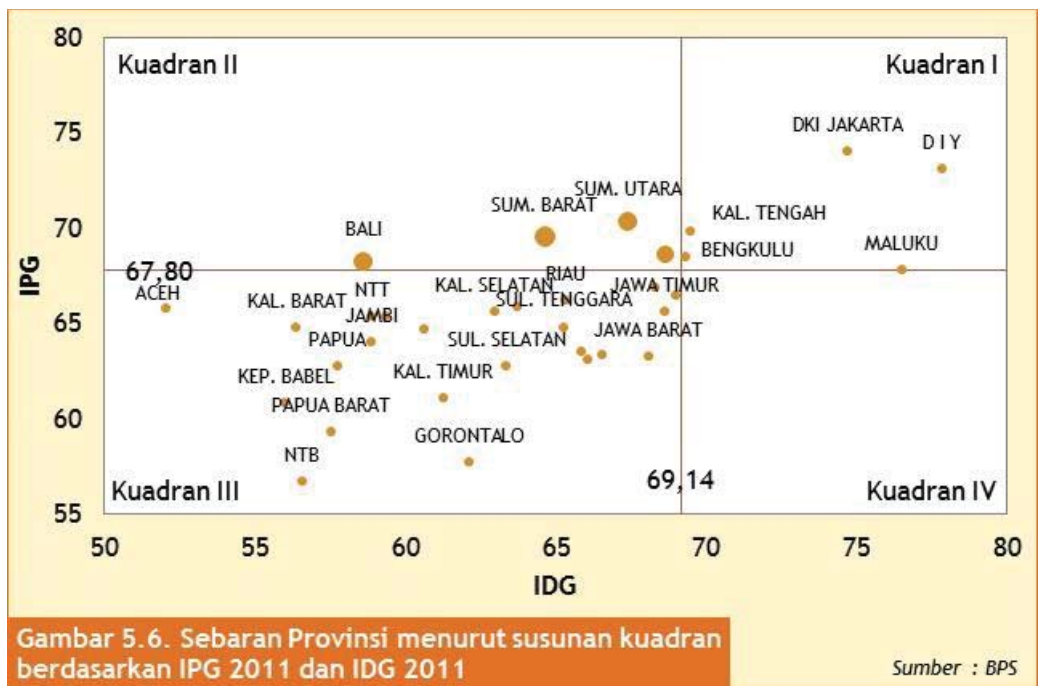
Kelompok ini terdiri dari Provinsi Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Capaian pembangunan manusia di masing-masing provinsi pada kelompok ini tergolong rendah dibandingkan dengan capaian pada tingkat nasional, begitu juga dengan peranan perempuan dalam pembangunan juga tergolong rendah. Dengan demikian permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh masing-masing provinsi menjadi lebih berat dibandingkan dengan provinsi dari kelompok lain. Selain harus meningkatkan pembangunan manusia secara umum, masing-masing provinsi tersebut dituntut pula untuk bekerja keras dalam meningkatkan peranan perempuan dalam kegiatan politik, ekonomi dan sosial.

Kuadran IV : IPM rendah dan IDG tinggi.

Hanya Provinsi Maluku yang termasuk dalam kelompok ini. Walaupun capaian pembangunan manusia di Maluku relatif rendah dibandingkan dengan capaian secara nasional, tetapi peranan perempuan dalam kegiatan pembangunan di provinsi ini ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional.

5.3. Hubungan IPG dan IDG

Capaian pembangunan gender ternyata memiliki hubungan positif dengan capaian pemberdayaan gender pada tahun 2011 (lihat Gambar 5.6). Provinsi dengan IPG tinggi (relatif terhadap IPG nasional) ternyata cenderung memiliki IDG yang tinggi pula (relatif terhadap IDG nasional).



Pengelompokan berdasarkan capaian IPG dan IDG masing-masing provinsi dibandingkan capaian untuk tingkat nasional adalah sebagai berikut:

Kuadran I : IPG tinggi dan IDG tinggi.

Kelompok ini terdiri dari Provinsi Bengkulu, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Tengah. Hanya di 4 provinsi inilah pembangunan gender dan pemberdayaan gender memiliki capaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam pembangunan manusia yang tinggi di masing-masing provinsi telah disertai dengan tingginya peranan perempuan dalam pengambilan keputusan politik, kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial.

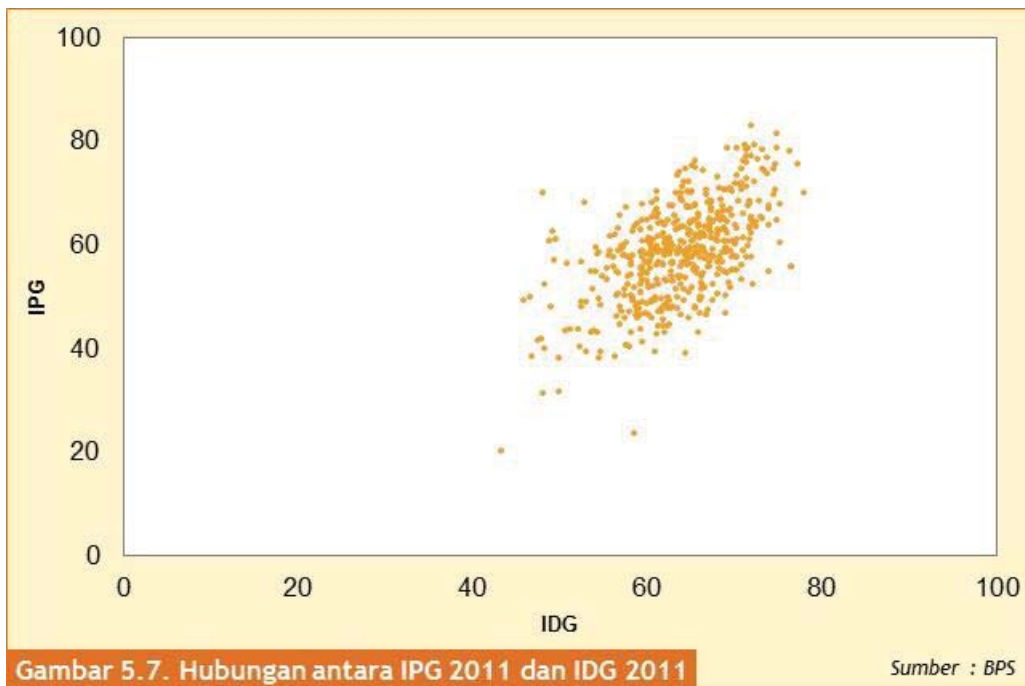
Kuadran II : IPG tinggi dan IDG rendah.

Provinsi yang masuk kelompok ini adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bali, dan Sulawesi Utara. Walaupun capaian pembangunan gender di tiap provinsi dalam kelompok ini telah melampaui capaian secara nasional, tapi

keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik, kegiatan ekonomi dan sosial masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian tingkat nasional.

Kuadran III : IPG rendah dan IDG rendah.

Terdapat 24 provinsi yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu Provinsi Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Kep. Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Besarnya proporsi yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu sekitar 73 persen, menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia masih perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan manusia dengan mengupayakan peningkatan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik, dan dalam kegiatan ekonomi dan sosial.



Kuadran IV : IPG rendah dan IDG tinggi.

Provinsi Maluku merupakan satu-satunya anggota kelompok ini. Walaupun pembangunan gender di Maluku relatif rendah, ternyata peranan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan di Maluku sudah relatif tinggi.

Hubungan positif antara IPG dan IDG ternyata berlaku juga di tingkat kabupaten/kota (lihat Gambar 5.7).

5.4. Perbandingan Antara IPM, IPG, dan IDG

Perbandingan antara IPM-IPG, IPM-IDG dan IPG-IDG telah memberikan gambaran tentang bagaimana antar indeks pembangunan memiliki keterkaitan satu sama lain. Dengan melakukan perbandingan untuk suatu wilayah, misalnya, dapat diperoleh informasi apakah pembangunan manusia yang telah dicapai di wilayah tersebut sudah atau belum sejalan dengan tingkat kesetaraan gender dan tingkat pemberdayaan gendernya.

Akan tetapi kombinasi perbandingan antar indeks tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan gambaran yang lebih baik tentang capaian pembangunan manusia secara umum (yang diukur dengan IPM) yang dikaitkan sekaligus dengan aspek kesetaraan gender (direpresentasikan dengan IPG) dan aspek pemberdayaan gender (direpresentasikan dengan IDG). Oleh karena itu pada bagian ini akan dilakukan perbandingan ketiga indeks tersebut sekaligus.

Dengan menggunakan angka indeks nasional sebagai tolok ukur, maka setiap provinsi akan dapat dimasukkan ke salah satu dari 8 kelompok berikut:

- a. **Kelompok 1:** IPM, IPG dan IDG semuanya tinggi⁵;
- b. **Kelompok 2:** IPM dan IPG tinggi, tetapi IDG rendah;
- c. **Kelompok 3:** IPM dan IDG tinggi, tetapi IPG rendah;
- d. **Kelompok 4:** IPM tinggi, tetapi IPG dan IDG rendah;
- e. **Kelompok 5:** IPM rendah, tetapi IPG dan IDG tinggi;
- f. **Kelompok 6:** IPM dan IDG rendah, tetapi IPG tinggi;
- g. **Kelompok 7:** IPM dan IPG rendah, tetapi IDG tinggi;
- h. **Kelompok 8:** IPM, IPG dan IDG semuanya rendah.

⁵ Jika indeks provinsi > indeks nasional maka indeks provinsi dikategorikan sebagai 'tinggi' dan sebaliknya dikategorikan sebagai 'rendah'.

Berdasarkan nilai IPM, IPG dan IDG untuk masing-masing provinsi maka pengelompokan untuk tahun 2010 dan 2011 masing-masing seperti yang disajikan pada Tabel 5.2 dan Tabel 5.3. Pada tahun 2011, ternyata seluruh provinsi di Indonesia hanya mengelompok ke dalam lima kategori sebagai berikut:

- Kelompok 1** (nilai IPM, IPG dan IDG semua tinggi) yang terdiri dari Provinsi Bengkulu, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Tengah.
- Kelompok 2** (nilai IPM dan IPG tinggi , tetapi nilai IDG rendah) terdiri dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bali, dan Sulawesi Utara.
- Kelompok 4** (nilai IPM tinggi , tetapi nilai IPG dan IDG rendah) terdiri dari Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Kep.Riau, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur.
- Kelompok 7** (nilai IPM dan IDG tinggi , tetapi nilai IPG rendah) yang hanya terdiri satu provinsi, Maluku.
- Kelompok 8** (nilai IPM, IPG dan IDG semuanya rendah) terdiri dari Provinsi Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Pengelompokan provinsi-provinsi tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan kondisi pada Tahun 2010 (Tabel 5.2). Hanya terdapat tiga provinsi yang mengalami perubahan kelompok dalam dua tahun terakhir. Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2010 berada pada Kelompok 1 (nilai semua indeksnya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai nasional), bergeser menjadi Kelompok 2 (IPM dan IPG tinggi tetapi IDG rendah) pada tahun 2011. Provinsi Jawa Barat juga bergeser dari Kelompok 4 (IPM tinggi, tetapi IPG dan IDG rendah) pada tahun 2010 menjadi Kelompok 8 (semua indeksnya lebih rendah dibandingkan dengan nilai indeks nasional) pada tahun 2011. Begitu juga Provinsi Maluku mengalami pergeseran dari Kelompok 5 (IPM rendah, tetapi IPG dan IDG tinggi) pada tahun 2010 menjadi Kelompok 7 (IPM dan IPG rendah , tetapi IDG tinggi) pada tahun 2011.

**Tabel
5.2**

Pengelompokan Provinsi Berdasarkan IPM, IPG dan, IDG, 2010

Indikator				IDG	
				Tinggi	Rendah
IPM	Tinggi	IPG	Tinggi	Bengkulu DKI Jakarta DI Yogyakarta Kalimantan Tengah Sulawesi Utara	Sumatera Utara Sumatera Barat Bali
			Rendah		Riau Jambi Sumatera Selatan Kep. Babel Kep. Riau Jawa Barat Jawa Tengah Kalimantan Timur
	Rendah	IPG	Tinggi	Maluku	
			Rendah		Aceh Lampung Jawa Timur Banten NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Utara Papua Barat Papua

Keterangan:

1. Klasifikasi berdasarkan nilai IPM, IPG dan IDG
2. Klasifikasi dilakukan dengan membandingkan nilai capaian untuk masing-masing provinsi dengan nilai capaian tingkat nasional.
3. Klasifikasinya adalah sebagai berikut:
 - a. Jika dikategorikan sebagai “Rendah”, dan
 - b. Jika dikategorikan sebagai “Tinggi”.

**Tabel
5.3**

Pengelompokan Provinsi Berdasarkan IPM, IPG dan, IDG, 2011

Indikator				IDG	
				Tinggi	Rendah
IPM	Tinggi	IPG	Tinggi	Bengkulu DKI Jakarta DI Yogyakarta Kalteng	Sumatera Utara Sumatera Barat Bali Sulawesi Utara
			Rendah		Riau Jambi Sumatera Selatan Kep. Bangka Belitung Kep. Riau Jawa Tengah Kalimantan Timur
	Rendah	IPG	Tinggi		
			Rendah	Maluku	Aceh Lampung Jawa Barat Jawa Timur Banten NTB NTT Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Utara Papua Barat Papua

Keterangan:

1. Klasifikasi berdasarkan nilai IPM, IPG dan IDG
2. Klasifikasi dilakukan dengan membandingkan nilai capaian untuk masing-masing provinsi dengan nilai capaian tingkat nasional.
3. Klasifikasinya adalah sebagai berikut:
 - a. Jika dikategorikan sebagai “Rendah”, dan
 - b. Jika dikategorikan sebagai “Tinggi”.

Walaupun dalam pengelompokan yang telah dilakukan terdapat beberapa provinsi yang memiliki IPM, IPG atau IDG rendah, pada dasarnya tidak dapat diartikan bahwa kegiatan

pembangunan di provinsi yang bersangkutan kurang atau tidak berhasil. Dari perkembangan masing-masing angka indeks, sebenarnya setiap provinsi telah berhasil meningkatkan capaian pembangunannya. Persoalannya, masing-masing provinsi memiliki kecepatan yang berbeda dalam meningkatkan capaian pembangunan.

Perbedaan dalam kecepatan tersebut pada gilirannya memang akan memiliki implikasi terhadap kebijakan pembangunan yang akan diambil, terutama dalam penentuan target yang akan dicapai untuk masing-masing indeks. Misalnya suatu provinsi dengan IPM 'rendah' telah menetapkan target untuk menjadi 'tinggi'. Sekurang-kurangnya terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, IPM yang dicapai harus melampaui nilai IPM nasional. Kedua, mungkin tidaknya nilai-nilai dari semua indikator komponen penyusun IPM untuk ditingkatkan.

Pada kenyataannya, upaya untuk meningkatkan capaian pembangunan yang kemudian diukur melalui berbagai angka indeks bukanlah merupakan upaya yang mudah. Kompleksitas dari suatu upaya untuk meningkatkan capaian angka indeks dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut.

Untuk Meningkatkan Capaian IPM

Indikator yang digunakan untuk menghitung IPM terdiri dari angka harapan hidup saat lahir (dimensi kesehatan), Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (dimensi pendidikan), dan pengeluaran per kapita per tahun disesuaikan (dimensi ekonomi). Masing-masing indikator ini ternyata memiliki perilaku yang berbeda.

Angka harapan hidup saat lahir tidak mungkin ditingkatkan dalam jangka pendek. Diperlukan usaha yang berkesinambungan di bidang kesehatan secara umum dan kesehatan saat mengandung secara khusus untuk memperbaiki indikator ini.

Angka melek huruf mungkin dapat ditingkatkan dalam jangka pendek (satu atau dua tahun) melalui berbagai program pemberantasan buta huruf atau buta aksara. Hanya saja hampir semua daerah agaknya angka melek hurufnya sudah sangat

tinggi, lebih dari 95 persen, sehingga hampir tidak mungkin untuk ditingkatkan lagi.

Rata-rata lama sekolah juga tidak mungkin ditingkatkan dalam jangka pendek. Berbagai faktor seperti kesiapan infrastruktur dan tenaga pengajar memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap capaian indikator ini. Akan tetapi pengaruh lingkungan seperti kondisi budaya dan ekonomi juga perlu dipertimbangkan dalam mendorong penduduk untuk bertahan di bangku sekolah.

Pendapatan yang diterima penduduk yang diproksi melalui pengeluaran per kapita disesuaikan mungkin masih dapat ditingkatkan dalam jangka pendek atau menengah. Strategi yang dapat ditempuh antara lain adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memperluas pasar. Produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui berbagai program peningkatan ketrampilan tenaga kerja. Sedangkan perluasan pasar bagi produk barang dan jasa yang dilakukan di suatu wilayah dapat dilakukan dengan membangun fasilitas dan sarana pemasaran.

Untuk Meningkatkan Capaian IPG

Indikator yang digunakan untuk menghitung IPG pada dasarnya sama dengan yang digunakan dalam menghitung IPM, hanya saja untuk setiap indikator dipisahkan menurut jenis kelamin. Dengan demikian strategi untuk meningkatkan IPG akan sama dengan strategi peningkatan IPM, tetapi dengan memberikan perhatian yang lebih terhadap komposisi jenis kelaminnya.

Untuk Meningkatkan IDG

Indikator yang digunakan dalam menghitung IDG terdiri dari partisipasi perempuan dalam parlemen, proporsi tenaga profesional perempuan, dan kontribusi perempuan dalam perekonomian.

Masing-masing indikator pembentuk IDG agaknya tidak dapat ditingkatkan dalam jangka pendek. Selain faktor kapabilitas perempuan, faktor lain yang diduga juga memiliki peran penting adalah persepsi dan budaya masyarakat

terhadap keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Berbagai program sosialisasi, advokasi dan fasilitasi untuk mendorong peningkatan peran perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan mungkin dapat dijadikan sebagai pilihan. Alternatif lain yang mungkin juga dapat ditempuh adalah dengan memberikan *affirmative action* tertentu kepada perempuan untuk menduduki profesi tertentu atau terlibat dalam politik dan pengambilan keputusan.



6

Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab terdahulu maka dapat di tarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahun 2011 lebih dari 90 persen kabupaten/kota telah mencapai level pembangunan manusia (IPM) kategori menengah atas. Tentu hal ini merupakan kabar yang menggembirakan. Namun yang perlu dicermati adalah capaian tersebut bila dipilah antara capaian laki-laki dan perempuan.
2. Secara umum, ketimpangan capaian pembangunan gender (IPG) relatif sama sejak tahun 2004-2011. Namun dilihat menurut provinsi, tampak adanya peningkatan ketimpangan di beberapa provinsi. Selain itu, gambaran setiap provinsi menunjukkan adanya disparitas tingkat capaian pembangunan manusia menurut gender.
3. Perbedaan pencapaian IPG tertinggi dengan IPG terendah pada tahun 2011 sekitar 17,31 poin, turun sebesar 0,02 poin dari tahun 2010. Hal ini berarti disparitas pembangunan gender di tingkat provinsi menunjukkan tren yang menurun.
4. Hasil plotting IPM 2011 terhadap IPG 2011 berdasarkan 497 kabupaten/ kota di Indonesia terdapat kaitan yang searah. Hal ini berarti pembangunan manusia di Indonesia sudah terjadi di semua kelompok atau tidak didominasi oleh kelompok/jenis kelamin tertentu.
5. DKI Jakarta dan Sulawesi Utara merupakan dua provinsi yang paling baik dilihat dari segi capaian pembangunan manusia yang tercermin pada tingginya nilai IPM yang diikuti oleh tingginya capaian pembangunan gender yang tercermin pada nilai IPG.

6. Semakin besar jarak (*gap*) upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan menyebabkan angka IPG makin kecil.
7. Daerah yang memiliki *gap* antara IPM dan IPG paling besar selama 2 tahun terakhir adalah Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu penyebab dari kesenjangan gender yang terjadi di Kalimantan Timur adalah terjadinya kesenjangan dalam sumbangan pendapatan laki-laki dan perempuan.
8. *Gap* antara IPG dan IPM pada tahun 2011 yang paling rendah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun demikian, hal ini bukan berarti capaian pembangunan manusia (laki-laki dan perempuan) di NTT sudah cukup bagus karena kesenjangan (*gap*) tidak memperlihatkan level pembangunan yang dicapai.
9. Indeks pemberdayaan gender (IDG) meningkat dibanding tahun 2010, menggambarkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan ketenagakerjaan meningkat.
10. Pemberdayaan perempuan di DI Yogyakarta tetap merupakan yang terbaik dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Sementara pemberdayaan perempuan di Provinsi Aceh merupakan yang terendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 2007. Program Pembinaan Jarak Jauh Pengarusutamaan Gender, Modul 2 : Konsep dan Teori Gender. Jakarta : Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN.
- Elizabeth, R. 2007. Woman Empowerment to Support Gender Mainstreaming in Rural Agricultural Development Policies. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 25 No. 2 : 126-135.
- Haines, J. 1992. Suffrage to Sufferance : 100 Years of Women in Politics. Sydney : Allen & Unwin Pty. Ltd.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). 2011. Kertas Kebijakan 1 : Pengarusutamaan Gender. Jakarta : KPPPA.
- Parawansa, K.I. 1998. Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Kebijakan Bank Mengenai Gender dan Pembangunan. World Bank.
- Seager, J. 1997. The State of Women in the World Atlas. London : Penguin Books Limited.
- Sun, Tsai-Wei. 2005. Gender Representation In Politics and Public Administration : Taiwan and Asian Countries. Singapore : National University of Singapore.
- United Nations Development Programme (UNDP). 2005. Human Development Report 2005, International Cooperation at a Crossroads : Aid, Trade, and Security in an Equal World. New York : Hoechstetter Printing Co.
- United Nations Development Programme (UNDP). 2006. Human Development Report 2006, Beyond Scarcity : Power, Poverty and the Global Water Crisis. New York : Palgrave Macmillan.
- United Nations Development Programme (UNDP). 2007. Human Development Report 2007/2008, Fighting Climate Change : Human Solidarity in a Divided World. New York : Palgrave Macmillan.

United Nations Development Programme (UNDP). 2010. Human Development Report 2010, The Real Wealth of Nations : Pathways to Human Development. New York : Palgrave Macmillan.

United Nations Development Programme (UNDP). 2011. Human Development Report 2011, Sustainability and Equity : A Better Future for All. New York : Palgrave Macmillan.

TIM PENULIS

Pengarah	:	J. Bambang Kristianto Lies Rosdianty
Editor	:	Margo Yuwono Harmawanti Marhaeni Ahmad Avenzora Rustam
Penulis	:	Haerani Natali Agustini Waris Marsisno Dyah Retno P Dimas Hari Santoso Adi Nugroho Fenti Anggraeni
Pengolah Data	:	Adi Nugroho Fenti Anggraeni
Perapihan Naskah	:	Dimas Hari Santoso



Lampiran

Lampiran 1. Diagram Penghitungan Indeks Komposit

L1

Diagram Penghitungan IPM

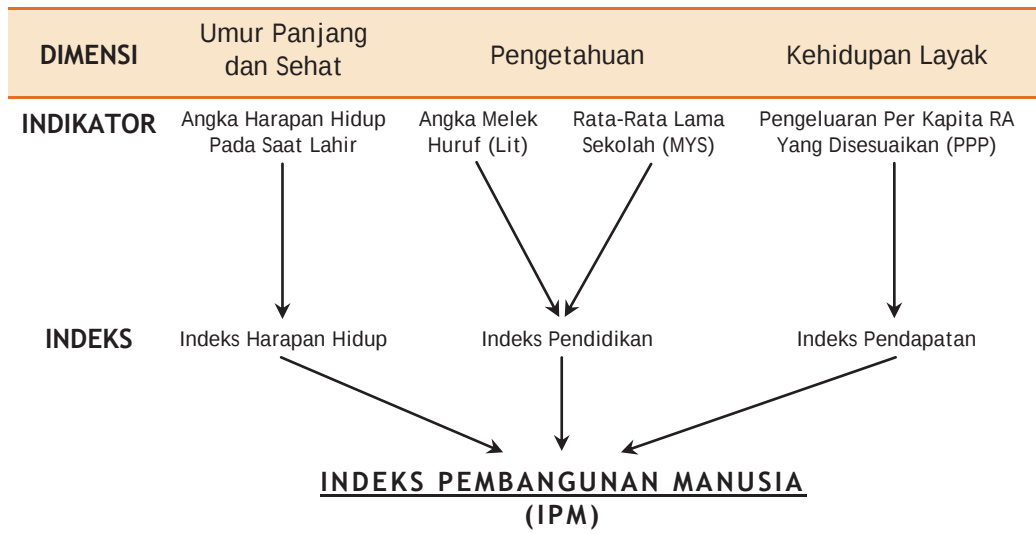


Diagram Penghitungan IPG

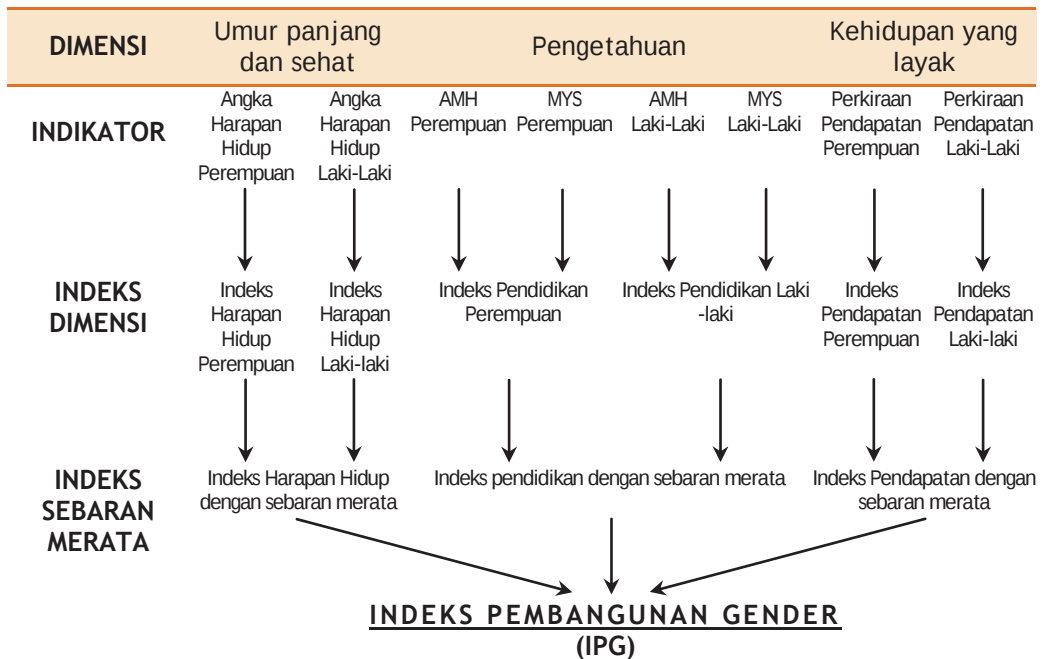
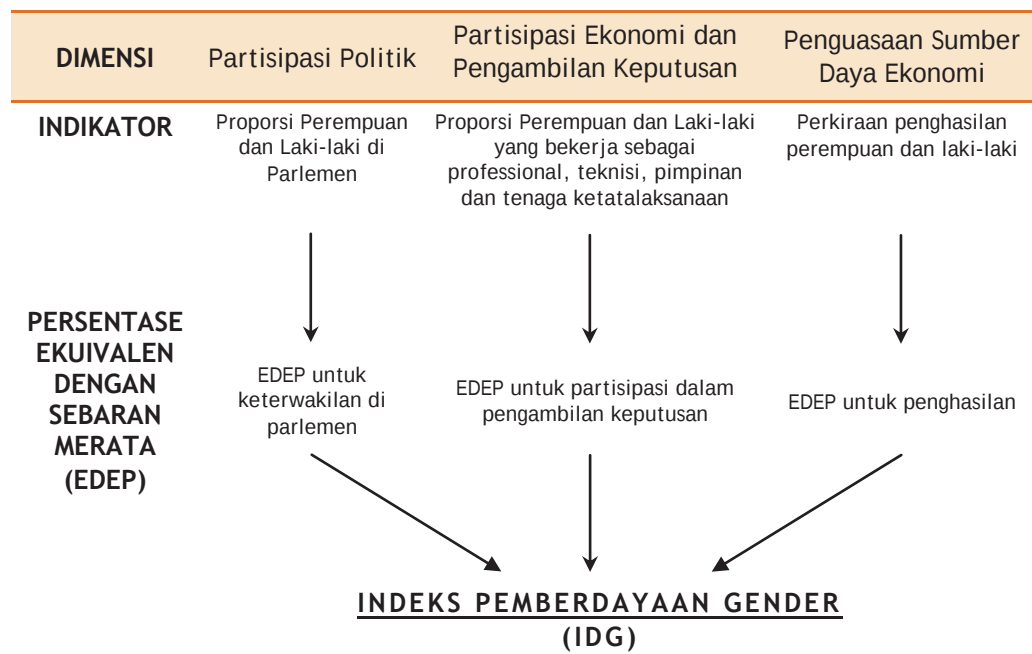


Diagram Penghitungan IDG



Lampiran 2. Metode Penghitungan Indeks Komposit

L2

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan dan kehidupan yang layak (lihat diagram 1). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas dan dalam, karena terkait banyak faktor didalamnya. Meski demikian, secara sederhana dapat diterjemahkan dalam indikator-indikator sebagai berikut:

a. Lamanya hidup/Angka Harapan Hidup

Dimensi umur panjang dan sehat mencerminkan aspek kesehatan, pada cakupan lebih luas merupakan ukuran kinerja pembangunan sektor kesehatan. Indikator yang digunakan untuk mendeteksi capaian dari dimensi umur panjang dan sehat adalah angka umur harapan hidup (life expectancy). Angka umur harapan hidup dapat dihitung dengan menggunakan life table. Pada publikasi ini angka umur harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (indirect). Jenis data masukan yang digunakan untuk menghitung angka umur harapan hidup terdapat dua (2) jenis, yaitu anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Paket program Mortpack dapat membantu menghitung angka harapan hidup dengan input data ALH dan AMH. Metode yang dipilih adalah metode Trussel dengan model West karena sesuai/cocok dengan kondisi Indonesia.

b. Tingkat Pendidikan

Dimensi pengetahuan menggambarkan tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk dewasa; yakni penduduk berusia 15 tahun ke atas. Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua (2) indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (means years schooling) dan angka melek huruf. Selanjutnya rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh

penduduk usia 15 tahun ke atas di semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberikan bobot dua pertiga.

c. Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP untuk mengukur standar hidup layak menggunakan GDP riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

$$\begin{aligned} C(i) &= C(i) && \text{Jika } C(i) < Z \\ &= Z + 2(C(i) - Z)^{1/2} && \text{Jika } Z < C(i) < 2Z \\ &= Z + 2(Z)^{1/2} + 3(C(i) - 2Z)^{1/3} && \text{Jika } 2Z < C(i) < 3Z \end{aligned}$$

dst

Dimana

$C(i)$ = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

Z = *Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp.549.500 per kapita per tahun atau Rp. 1.500 per kapita per hari*

Sumber data yang digunakan untuk menghitung standar hidup layak adalah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

d. Penyusunan Indeks

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})}$$

$X_{(i,j)}$ = Indeks komponen ke- i dari daerah j

$X_{(i-min)}$ = Nilai minimum dari X_i

$X_{(i-maks)}$ = Nilai maksimum dari X_i

Untuk menghitung indeks setiap komponen, batas nilai minimum dan maksimum setiap komponen IPM ditentukan berdasarkan standar sebagai berikut:

**Tabel
L2.1**

Nilai maksimum dan minimum dari setiap komponen IPM

Komponen IPM	Max	Min	Keterangan
1. Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
2. Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
3. Rata2 Lama Sekolah	15	0	
4. Daya Beli	732,720 ^a	300,000 (1996) 360,000 ^b (1999, 2002)	Pengeluaran per Kapita Riil disesuaikan

Keterangan

a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018

b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru

Nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM_j = \frac{1}{3} \sum_j Indeks X_{(i,j)}$$

Dimana :

Indeks $X_{(i,j)}$ = Indeks komponen IPM ke i untuk wilayah ke j ;

$i = 1, 2, 3$

$j = 1, 2, \dots, k$ wilayah

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar yang sama seperti IPM, yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan memperhitungkan ketimpangan gender (lihat diagram 2). IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Apabila nilai IPG sama

dengan IPM, maka dapat dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender, tetapi sebaliknya IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender.

Penyusunan Indeks

1. Indeks dari setiap komponen IPG dihitung dengan menggunakan batas maksimum dan minimum sebagai berikut :

**Tabel
L2. 2**

Nilai Maksimum dan Minimum Dari Setiap Komponen IPG

	Maksimum		Minimum	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Angka Harapan Hidup	82,5	87,5	22,5	27,5
Angka Melek Huruf	100	100	0	0
Rata-Rata Lama Sekolah	15	15	0	0
Konsumsi per Kapita	732.720		300.000 (1996) 360.000 (1999, 2002)	

Keterangan : L = laki-laki P = Perempuan

2. Menghitung nilai X_{ede} dari tiap indeks

$$X_{ede} = [P_f X_f^{(1-\varepsilon)} + P_m X_m^{(1-\varepsilon)}]$$

dimana X_f : Pencapaian perempuan
 X_m : Pencapaian laki-laki
 P_f : Proporsi penduduk perempuan
 P_m : proporsi penduduk laki-laki

3. Menghitung IPG dengan rumus

$$IPG = 1/3 (X_{ede(1)} + X_{ede(2)} + I_{Inc-dis})$$

dimana $X_{ede(1)}$: X_{ede} untuk harapan hidup
 $X_{ede(2)}$: X_{ede} untuk Pendidikan
 $I_{Inc-dis}$: Indeks distribusi pendapatan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. Selanjutnya, dimensi IDG direpresentasikan oleh indikator-indikator seperti yang terlihat pada diagram 3.

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata (Equally Distributed Equivalent Percentage). Penghitungan sumbangan pendapatan untuk IDG sama dengan penghitungan untuk IPG sebagaimana diuraikan di atas. Selanjutnya, masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Untuk penghitungan masing-masing indeks dapat dilakukan sebagai berikut;

Penyusunan Indeks

1. Indeks keterwakilan di parlemen (I_{par})

$$\text{EDEP}_{(\text{par})} = \{ (X_f)(Y_f)^{-1} + (X_m)(Y_m)^{-1} \}^{-1}$$
$$I_{(\text{par})} = \{ \text{EDEP}_{(\text{par})} \} / 50$$

dimana

X_f = proporsi penduduk perempuan

X_m = proporsi penduduk laki-laki

Y_f = proporsi keterwakilan perempuan di parlemen

Y_m = proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen

2. Indeks pengambilan keputusan (I_{DM})

$$\text{EDEP}_{(\text{DM})} = \{ (X_f)(Z_f)^{-1} + (X_m)(Z_m)^{-1} \}^{-1}$$
$$I_{(\text{DM})} = \{ \text{EDEP}_{(\text{DM})} \} / 50$$

dimana

Z_f = proporsi perempuan sebagai tenaga profesional

Z_m = proporsi laki-laki sebagai tenaga profesional

3. Indeks distribusi pendapatan (I inc-dis)

Sebagaimana disajikan pada penghitungan IPG diatas

4. Indeks pemberdayaan gender

$$IDG=1/3 (I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{inc-dis})$$

Lampiran 3. IPM Provinsi dan Kabupaten 2010 - 2011

L3

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)		2010	2011
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1100	ACEH	68.70	68.80	96.88	96.95	8.81	8.90	611.42	615.60	71.70	72.16
1101	Simeulue	62.98	63.05	98.66	98.85	8.52	8.62	618.86	622.72	69.28	69.73
1102	Aceh Singkil	64.92	65.10	96.24	96.25	7.76	7.77	610.14	613.88	68.58	68.98
1103	Aceh Selatan	66.93	67.03	96.53	96.55	8.43	8.44	606.47	610.56	69.97	70.36
1104	Aceh Tenggara	69.22	69.26	97.95	97.97	9.35	9.36	597.96	602.06	71.60	71.94
1105	Aceh Timur	69.74	69.80	98.21	98.25	8.49	8.51	588.15	592.58	70.55	70.94
1106	Aceh Tengah	69.64	69.70	98.60	98.65	9.52	9.70	618.69	622.73	73.69	74.18
1107	Aceh Barat	69.97	70.06	94.53	94.60	8.48	8.54	600.36	604.24	70.79	71.20
1108	Aceh Besar	70.75	70.81	96.96	96.98	9.55	9.77	610.30	614.39	73.32	73.83
1109	Pidie	69.53	69.68	95.91	96.30	8.67	8.72	612.56	616.29	71.92	72.43
1110	Bireuen	72.35	72.39	98.47	98.51	9.26	9.28	593.96	597.44	73.07	73.38
1111	Aceh Utara	69.74	69.80	97.81	97.83	9.15	9.19	607.90	612.04	72.46	72.85
1112	Aceh Barat Daya	66.99	67.19	96.34	96.47	7.72	8.01	617.50	621.49	70.29	70.95
1113	Gayo Lues	67.08	67.15	87.27	87.38	8.71	8.73	601.96	605.62	67.86	68.22
1114	Aceh Tamiang	68.37	68.47	98.27	98.32	8.78	8.85	598.26	602.79	70.79	71.26
1115	Nagan Raya	69.64	69.70	89.85	89.89	7.57	7.75	604.08	608.27	69.18	69.68
1116	Aceh Jaya	68.02	68.08	93.99	94.12	8.72	8.73	598.56	602.50	69.63	69.99
1117	Bener Meriah	67.63	67.69	98.50	98.79	8.77	8.81	605.49	610.71	70.98	71.51
1118	Pidie Jaya	69.24	69.30	95.45	95.48	8.64	8.68	622.16	626.89	72.38	72.82
1171	Kota Banda Aceh	70.88	71.15	99.16	99.18	12.09	12.20	632.24	636.28	77.45	78.00
1172	Kota Sabang	71.02	71.30	98.99	99.08	10.55	10.59	627.35	631.10	75.98	76.47
1173	Kota Langsa	70.58	70.75	99.20	99.30	10.45	10.51	603.34	607.95	73.85	74.37
1174	Kota Lhokseumawe	70.81	71.17	99.62	99.64	9.99	10.04	634.07	638.45	76.10	76.68
1175	Subulussalam	65.89	66.01	96.54	96.55	7.59	7.61	612.77	616.48	69.26	69.63

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1200	SUMATERA UTARA	69.50	69.65	97.32	97.46	8.85	8.91	636.33	640.23	74.19	74.65
1201	Nias	69.60	69.77	90.44	90.78	6.41	6.42	607.16	610.40	68.66	69.09
1202	Mandailing Natal	63.62	63.70	99.33	99.34	7.80	7.92	636.51	640.33	70.60	71.04
1203	Tapanuli Selatan	67.21	67.34	99.81	99.83	8.94	8.95	642.53	647.03	74.02	74.45
1204	Tapanuli Tengah	68.11	68.26	95.78	95.82	8.13	8.15	618.97	623.03	71.21	71.63
1205	Tapanuli Utara	69.70	70.02	98.59	98.60	8.85	8.97	632.74	636.35	74.31	74.86
1206	Toba Samosir	70.68	70.75	98.35	98.49	9.80	9.85	646.36	649.91	76.55	76.93
1207	Labuhan Batu	69.54	70.02	97.95	97.96	8.53	8.55	635.23	639.53	74.03	74.65
1208	Asahan	68.98	69.13	96.90	97.70	7.67	7.92	631.24	634.67	72.54	73.25
1209	Simalungun	68.96	69.08	97.50	97.57	8.70	8.71	632.14	636.82	73.50	73.94
1210	Dairi	68.40	68.59	98.09	98.70	8.55	8.91	627.70	629.29	72.86	73.49
1211	Karo	72.19	72.29	98.69	98.72	9.10	9.22	625.48	629.36	75.34	75.79
1212	Deli Serdang	70.65	70.88	98.53	98.64	9.50	9.56	632.41	636.39	75.28	75.78
1213	Langkat	69.07	69.12	96.92	97.27	8.76	8.78	628.21	632.54	73.18	73.62
1214	Nias Selatan	70.01	70.36	85.20	85.28	6.33	6.40	600.47	604.39	67.15	67.72
1215	Humbang Hasundutan	67.87	67.96	98.21	98.22	9.05	9.31	614.37	617.64	71.94	72.43
1216	Pakpak Barat	67.60	67.81	96.52	96.53	8.20	8.22	614.58	617.98	70.80	71.20
1217	Samosir	69.73	69.84	96.61	97.47	9.52	9.54	623.89	627.89	73.70	74.27
1218	Serdang Bedagai	68.98	69.08	97.70	97.80	8.64	8.65	628.82	632.71	73.25	73.64
1219	Batu Bara	68.58	68.71	95.25	95.27	7.45	7.54	628.90	633.10	71.62	72.08
1220	Padang Lawas Utara	66.57	66.62	99.21	99.53	8.45	8.89	634.18	638.06	72.52	73.25
1221	Padang Lawas	67.03	67.09	99.65	99.66	8.13	8.40	625.64	630.00	71.98	72.55
1222	Labuhan Batu Selatan	69.95	70.23	98.84	98.93	8.21	8.24	630.27	634.67	73.84	74.38
1223	Labuhan Batu Utara	69.62	69.97	98.17	98.53	7.91	8.01	632.42	636.80	73.45	74.14
1224	Nias Utara	69.15	69.24	89.19	89.30	6.10	6.13	605.13	609.48	67.75	68.18
1225	Nias Barat	69.15	69.23	84.30	84.46	5.56	5.88	607.71	611.91	66.46	67.10
1271	Kota Sibolga	70.23	70.29	99.29	99.31	9.63	9.72	629.45	633.58	75.08	75.50
1272	Kota Tanjung Balai	70.43	70.76	98.99	99.02	8.81	8.89	624.45	628.81	74.14	74.72
1273	Kota Pematang Siantar	72.16	72.29	99.45	99.47	10.85	10.89	634.88	639.01	77.51	77.93
1274	Kota Tebing Tinggi	71.33	71.47	98.70	99.02	9.85	9.90	639.39	642.49	76.49	76.91
1275	Kota Medan	71.91	72.06	99.36	99.38	10.84	10.86	635.11	639.60	77.36	77.81
1276	Kota Binjai	71.77	71.89	99.19	99.20	9.89	9.99	633.37	637.70	76.41	76.88
1277	Kota Padang Sidempuan	69.59	69.72	99.70	99.72	10.19	10.21	629.11	632.81	75.21	75.58
1278	Gunung Sitoli	69.95	70.29	94.75	94.86	8.42	8.45	611.95	615.91	71.67	72.21

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1300	SUMATERA BARAT	69.50	69.76	97.09	97.16	8.48	8.57	635.29	638.73	73.78	74.28
1301	Kepulauan Mentawai	68.45	68.54	93.58	93.67	6.51	6.52	606.53	609.56	68.75	69.06
1302	Pesisir Selatan	67.31	67.59	94.92	95.01	7.84	8.12	629.30	632.30	71.15	71.77
1303	Solok	66.60	66.95	97.19	97.21	7.60	8.03	627.25	631.02	70.93	71.73
1304	Sawah Lunto/Sijunjung	66.92	67.25	94.78	94.79	7.43	7.50	633.55	636.58	70.92	71.40
1305	Tanah Datar	70.94	71.30	97.10	97.25	8.35	8.40	628.88	632.89	74.00	74.58
1306	Padang Pariaman	68.65	69.01	94.49	94.51	7.26	7.31	630.40	634.09	71.45	71.98
1307	Agam	69.04	69.23	97.85	97.86	8.50	8.59	629.65	633.28	73.28	73.74
1308	Limapuluh Koto	68.45	68.81	98.85	98.99	7.94	8.00	609.70	613.39	71.22	71.78
1309	Pasaman	67.44	67.77	98.73	98.82	7.61	7.66	639.84	642.90	72.71	73.19
1310	Solok Selatan	64.61	64.74	97.53	97.60	7.82	7.84	613.28	616.62	68.98	69.34
1311	Dharmas Raya	66.00	66.25	96.38	97.27	7.77	8.24	608.89	610.06	69.13	69.89
1312	Pasaman Barat	65.15	65.41	98.20	98.29	8.00	8.03	621.31	624.64	70.18	70.62
1371	Kota Padang	70.89	71.14	99.49	99.50	10.91	10.92	647.24	649.62	77.81	78.15
1372	Kota Solok	69.69	69.86	98.51	98.52	10.43	10.48	635.24	638.63	75.65	76.04
1373	Kota Sawah Lunto	71.65	71.86	98.55	98.62	9.14	9.23	624.52	627.79	74.96	75.41
1374	Kota Padang Panjang	71.30	71.66	99.30	99.31	10.23	10.73	646.57	647.98	77.45	78.12
1375	Kota Bukit Tinggi	71.53	71.69	99.92	99.93	10.50	10.58	651.09	655.31	78.26	78.73
1376	Kota Payakumbuh	70.62	70.78	99.18	99.19	9.66	9.72	636.22	640.51	75.81	76.29
1377	Kota Pariaman	69.02	69.25	98.92	98.93	9.90	9.92	628.66	632.35	74.46	74.89
1400	RIAU	71.40	71.55	98.35	98.42	8.58	8.63	646.63	650.83	76.07	76.53
1401	Kuantan Sengingi	68.33	68.43	97.82	98.06	7.99	8.03	645.21	649.28	73.70	74.15
1402	Indragiri Hulu	68.81	68.91	98.16	98.21	7.98	8.01	647.10	650.72	74.18	74.54
1403	Indragiri Hilir	71.39	71.63	99.06	99.15	7.62	7.63	643.16	647.22	75.24	75.71
1404	Pelalawan	68.82	68.95	98.46	98.48	8.21	8.24	630.99	635.05	73.18	73.59
1405	Siak	71.69	71.86	98.56	98.65	9.08	9.14	644.22	648.16	76.46	76.92
1406	Kampar	68.52	68.67	98.48	98.58	8.49	8.92	646.68	650.82	74.43	75.18
1407	Rokan Hulu	67.17	67.21	98.28	98.37	7.56	7.68	642.94	646.92	72.66	73.10
1408	Bengkalis	70.35	70.46	98.09	98.16	9.12	9.17	637.23	641.33	75.11	75.53
1409	Rokan Hilir	67.18	67.25	97.99	98.15	7.87	7.89	637.78	641.77	72.43	72.83
1410	Kepulauan Meranti	68.73	68.86	90.18	90.34	7.32	7.35	630.86	635.16	70.62	71.08
1471	Kota Pekanbaru	71.45	71.67	99.87	99.89	11.33	11.34	644.04	648.05	78.27	78.72
1473	Kota Dumai	71.64	71.95	99.31	99.35	9.72	9.73	653.00	657.01	77.75	78.25

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1500	JAMBI	69.10	69.25	96.07	96.16	7.84	8.05	633.67	637.60	72.74	73.30
1501	Kerinci	70.83	70.96	97.24	97.25	8.11	8.20	635.00	639.64	74.26	74.76
1502	Merangin	68.40	68.61	97.47	97.52	7.50	7.55	627.76	631.42	71.95	72.40
1503	Sarolangun	69.43	69.57	94.76	94.97	7.14	7.32	638.24	642.92	72.46	73.08
1504	Batanghari	69.16	69.36	97.57	97.58	7.52	7.90	633.60	635.94	72.87	73.44
1505	Muara Jambi	69.26	69.32	95.97	96.71	7.98	8.02	630.79	633.40	72.69	73.12
1506	Tanjung Jabung Timur	70.42	70.76	92.43	92.44	6.26	6.30	633.68	638.15	71.49	72.05
1507	Tanjung Jabung Barat	69.70	69.87	97.92	97.93	7.54	7.58	627.59	631.78	72.79	73.24
1508	Tebo	69.11	69.24	94.92	94.93	7.10	7.41	630.24	634.36	71.67	72.30
1509	Bungo	67.27	67.54	96.16	96.33	8.14	8.16	633.57	638.02	71.95	72.50
1571	Kota Jambi	69.87	69.91	98.99	99.07	10.11	10.37	641.12	644.99	76.07	76.60
1572	Kota Sungai Penuh	70.96	71.03	97.24	97.25	9.19	9.23	656.11	658.66	76.76	77.02
1600	SUMATERA SELATAN	69.60	69.80	97.36	97.44	7.82	7.84	629.38	633.57	72.95	73.42
1601	Ogan Komering Ulu	69.40	69.50	98.43	98.47	8.38	8.40	624.60	629.57	73.14	73.59
1602	Ogan Komering Ilir	68.02	68.25	96.56	96.61	6.74	6.75	623.08	627.12	70.61	71.07
1603	Muara Enim (Liot)	67.66	67.85	98.82	98.85	7.49	7.52	614.40	618.62	70.81	71.26
1604	Lahat	68.23	68.57	97.78	97.83	8.28	8.31	612.05	616.13	71.30	71.83
1605	Musi Rawas	64.80	64.95	96.52	96.55	7.09	7.11	607.58	612.59	67.89	68.38
1606	Musi Banyuasin	69.86	70.12	97.01	97.70	7.51	7.61	616.57	619.92	71.81	72.44
1607	Banyuasin	67.41	67.59	96.46	96.50	7.02	7.06	614.14	618.83	69.78	70.28
1608	Ogan Komering Ulu Selatan	69.37	69.44	97.90	97.93	7.45	7.47	613.03	617.55	71.42	71.82
1609	Ogan Komering Ulu Timur	68.36	68.42	94.73	94.85	6.91	7.29	612.16	616.35	69.68	70.34
1610	Ogan Ilir	66.27	66.57	97.62	97.71	7.53	7.56	610.66	615.47	69.51	70.09
1611	Empat Lawang	65.50	65.64	97.78	97.83	7.23	7.40	607.06	610.32	68.61	69.08
1671	Kota Palembang	71.13	71.37	98.71	98.73	9.96	9.98	636.39	640.30	76.23	76.69
1672	Kota Prabumulih	71.91	72.32	98.66	98.71	9.16	9.25	613.11	617.77	74.27	74.94
1673	Kota Pagar Alam	70.17	70.39	98.50	98.60	8.95	8.97	614.15	618.67	73.19	73.70
1674	Kota Lubuk Linggau	65.69	65.84	98.40	98.50	9.24	9.36	609.78	614.34	70.56	71.10
1700	BENGKULU	69.90	70.16	95.30	95.40	8.25	8.33	628.51	631.86	72.92	73.40
1701	Bengkulu Selatan	67.41	67.59	96.47	96.51	8.52	8.60	632.79	636.57	72.32	72.78
1702	Rejang Lebong	67.25	67.62	95.58	95.65	7.87	7.97	626.66	630.72	71.09	71.70
1703	Bengkulu Utara	69.54	69.75	92.42	92.90	7.47	7.67	628.50	632.59	71.50	72.19
1704	Kaur	67.23	67.54	96.06	96.36	7.91	7.94	610.84	613.14	69.99	70.43
1705	Seluma	65.70	65.98	93.90	93.96	7.41	7.43	592.17	595.40	66.86	67.29
1706	Mukomuko	67.81	67.99	94.06	94.08	7.41	7.69	624.59	627.72	70.55	71.11
1707	Lebong	66.65	67.04	95.41	95.54	7.79	7.92	618.78	622.36	70.05	70.66
1708	Kepahiang	64.26	64.57	95.89	95.91	7.63	7.78	610.59	614.02	68.08	68.63
1709	Bengkulu Tengah	70.12	70.19	91.86	91.89	7.06	7.25	591.13	595.19	68.51	69.01
1771	Bengkulu	70.49	70.66	99.25	99.28	10.99	11.03	647.59	650.68	77.62	77.99

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1800	LAMPUNG	69.50	69.75	94.64	95.02	7.75	7.82	618.63	621.77	71.42	71.94
1801	Lampung Barat	67.14	67.45	97.28	97.33	7.42	7.46	603.43	606.45	69.28	69.72
1802	Tanggamus	69.33	69.74	95.32	95.47	7.36	7.40	620.19	623.22	71.31	71.83
1803	Lampung Selatan	68.44	68.74	94.85	94.91	7.41	7.49	611.32	614.29	70.06	70.53
1804	Lampung Timur	70.22	70.48	93.32	93.63	7.35	7.58	612.19	614.06	70.73	71.26
1805	Lampung Tengah	69.25	69.48	93.08	93.74	7.39	7.41	619.59	623.05	70.74	71.29
1806	Lampung Utara	67.94	68.21	95.25	95.32	7.96	8.10	612.28	614.70	70.36	70.81
1807	Way Kanan	69.45	69.70	94.61	94.89	7.27	7.32	604.38	607.79	69.92	70.43
1808	Tulang Bawang	68.86	69.13	93.80	94.52	7.10	7.20	617.89	620.96	70.34	70.96
1809	Pesawaran	68.40	68.56	94.41	95.58	7.46	7.51	608.64	610.53	69.77	70.30
1810	Pringsewu	68.51	68.64	94.19	94.72	8.58	8.60	626.32	628.80	71.97	72.37
1811	Mesuji	68.39	68.45	92.36	93.30	6.30	6.37	596.24	598.74	67.49	67.98
1812	Tulang Bawang Barat	68.66	68.72	92.48	93.03	7.45	7.47	602.17	604.38	68.98	69.32
1871	Kota Bandar Lampung	70.87	71.24	98.44	98.47	9.91	10.18	632.60	634.96	75.70	76.29
1872	Kota Metro	72.54	72.76	97.49	98.38	9.82	10.12	631.26	633.37	76.25	76.95
1900	KEP. BANGKA BELITUNG	68.90	69.05	95.69	95.83	7.45	7.58	641.51	645.37	72.86	73.37
1901	Bangka	67.64	67.85	96.31	96.65	7.64	8.00	642.34	645.87	72.50	73.23
1902	Belitung	69.17	69.26	96.51	96.57	7.81	7.84	640.31	644.52	73.36	73.77
1903	Bangka Barat	67.78	67.90	92.86	93.59	6.87	6.95	627.09	629.50	70.07	70.54
1904	Bangka Tengah	67.92	68.05	95.90	95.95	6.86	6.96	632.28	635.69	71.22	71.63
1905	Bangka Selatan	67.72	67.92	93.62	93.66	5.99	6.01	593.57	596.94	66.97	67.36
1906	Belitung Timur	68.83	69.06	96.69	96.71	7.48	7.72	627.09	629.39	71.96	72.44
1971	Kota Pangkal Pinang	70.43	70.54	98.18	98.20	9.50	10.03	642.10	645.50	75.83	76.54
2100	KEPULAUAN RIAU	69.80	69.85	97.19	97.67	9.16	9.73	643.00	644.96	75.07	75.78
2101	Karimun	69.91	69.93	95.82	96.36	8.09	8.14	637.79	640.24	73.64	73.99
2102	Bintan	69.71	69.76	95.09	96.14	8.63	8.91	646.57	650.00	74.44	75.17
2103	Natuna	68.31	68.37	96.47	96.63	7.17	7.64	616.41	620.14	70.56	71.26
2104	Lingga	70.16	70.26	91.64	91.79	7.23	7.24	626.64	629.65	71.35	71.68
2105	Kepulauan Anambas	67.40	67.53	90.00	91.87	5.98	6.38	627.54	629.07	68.60	69.50
2171	Kota Batam	70.81	70.86	98.94	98.97	10.77	10.78	650.60	653.07	77.80	78.03
2172	Kota Tanjung Pinang	69.62	69.67	97.31	98.70	9.42	9.68	635.26	636.87	74.59	75.25

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3100	DKI JAKARTA	73.20	73.35	99.13	99.15	10.93	10.95	628.67	632.17	77.60	77.97
3101	Kep. Seribu	70.55	70.66	98.36	98.38	7.96	8.19	590.55	591.84	70.82	71.16
3171	Kota Jakarta Selatan	73.51	73.69	99.23	99.37	11.08	11.09	649.00	651.70	79.47	79.82
3172	Kota Jakarta Timur	73.35	73.53	99.07	99.11	11.04	11.10	644.29	646.87	78.95	79.31
3173	Kota Jakarta Pusat	72.30	72.43	99.52	99.53	10.74	10.77	646.43	648.69	78.41	78.68
3174	Kota Jakarta Barat	73.46	73.63	98.96	98.98	10.74	10.75	645.26	647.14	78.84	79.09
3175	Kota Jakarta Utara	72.82	72.95	99.17	99.18	10.02	10.07	640.38	642.91	77.63	77.93
3200	JAWA BARAT	68.20	68.40	96.18	96.29	8.02	8.06	632.22	635.80	72.29	72.73
3201	Bogor	68.86	69.28	95.02	95.09	7.98	7.99	629.62	631.63	72.16	72.58
3202	Sukabumi	67.06	67.38	97.33	97.35	6.88	6.90	626.99	629.72	70.66	71.06
3203	Cianjur	66.00	66.35	97.55	97.64	6.82	6.85	614.83	617.59	69.14	69.59
3204	Bandung	69.02	69.10	98.72	98.75	8.37	8.46	638.56	642.00	74.05	74.43
3205	Garut	65.60	66.00	98.94	98.96	7.34	7.37	637.49	638.77	71.36	71.70
3206	Tasikmalaya	67.96	68.18	98.90	98.92	6.99	7.33	632.31	634.06	72.00	72.51
3207	Ciamis	67.29	67.47	97.59	97.93	7.19	7.47	630.86	631.63	71.37	71.81
3208	Kuningan	67.47	67.59	95.45	96.99	6.95	7.22	631.73	632.44	70.89	71.55
3209	Cirebon	65.29	65.41	92.33	92.41	6.85	6.87	631.55	635.25	68.89	69.27
3210	Majalengka	66.35	66.62	95.09	95.11	6.84	7.17	633.65	635.71	70.25	70.81
3211	Sumedang	67.42	67.52	97.73	97.75	7.93	7.94	636.01	638.36	72.42	72.67
3212	Indramayu	66.82	67.23	85.65	85.66	5.73	5.95	635.67	638.98	67.75	68.40
3213	Subang	69.39	69.54	92.45	92.47	6.92	6.94	630.09	633.46	71.14	71.50
3214	Purwakarta	67.06	67.35	95.71	96.07	7.42	7.44	633.15	635.21	71.17	71.59
3215	Karawang	66.70	67.00	93.21	93.22	6.95	7.02	629.62	633.04	69.79	70.28
3216	Bekasi	69.40	69.73	94.03	94.14	8.33	8.60	635.18	637.76	72.93	73.54
3217	Kab Bandung Barat	68.65	68.68	98.51	99.11	8.07	8.11	635.56	639.14	73.35	73.80
3271	Kota Bogor	68.87	68.97	98.77	98.79	9.79	9.80	647.89	651.25	75.75	76.08
3272	Kota Sukabumi	69.44	69.70	99.66	99.67	9.32	9.35	634.82	638.41	74.91	75.36
3273	Kota Bandung	69.72	69.78	99.67	99.70	10.44	10.45	636.89	640.65	76.06	76.39
3274	Kota Cirebon	68.50	68.52	97.05	97.06	9.47	9.75	647.96	651.47	74.93	75.42
3275	Kota Bekasi	69.64	69.70	98.51	98.56	10.53	10.58	643.92	646.92	76.36	76.68
3276	Kota Depok	73.09	73.22	98.94	98.96	10.94	10.97	649.20	651.46	79.09	79.36
3277	Kota Cimahi	69.18	69.25	99.65	99.74	10.50	10.61	633.20	637.86	75.51	76.01
3278	Kota Tasikmalaya	69.86	70.23	99.55	99.57	8.83	8.85	630.24	633.13	74.40	74.85
3279	Kota Banjar	66.26	66.38	97.26	97.30	8.01	8.12	631.36	635.10	71.38	71.82

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3300	JAWA TENGAH	71.40	71.55	89.95	90.34	7.24	7.29	637.27	640.41	72.49	72.94
3301	Cilacap	70.82	71.12	90.28	91.48	6.85	6.86	634.50	636.62	71.73	72.34
3302	Banyumas	69.72	69.78	93.98	94.06	7.73	7.76	634.52	638.27	72.60	72.96
3303	Purbalingga	70.19	70.44	93.48	93.50	7.18	7.21	631.04	634.44	72.07	72.50
3304	Banjarnegara	69.04	69.20	88.43	88.48	6.33	6.34	634.04	638.79	69.91	70.39
3305	Kebumen	69.32	69.37	90.74	91.53	6.87	6.92	635.81	639.16	71.12	71.62
3306	Purworejo	70.52	70.78	91.51	91.74	7.75	7.84	634.97	636.29	72.55	72.91
3307	Wonosobo	69.98	70.23	90.47	91.16	6.27	6.55	629.76	630.41	70.52	71.06
3308	Magelang	70.12	70.18	91.35	93.29	7.26	7.33	636.96	638.16	72.08	72.69
3309	Boyolali	70.37	70.43	85.97	87.96	7.37	7.42	632.00	632.19	70.72	71.25
3310	Klaten	71.50	71.67	89.90	89.92	8.27	8.28	644.21	646.39	73.83	74.10
3311	Sukoharjo	70.23	70.29	90.69	90.72	8.36	8.52	646.94	649.96	73.57	73.97
3312	Wonogiri	72.28	72.35	82.18	83.50	6.32	6.35	647.21	649.51	71.33	71.86
3313	Karanganyar	72.20	72.28	86.91	88.90	7.39	7.41	647.94	649.70	73.19	73.82
3314	Sragen	72.56	72.75	84.36	84.41	6.99	7.02	628.04	630.61	71.00	71.33
3315	Grobogan	69.73	69.89	90.36	90.41	6.76	6.81	631.25	635.15	70.83	71.27
3316	Blora	71.34	71.41	83.19	85.06	6.25	6.45	642.36	642.83	70.61	71.25
3317	Rembang	70.13	70.23	91.17	91.36	6.85	6.89	641.28	644.43	72.07	72.45
3318	Pati	72.83	72.89	86.42	87.59	6.95	6.98	646.15	648.77	72.96	73.49
3319	Kudus	69.62	69.68	93.71	93.73	8.11	8.12	636.90	639.98	72.95	73.24
3320	Jepara	70.85	70.99	93.09	93.15	7.40	7.52	632.48	636.45	72.64	73.12
3321	Demak	71.24	71.59	91.36	92.53	7.59	7.60	632.22	632.87	72.58	73.09
3322	Semarang	72.47	72.54	93.62	93.67	7.75	7.87	634.97	637.71	74.10	74.45
3323	Temanggung	72.54	72.66	95.94	95.96	7.01	7.09	635.01	638.07	74.11	74.47
3324	Kendal	68.44	68.77	89.15	89.31	6.91	6.93	637.09	639.78	70.41	70.85
3325	Batang	70.11	70.34	88.09	89.90	6.71	6.72	630.11	631.55	70.41	71.06
3326	Pekalongan	69.01	69.28	92.05	92.08	6.66	6.70	639.95	643.53	71.40	71.86
3327	Pemalang	67.68	67.90	90.76	90.79	6.49	6.51	635.26	637.71	69.89	70.22
3328	Tegal	68.79	69.08	89.26	89.47	6.56	6.60	639.95	643.48	70.59	71.09
3329	Brebes	67.67	67.96	86.14	86.15	5.70	5.72	634.36	637.29	68.20	68.61
3371	Kota Magelang	70.22	70.28	97.25	97.29	10.21	10.22	649.52	651.91	76.60	76.83
3372	Kota Surakarta	72.16	72.25	96.68	96.71	10.32	10.34	652.43	655.77	77.86	78.18
3373	Kota Salatiga	71.03	71.14	96.50	96.52	9.94	9.97	647.54	650.39	76.53	76.83
3374	Kota Semarang	72.13	72.18	96.44	96.47	9.98	10.11	646.94	649.21	77.11	77.42
3375	Kota Pekalongan	70.32	70.48	95.68	95.93	8.66	8.69	640.55	644.01	74.47	74.90
3376	Kota Tegal	68.74	68.93	94.88	94.90	8.25	8.27	650.72	653.11	73.89	74.20

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3500	JAWA TIMUR	69.60	69.86	88.34	88.52	7.24	7.34	643.60	647.46	71.62	72.18
3501	Pacitan	71.26	71.48	91.58	91.60	6.90	6.94	631.40	634.70	72.07	72.48
3502	Ponorogo	69.93	70.24	85.73	87.32	6.68	6.99	636.80	638.25	70.29	71.15
3503	Trenggalek	71.62	71.87	92.83	92.84	7.24	7.26	637.10	640.56	73.24	73.66
3504	Tulungagung	71.48	71.72	93.55	93.58	7.84	7.85	631.55	635.15	73.34	73.76
3505	Blitar	70.88	71.09	92.00	92.02	7.35	7.36	649.38	652.75	73.67	74.06
3506	Kediri	69.66	69.90	92.81	92.84	7.60	7.69	628.59	632.75	71.75	72.28
3507	Malang	68.96	69.23	89.55	89.59	6.80	7.02	634.85	639.07	70.54	71.17
3508	Lumajang	67.17	67.46	86.32	86.56	6.10	6.41	628.60	632.28	67.82	68.55
3509	Jember	62.84	63.03	83.48	83.60	6.53	6.73	626.60	630.48	64.95	65.53
3510	Banyuwangi	67.58	67.98	86.66	87.36	6.85	6.89	631.30	635.02	68.89	69.58
3511	Bondowoso	63.23	63.54	76.72	78.25	5.54	5.66	626.74	630.22	62.94	63.81
3512	Situbondo	63.19	63.36	78.24	78.27	6.18	6.19	633.58	637.51	64.26	64.67
3513	Probolinggo	61.13	61.42	78.91	80.44	5.57	5.80	636.00	638.17	62.99	63.84
3514	Pasuruan	64.01	64.31	89.99	90.03	6.34	6.54	635.84	639.73	67.61	68.24
3515	Sidoarjo	70.55	70.79	97.42	97.76	9.84	9.85	646.97	651.31	76.35	76.90
3516	Mojokerto	70.19	70.42	94.11	94.12	7.81	7.82	640.19	644.82	73.39	73.89
3517	Jombang	70.09	70.18	92.52	92.87	7.77	7.84	636.99	640.42	72.70	73.14
3518	Nganjuk	68.89	69.11	90.48	91.07	7.19	7.44	631.90	635.57	70.76	71.48
3519	Madiun	68.90	69.07	89.53	89.55	7.38	7.39	625.21	627.94	70.18	70.50
3520	Magetan	71.17	71.41	90.54	90.56	7.57	7.60	637.09	640.82	72.72	73.17
3521	Ngawi	69.91	70.24	85.14	85.54	6.36	6.99	622.75	624.99	68.82	69.73
3522	Bojonegoro	67.15	67.28	84.78	84.81	6.66	6.68	616.11	620.17	66.92	67.32
3523	Tuban	67.78	68.00	85.79	85.83	6.41	6.49	629.13	631.85	68.31	68.71
3524	Lamongan	68.20	68.37	87.15	88.71	7.19	7.46	631.84	634.92	69.63	70.52
3525	Gresik	70.98	71.22	94.47	94.56	8.53	8.84	640.59	644.70	74.47	75.17
3526	Bangkalan	63.32	63.48	82.84	82.87	5.16	5.30	632.41	636.44	64.51	65.01
3527	Sampang	63.00	63.49	66.03	67.56	3.95	4.20	632.47	636.12	59.70	60.78
3528	Pamekasan	63.99	64.39	80.84	81.82	6.11	6.32	625.49	629.18	64.60	65.48
3529	Sumenep	64.71	64.89	78.64	78.66	5.63	5.64	644.19	648.05	65.60	66.01
3571	Kota Kediri	70.41	70.64	97.53	97.56	10.20	10.21	643.35	648.01	76.28	76.79
3572	Kota Blitar	72.23	72.51	97.24	97.27	9.72	9.75	650.38	654.18	77.42	77.89
3573	Kota Malang	70.32	70.68	97.20	97.24	10.83	10.84	650.75	655.22	77.20	77.76
3574	Kota Probolinggo	70.17	70.52	92.49	92.51	8.52	8.53	650.48	654.52	74.33	74.85
3575	Kota Pasuruan	66.37	66.41	96.41	96.43	8.85	8.96	651.93	656.21	73.45	73.89
3576	Kota Mojokerto	71.56	71.78	97.12	97.13	9.97	9.98	648.01	652.47	77.02	77.50
3577	Kota Madiun	71.01	71.22	97.79	97.80	10.43	10.44	640.32	644.61	76.61	77.07
3578	Kota Surabaya	71.01	71.27	98.06	98.07	9.95	10.08	652.80	657.14	77.28	77.85
3579	Kota Batu	69.44	69.72	98.26	98.27	8.51	8.52	640.75	644.73	74.45	74.93

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3400	D I YOGYAKARTA	73.22	73.27	90.84	91.49	9.07	9.20	646.56	650.16	75.77	76.32
3401	Kulon Progo	74.38	74.48	90.69	92.00	8.20	8.37	630.38	631.42	74.49	75.04
3402	Bantul	71.31	71.33	91.03	91.23	8.82	8.92	646.08	651.17	74.53	75.05
3403	Gunung Kidul	70.97	71.01	84.66	84.94	7.65	7.70	625.20	628.73	70.45	70.84
3404	Sleman	75.06	75.18	92.61	93.44	10.30	10.51	647.84	650.27	78.20	78.79
3471	Kota Yogyakarta	73.44	73.48	98.03	98.07	11.48	11.52	649.71	653.79	79.52	79.89
3600	BANTEN	64.90	65.05	96.20	96.25	8.32	8.41	629.70	633.64	70.48	70.95
3601	Pandeglang	63.77	63.95	96.35	96.37	6.47	6.81	626.73	628.41	68.29	68.77
3602	Lebak	63.28	63.35	94.60	94.82	6.24	6.25	629.44	632.21	67.67	67.98
3603	Tangerang	65.79	65.90	95.78	95.86	8.94	8.95	635.19	637.80	71.76	72.05
3604	Serang	63.51	63.88	95.23	95.72	7.05	7.25	631.19	633.72	68.67	69.33
3671	Kota Tangerang	68.37	68.41	98.39	98.41	9.98	10.04	643.18	645.90	75.17	75.44
3672	Kota Cilegon	68.58	68.62	98.72	98.73	9.67	9.68	645.43	648.88	75.29	75.60
3673	Kota Serang	65.13	65.47	96.47	96.89	7.51	8.01	636.77	639.17	70.61	71.45
3674	Kota Tangerang Selatan	68.54	68.65	98.15	98.19	10.15	10.70	643.75	645.78	75.38	76.01
5100	BALI	70.72	70.78	88.40	89.17	8.21	8.35	634.67	637.86	72.28	72.84
5101	Jembrana	71.80	71.88	89.82	90.69	7.80	7.81	632.03	635.24	72.69	73.18
5102	Tabanan	74.43	74.49	89.62	90.82	8.00	8.37	636.02	637.26	74.57	75.24
5103	Badung	71.80	71.85	92.92	92.96	9.38	9.45	638.13	641.27	75.02	75.35
5104	Gianyar	72.12	72.17	85.72	86.81	8.07	8.37	639.47	642.18	72.73	73.43
5105	Klungkung	69.10	69.15	82.09	82.39	7.11	7.35	652.50	655.28	70.54	71.02
5106	Bangli	71.64	71.73	83.80	85.64	6.63	6.66	636.02	639.00	70.71	71.42
5107	Karangasem	67.90	67.95	72.40	74.12	5.81	5.82	648.11	651.11	66.42	67.07
5108	Buleleng	69.15	69.34	88.46	88.63	7.29	7.36	634.02	637.03	70.69	71.12
5171	Kota Denpasar	73.01	73.06	97.33	97.49	10.65	10.70	642.36	645.85	77.94	78.31

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5200	NUSA TENGGARA BARAT	62.11	62.41	81.05	83.24	6.77	6.97	639.89	642.80	65.20	66.23
5201	Lombok Barat	60.84	61.28	76.42	77.62	5.89	6.09	625.47	627.24	61.71	62.50
5202	Lombok Tengah	61.09	61.52	71.48	72.88	5.65	5.99	627.56	629.26	60.73	61.66
5203	Lombok Timur	60.75	61.32	80.02	82.89	6.33	6.61	624.06	625.27	62.68	63.93
5204	Sumbawa	60.72	60.82	89.78	90.85	7.21	7.35	631.70	634.41	66.07	66.67
5205	Dompu	61.05	61.16	83.69	86.35	7.32	7.71	638.52	641.82	65.51	66.70
5206	Bima	62.93	63.24	85.87	86.23	7.26	7.38	615.04	617.95	65.18	65.74
5207	Sumbawa Barat	61.28	61.45	90.75	91.47	7.23	7.52	629.89	631.73	66.47	67.08
5208	Lombok Utara	60.56	60.94	71.27	76.97	5.17	5.60	613.55	615.90	58.96	60.93
5271	Kota Mataram	66.64	67.13	91.82	91.85	9.21	9.22	645.13	648.01	72.32	72.83
5272	Kota Bima	62.98	63.10	93.74	93.77	9.39	9.71	615.28	618.42	68.56	69.10
5300	NUSA TENGGARA TIMUR	67.50	67.76	88.59	88.74	6.99	7.05	603.75	607.31	67.26	67.75
5301	Sumba Barat	65.00	65.38	80.40	80.42	6.42	6.44	606.67	609.67	63.85	64.31
5302	Sumba Timur	61.94	62.13	83.20	84.45	6.11	6.26	597.05	599.77	61.80	62.50
5303	Kupang	65.45	65.69	89.02	89.23	6.85	7.44	602.43	604.41	66.00	66.77
5304	Timor Tengah Selatan	66.90	67.08	84.38	84.39	6.61	6.67	606.71	609.56	65.93	66.29
5305	Timor Tengah Utara	68.32	68.75	87.75	87.78	6.77	6.83	605.46	607.45	67.49	67.93
5306	Belu	66.00	66.35	83.07	83.08	6.33	6.34	599.00	601.69	64.34	64.75
5307	Alor	66.92	67.25	95.98	95.99	7.42	7.46	598.50	601.34	68.48	68.92
5308	Lembata	66.58	66.73	92.77	92.79	6.83	6.97	605.20	607.98	67.66	68.07
5309	Flores Timur	68.12	68.43	89.35	90.16	6.62	6.64	612.67	614.82	68.18	68.71
5310	Sikka	69.01	69.32	91.72	91.73	6.36	6.37	597.95	600.10	67.87	68.22
5311	Ende	64.82	65.05	93.52	93.96	7.38	7.39	603.27	606.31	67.11	67.58
5312	Ngada	67.16	67.31	95.49	96.23	7.26	7.62	612.31	614.40	69.45	70.13
5313	Manggarai	67.29	67.51	91.08	92.25	6.76	6.79	599.22	602.27	67.16	67.81
5314	Rote Nda	67.91	68.32	89.00	89.02	6.43	6.45	591.00	593.39	66.18	66.61
5315	Manggarai Barat	66.38	66.61	88.77	90.50	6.54	6.56	590.61	593.75	65.33	66.09
5316	Sumba Barat Daya	63.63	63.89	72.16	72.35	5.90	5.93	608.25	611.06	60.99	61.42
5317	Sumba Tengah	62.74	62.93	75.57	75.59	5.22	5.32	608.93	612.02	60.80	61.22
5318	Nageko	63.53	63.70	94.02	94.08	6.96	6.97	604.74	606.92	66.31	66.59
5319	Manggarai Timur	67.57	67.84	91.09	92.39	6.49	6.50	583.65	585.95	65.92	66.55
5320	Sabu Raijua	67.22	67.57	75.29	75.58	5.20	5.40	509.33	511.60	55.54	56.12
5371	Kota Kupang	72.63	73.04	98.52	98.54	11.06	11.07	629.51	631.56	77.31	77.71

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6100	KALIMANTAN BARAT	66.60	66.75	90.26	90.51	6.82	6.89	631.65	635.85	69.15	69.66
6101	Sambas	61.27	61.48	90.55	91.55	5.94	6.20	623.02	627.35	64.93	65.80
6102	Bengkayang	68.84	68.97	88.71	88.72	6.32	6.50	604.11	606.88	67.55	67.98
6103	Landak	65.46	65.70	91.48	92.51	7.07	7.26	613.22	614.58	67.55	68.16
6104	Pontianak	67.24	67.30	89.91	89.94	6.53	6.56	625.72	629.01	68.75	69.07
6105	Sanggau	68.49	68.74	89.96	89.98	6.49	6.51	614.37	617.76	68.55	68.97
6106	Ketapang	67.45	67.66	90.20	91.36	6.30	6.42	614.43	617.92	67.89	68.63
6107	Sintang	68.32	68.53	90.46	90.54	6.59	6.65	609.98	613.68	68.31	68.77
6108	Kapuas Hulu	66.58	66.67	92.61	92.64	7.16	7.18	633.25	636.89	70.03	70.38
6109	Sekadau	67.34	67.37	89.17	90.15	6.32	6.34	606.31	609.84	66.99	67.52
6110	Melawai	67.76	67.82	92.37	92.40	7.22	7.25	607.26	610.77	68.67	69.01
6111	Kayong Utara	65.67	65.84	88.28	88.31	5.67	5.73	606.32	609.13	65.38	65.75
6112	Kubu Raya	66.30	66.37	88.25	88.30	6.57	6.68	621.30	626.22	67.56	68.06
6171	Kota Pontianak	67.22	67.40	94.97	95.02	9.36	9.45	638.64	642.47	72.96	73.43
6172	Kota Singkawang	67.21	67.34	89.66	89.69	7.40	7.44	619.65	622.81	68.86	69.21
6200	KALIMANTAN TENGAH	71.20	71.30	97.78	97.84	8.03	8.06	636.47	640.73	74.64	75.06
6201	Kotawaringin Barat	71.47	71.61	94.93	94.96	7.71	7.74	634.83	638.61	73.79	74.19
6202	Kotawaringin Timur	69.56	69.70	98.72	98.73	8.03	8.04	641.69	645.79	74.34	74.74
6203	Kapuas	70.78	70.90	97.19	97.21	7.32	7.34	634.51	638.56	73.60	74.00
6204	Barito Selatan	68.28	68.35	98.97	98.98	8.43	8.45	636.69	641.39	73.60	74.01
6205	Barito Utara	72.04	72.20	98.20	98.24	8.38	8.39	632.41	635.63	75.15	75.50
6206	Sukamara	67.85	67.92	95.57	95.59	7.09	7.18	641.43	645.77	71.98	72.42
6207	Lamandau	67.21	67.29	98.66	98.67	7.63	7.73	636.44	640.25	72.32	72.74
6208	Seruyan	67.99	68.04	99.31	99.32	7.76	7.77	630.75	635.21	72.55	72.93
6209	Katingan	67.50	67.60	99.47	99.48	7.99	8.35	632.80	637.39	72.65	73.32
6210	Pulang Pisau	67.56	67.65	94.32	96.23	7.31	7.65	639.16	640.75	71.53	72.37
6211	Gunung Mas	67.96	68.10	99.60	99.64	8.75	8.77	631.92	634.55	73.43	73.73
6212	Barito Timur	67.85	67.92	97.98	98.00	8.54	8.62	633.90	636.79	73.00	73.33
6213	Murung Raya	68.11	68.18	99.94	99.95	7.35	7.38	635.61	641.36	72.84	73.34
6271	Kota Palangka Raya	73.39	73.50	99.48	99.51	10.55	10.57	639.04	644.21	78.30	78.78

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6300	KALIMANTAN SELATAN	63.81	64.17	95.94	96.14	7.65	7.68	637.46	640.73	69.92	70.44
6301	Tanah Laut	68.39	68.75	93.89	95.12	6.88	7.26	633.74	634.93	71.16	72.00
6302	Kota Baru	65.46	65.81	94.03	94.05	7.03	7.07	653.60	656.99	71.20	71.69
6303	Banjar	65.25	65.68	96.03	96.06	7.25	7.26	643.94	645.99	70.94	71.35
6304	Barito Kuala	61.86	62.31	93.03	94.15	7.07	7.15	634.53	637.93	67.54	68.36
6305	Tapin	67.22	67.48	95.70	95.72	7.12	7.15	627.15	630.54	70.58	71.00
6306	Hulu Sungai Selatan	63.95	64.32	96.77	96.80	7.35	7.36	648.81	650.70	70.83	71.20
6307	Hulu Sungai Tengah	65.28	65.65	97.42	97.43	7.44	7.47	635.57	638.16	70.77	71.19
6308	Hulu Sungai Utara	63.07	63.47	95.99	96.02	7.27	7.48	632.92	635.19	68.89	69.45
6309	Tabalong	63.08	63.36	96.01	96.47	8.14	8.15	638.85	641.15	70.00	70.45
6310	Tanah Bumbu	64.94	65.36	94.72	94.75	7.12	7.33	635.59	639.13	69.74	70.41
6311	Balangan	61.73	62.02	94.92	95.66	6.97	7.00	620.65	624.05	66.74	67.35
6371	Kota Banjarmasin	66.14	66.36	98.70	98.72	9.56	9.57	645.20	648.60	73.84	74.24
6372	Kota Banjar Baru	67.48	67.76	98.22	98.95	9.85	10.06	645.87	648.59	74.74	75.43
6400	KALIMANTAN TIMUR	71.20	71.40	97.05	97.21	8.87	9.19	642.51	646.01	75.56	76.22
6401	Pasir	73.09	73.44	96.00	96.70	7.85	8.08	629.93	632.84	74.66	75.40
6402	Kutai Barat	70.16	70.39	95.97	96.60	7.80	8.20	628.83	631.67	72.90	73.69
6403	Kutai	67.93	68.05	96.87	97.31	8.33	8.57	637.10	640.73	72.89	73.51
6404	Kutai Timur	68.61	68.82	97.28	98.25	7.86	8.15	624.58	628.24	72.05	72.88
6405	Berau	69.92	70.18	97.18	97.20	8.13	8.58	636.08	639.99	73.84	74.63
6406	Malinau	68.33	68.47	92.94	92.96	7.76	8.25	647.91	650.07	72.65	73.26
6407	Bulongan	72.90	73.11	95.56	95.61	8.11	8.15	635.92	639.50	75.11	75.54
6408	Nunukan	71.54	71.77	94.35	94.56	7.42	7.47	640.11	643.63	73.89	74.38
6409	Penajam Paser Utara	71.46	71.63	95.55	95.57	7.66	7.68	630.91	635.20	73.59	74.03
6410	Tana Tidung	72.64	72.70	89.05	89.08	7.10	7.24	618.43	622.47	71.42	71.87
6471	Kota Balikpapan	72.17	72.39	98.76	98.78	10.08	10.26	654.78	658.23	78.33	78.85
6472	Kota Samarinda	71.21	71.42	98.01	98.02	9.80	10.06	649.93	653.50	77.05	77.63
6473	Kota Tarakan	71.74	71.96	97.97	97.99	9.36	9.43	646.54	650.08	76.74	77.19
6474	Kota Bontang	72.42	72.60	99.20	99.21	10.04	10.38	633.43	636.97	76.88	77.52

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7100	SULAWESI UTARA	72.22	72.33	99.45	99.46	8.89	8.92	634.88	639.57	76.09	76.54
7101	Bolaang Mongondow	71.58	71.70	98.29	98.31	7.39	7.41	617.02	622.05	72.99	73.47
7102	Minahasa	72.47	72.54	99.71	99.72	9.20	9.22	624.74	629.01	75.74	76.12
7103	Kep. Sangihe Talaud	73.01	73.19	98.70	98.73	7.71	7.73	636.09	640.88	75.58	76.07
7104	Kepulauan Talaud	71.89	72.12	99.53	99.56	8.75	8.78	628.16	632.03	75.30	75.76
7105	Minahasa Selatan	72.28	72.41	99.78	99.80	8.75	8.76	616.43	620.80	74.68	75.10
7106	Minahasa Utara	72.60	72.73	99.74	99.77	9.37	9.38	626.56	631.45	76.08	76.54
7107	Bolaang Mongondow Utara	69.91	70.06	98.39	98.42	7.31	7.42	624.89	628.48	72.63	73.08
7108	Minahasa Tenggara	70.03	70.10	99.48	99.51	8.39	8.40	611.42	615.70	72.71	73.09
7109	Kep. Siau Tagulandang Biaro	68.62	68.71	99.76	99.77	8.45	8.47	627.98	632.24	73.30	73.70
7110	Bolaang Mongondow Selatan	71.29	71.34	98.32	98.33	6.29	6.50	595.40	599.68	70.36	70.87
7111	Bolaang Mongondow Timur	71.35	71.42	99.51	99.55	6.72	7.10	612.19	617.08	72.27	72.97
7171	Manado	72.64	72.70	99.86	99.91	10.60	10.83	639.30	643.59	78.02	78.57
7172	Kota Bitung	70.50	70.59	99.38	99.41	9.42	9.44	634.89	639.65	75.52	75.96
7173	Kota Tomohon	72.62	72.78	99.84	99.85	9.89	10.00	624.98	629.78	76.39	76.92
7174	Kota Kotamobago	71.80	71.96	99.62	99.65	9.12	9.14	627.95	632.84	75.53	76.03
7200	SULAWESI TENGAH	66.60	66.86	96.08	96.12	8.00	8.03	629.30	633.31	71.14	71.62
7201	Banggai Kepulauan	63.85	64.35	94.93	95.07	7.57	7.92	610.85	612.21	67.61	68.28
7202	Banggai	68.51	68.74	95.94	95.96	7.95	7.97	619.31	623.70	71.35	71.84
7203	Morowali	65.55	65.73	97.44	97.46	8.02	8.18	630.40	634.22	70.95	71.47
7204	Poso	64.96	65.20	97.90	97.94	8.76	8.78	617.50	621.11	70.28	70.71
7205	Donggala	65.27	65.64	94.66	94.69	7.52	7.54	630.10	634.07	69.78	70.32
7206	Toli-Toli	64.26	64.49	95.34	95.36	7.42	7.84	620.07	623.67	68.53	69.25
7207	Buol	65.38	65.62	98.64	98.67	8.25	8.27	610.82	615.15	69.79	70.27
7208	Parigi Moutong	65.16	65.47	93.93	93.96	7.12	7.16	624.45	627.58	68.83	69.28
7209	Tojo Una-Una	63.87	64.04	97.50	97.54	7.90	7.91	615.94	620.36	68.83	69.28
7210	Sigi	65.36	65.62	96.40	96.55	7.99	8.04	591.65	596.03	67.61	68.16
7271	Kodya Palu	69.99	70.26	99.25	99.31	10.97	10.98	635.57	640.03	76.40	76.92

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7300	SULAWESI SELATAN	70.00	70.20	87.75	88.07	7.84	7.92	636.60	640.30	71.62	72.14
7301	Selayar	67.74	67.88	89.23	90.86	6.95	7.07	627.69	629.31	69.34	70.00
7302	Bulukumba	71.94	72.13	85.35	85.45	6.97	7.11	632.43	636.96	71.19	71.77
7303	Bantaeng	73.60	73.96	78.98	79.03	5.97	6.10	634.22	637.55	70.10	70.66
7304	Jeneponto	65.00	65.15	77.27	77.31	6.20	6.23	631.74	634.85	64.92	65.27
7305	Takalar	69.52	69.89	81.80	81.85	6.42	6.46	632.01	634.87	68.62	69.09
7306	Gowa	71.61	71.78	81.92	82.32	6.83	7.23	639.23	641.00	70.67	71.29
7307	Sinjai	71.99	72.24	86.45	86.59	6.74	7.07	609.50	612.34	69.53	70.16
7308	Maros	72.30	72.76	82.97	83.10	6.62	6.90	639.12	640.74	71.12	71.74
7309	Pangkajene Kepulauan	68.79	68.96	87.55	87.59	6.73	6.94	628.26	630.79	69.43	69.89
7310	Barru	68.85	69.05	89.23	89.25	7.61	7.62	632.98	635.74	70.86	71.19
7311	Bone	69.73	70.00	84.86	86.41	6.70	6.72	639.16	640.31	70.17	70.77
7312	Soppeng	71.63	71.74	86.67	86.71	7.25	7.28	637.16	640.46	71.89	72.23
7313	Wajo	70.94	71.37	83.53	84.97	6.22	6.51	639.49	640.11	70.22	71.04
7314	Sidenreng Rappang	72.50	72.81	89.63	89.77	7.25	7.27	628.61	630.64	72.37	72.74
7315	Pinrang	72.06	72.28	89.90	91.48	7.61	7.62	638.49	639.83	73.21	73.80
7316	Enrekang	74.99	75.19	90.44	90.49	8.30	8.32	626.63	628.53	74.55	74.84
7317	Luwu	73.70	74.04	91.48	91.63	7.74	7.80	630.71	633.08	73.98	74.42
7318	Tana Toraja	74.17	74.22	86.28	87.76	7.70	7.74	614.99	615.84	71.84	72.29
7322	Luwu Utara	71.56	71.68	92.36	92.86	7.46	7.49	650.85	653.06	74.32	74.69
7325	Luwu Timur	70.95	71.06	93.24	93.28	8.17	8.18	626.03	629.17	72.79	73.11
7326	Toraja Utara	73.54	73.58	83.80	83.83	7.22	7.67	601.89	604.71	69.56	70.15
7371	Kota Makassar	73.59	73.82	96.79	96.82	10.82	10.85	649.12	651.28	78.79	79.11
7372	Kota Pare Pare	74.27	74.49	97.16	97.17	9.63	9.76	641.55	644.04	77.78	78.19
7373	Kota Palopo	72.47	72.59	97.33	97.34	10.03	10.04	634.17	637.12	76.55	76.85
7400	SULAWESI TENGGARA	67.80	68.00	91.85	91.95	8.11	8.21	616.99	621.44	70.00	70.55
7401	Buton	68.58	68.93	86.57	86.60	6.72	6.93	624.45	626.92	68.80	69.34
7402	Muna	65.97	66.07	87.97	87.99	7.43	7.45	614.94	620.46	67.45	67.95
7403	Konawe/Kab Kendari	67.28	67.55	94.61	94.66	8.34	8.55	607.72	612.01	69.77	70.42
7404	Kolaka	67.13	67.38	93.25	93.27	7.90	8.08	630.68	635.29	70.83	71.46
7405	Konawe Selatan	67.63	67.78	94.12	94.13	7.63	7.65	608.83	612.53	69.42	69.80
7406	Bombana	67.71	67.91	89.28	89.31	6.82	7.12	601.24	605.24	67.20	67.85
7407	Wakatobi	68.07	68.18	89.86	90.37	6.89	7.59	596.29	598.19	67.20	68.04
7408	Kolaka Utara	65.55	65.69	93.07	93.58	7.55	7.57	621.28	623.79	68.93	69.33
7409	Buton Utara	68.28	68.60	87.02	88.25	8.02	8.03	603.44	607.64	68.07	68.86
7410	Konawe Utara	67.05	67.34	93.81	93.82	7.08	7.70	605.70	608.82	68.38	69.24
7471	Kota Kendari	69.09	69.17	98.60	98.63	11.25	11.37	631.54	635.17	75.66	76.07
7472	Kota Bau-Bau	70.39	70.69	95.58	95.60	9.84	9.87	616.11	621.67	73.48	74.10

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7500	GORONTALO	66.81	67.11	96.00	96.10	7.38	7.45	622.92	626.77	70.28	70.82
7501	Boalemo	68.04	68.30	95.69	95.72	6.56	6.57	602.17	606.20	68.69	69.16
7502	Gorontalo	68.63	69.09	94.93	94.96	6.86	6.89	615.15	618.65	70.07	70.63
7503	Pokuwato	67.66	67.88	97.05	97.07	6.46	6.67	616.01	619.97	69.77	70.36
7504	Bone Bolango	68.56	68.90	97.41	97.44	7.78	7.85	620.89	624.35	71.71	72.22
7505	Gorontalo Utara	66.65	67.01	93.84	94.38	6.47	6.50	619.92	622.75	68.81	69.37
7571	Kota Gorontalo	66.80	66.98	99.43	99.45	9.85	10.09	625.75	629.71	73.08	73.67
7600	SULAWESI BARAT	67.80	68.00	88.48	88.54	7.11	7.15	631.76	635.84	69.64	70.11
7601	Majene	65.38	65.70	94.72	94.75	8.40	8.44	640.82	644.81	71.34	71.86
7602	Polewali Mamasa	64.99	65.26	85.92	85.94	6.95	6.96	631.64	635.99	67.38	67.88
7603	Mamasa	71.19	71.31	86.12	87.61	6.95	7.15	630.95	634.34	70.82	71.62
7604	Mamuju	68.51	68.76	89.18	89.23	7.00	7.01	621.51	625.54	69.32	69.78
7605	Mamuju Utara	67.55	67.59	95.57	95.59	7.19	7.22	616.92	621.70	69.99	70.41
8100	MALUKU	67.40	67.60	98.14	98.15	8.76	8.82	614.01	617.75	71.42	71.87
8101	Maluku Tenggara Barat	64.28	64.42	99.63	99.64	8.93	8.96	596.95	600.82	68.83	69.23
8102	Maluku Tenggara	67.99	68.19	99.54	99.58	8.75	8.77	619.17	622.65	72.45	72.85
8103	Maluku Tengah	65.75	65.89	99.09	99.10	8.85	8.86	615.09	618.96	70.86	71.25
8104	Buru	68.05	68.49	92.84	92.85	7.43	7.44	610.63	612.41	69.36	69.75
8105	Kepulauan Aru	67.73	67.94	99.05	99.06	7.56	7.59	603.24	604.60	70.09	70.33
8106	Seram Bagian Barat	66.56	66.68	98.28	98.29	8.29	8.41	601.01	604.56	69.64	70.07
8107	Seram Bagian Timur	65.86	66.07	98.14	98.16	7.83	7.86	590.83	594.63	68.09	68.53
8108	Maluku Barat Daya	64.14	64.35	98.13	98.25	8.01	8.02	582.17	585.23	66.60	66.99
8109	Buru Selatan	67.35	67.58	89.74	89.78	6.64	6.67	624.79	627.19	68.78	69.13
8171	Kota Ambon	73.01	73.16	99.59	99.61	11.18	11.22	638.83	642.52	78.56	78.97
8172	Kota Tual	68.70	69.04	99.70	99.71	9.46	9.86	659.39	660.79	76.51	77.10
8200	MALUKU UTARA	66.01	66.31	96.08	96.19	8.63	8.66	600.20	603.20	69.03	69.47
8201	Halmahera Barat	64.38	64.61	95.71	95.76	7.84	7.87	594.09	597.10	66.99	67.38
8202	Halmahera Tengah	66.58	66.98	96.79	96.81	8.24	8.25	599.03	602.13	69.13	69.60
8203	Kepulauan Sula	65.00	65.36	97.38	97.40	7.99	8.00	596.01	599.15	67.96	68.42
8204	Halmahera Selatan	65.47	65.69	95.83	95.85	7.48	7.69	602.30	605.35	67.98	68.50
8205	Halmahera Utara	65.87	66.19	95.98	96.87	7.38	7.79	599.81	602.54	67.98	68.87
8206	Halmahera Timur	65.32	65.65	95.72	95.74	7.83	7.84	599.26	601.83	67.90	68.30
8207	Pulau Morotai	65.23	65.55	93.89	93.91	6.15	6.25	578.62	581.45	64.61	65.09
8271	Kota Ternate	70.47	70.86	98.95	99.11	10.82	10.83	636.83	639.43	76.58	77.05
8272	Kota Tidore Kepulauan	65.06	65.25	97.62	97.67	8.75	8.79	609.10	611.76	69.62	69.97

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9100	PAPUA BARAT	68.51	68.81	93.19	93.39	8.21	8.26	596.08	599.28	69.15	69.65
9101	Fak-Fak	70.52	70.88	97.46	98.13	9.27	9.37	589.06	592.30	71.46	72.13
9102	Kaimana	69.65	69.88	95.50	96.91	7.55	7.63	600.31	601.27	70.13	70.71
9103	Teluk Wondama	67.51	67.76	84.05	84.18	6.61	6.69	601.00	601.97	65.76	66.06
9104	Teluk Bintuni	68.21	68.54	85.90	87.05	6.90	6.91	598.46	600.33	66.58	67.17
9105	Manokwari	68.00	68.29	87.79	88.77	8.37	8.43	588.30	589.12	67.19	67.67
9106	Sorong Selatan	66.66	66.82	88.32	88.43	7.98	8.06	588.85	590.23	66.31	66.59
9107	Sorong	67.85	68.22	91.69	91.76	8.06	8.09	598.18	600.62	68.50	68.93
9108	Raja Ampat	66.17	66.50	93.62	94.13	7.35	7.43	560.70	562.22	64.58	65.06
9109	Tambrau	66.15	66.31	77.15	77.33	5.74	5.78	441.15	443.07	50.51	50.81
9110	Maybrat	66.33	66.62	90.73	90.87	7.78	8.00	582.12	583.20	66.00	66.43
9171	Kota Sorong	71.95	72.36	99.13	99.14	10.59	10.68	635.48	638.70	77.18	77.72

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPM	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9400	PAPUA	68.60	68.85	75.60	75.81	6.66	6.69	606.38	609.18	64.94	65.36
9401	Merauke	62.76	62.88	87.99	88.22	9.33	9.35	597.46	601.71	65.73	66.19
9402	Jayawijaya	66.42	66.63	52.52	52.76	4.82	4.84	593.50	595.72	56.24	56.60
9403	Jayapura	67.32	67.53	96.65	96.89	9.54	9.56	622.12	626.25	72.25	72.75
9404	Nabire	67.55	67.80	83.59	83.66	6.55	6.78	616.41	618.79	66.81	67.33
9408	Yapen Waropen	68.04	68.55	88.82	89.11	6.58	6.63	634.83	636.30	69.69	70.19
9409	Biak Namfor	66.48	66.75	98.27	98.67	9.55	9.58	593.50	595.16	69.95	70.33
9410	Paniai	67.70	68.00	62.93	62.94	6.21	6.22	588.34	590.27	59.90	60.22
9411	Puncak Jaya	67.62	67.70	86.81	86.82	6.11	6.12	629.72	629.82	68.27	68.34
9412	Mimika	70.20	70.53	87.96	88.19	6.79	6.87	611.86	615.71	69.09	69.68
9413	Boven Digoel	67.03	67.13	32.94	33.25	3.37	3.39	581.19	585.04	50.21	50.64
9414	Mappi	66.18	66.28	31.43	31.46	4.27	4.30	586.21	590.07	50.45	50.83
9415	Asmat	67.22	67.32	31.10	31.13	4.33	4.35	593.31	597.16	51.55	51.92
9416	Yahukimo	66.81	67.09	32.52	32.76	2.47	2.86	584.54	587.40	49.59	50.30
9417	Pegunungan Bintang	65.76	66.00	32.32	32.50	2.46	2.54	585.04	588.02	48.99	49.45
9418	Tolikara	65.95	66.09	33.20	33.44	3.35	3.38	611.64	615.39	52.00	52.43
9419	Sarmi	66.35	66.46	87.55	87.67	6.44	6.55	614.89	616.74	66.84	67.15
9420	Keerom	67.10	67.31	92.15	92.38	7.36	7.39	618.86	621.33	69.26	69.64
9426	Waropen	65.53	65.86	77.11	77.26	6.33	6.37	605.71	608.26	63.27	63.71
9427	Supiori	65.96	66.23	96.19	96.68	8.03	8.08	598.60	600.65	68.46	68.92
9428	Membramo Raya	66.06	66.20	65.04	65.36	5.17	5.20	597.45	601.40	59.39	59.86
9429	Nduga	65.65	65.83	30.53	30.54	2.79	2.80	575.39	579.24	48.02	48.43
9430	Lanny Jaya	66.29	66.49	36.72	36.91	3.70	3.72	568.59	570.21	49.90	50.20
9431	Mamberamo Tengah	66.27	66.44	34.34	34.52	2.90	2.91	570.95	573.80	48.96	49.32
9432	Yalimo	66.35	66.56	33.30	33.51	2.74	2.75	569.66	571.90	48.55	48.90
9433	Puncak	67.44	67.64	32.11	32.13	2.80	2.82	570.40	573.36	49.00	49.35
9434	Dogiyai	67.09	67.27	34.02	34.23	3.87	3.89	570.51	574.37	50.03	50.49
9435	Intan Jaya	66.80	66.83	27.39	27.78	2.07	2.10	588.12	590.70	48.42	48.74
9436	Deiyai	66.59	66.62	28.45	30.12	2.50	2.79	584.45	586.30	48.57	49.31
9471	Kota Jayapura	68.46	68.61	99.58	99.83	11.00	11.03	636.93	641.78	75.76	76.29
0000	Indonesia	69.43	69.65	92.91	92.99	7.92	7.94	633.64	638.05	72.27	72.77

Lampiran 4. IPG Provinsi dan Kabupaten 2010 - 2011

L4

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPG	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		L	P	L	P	L	P	L	P	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1100	ACEH	66.77	70.74	98.19	96.21	9.35	8.65	68.33	31.67	65.30	65.79
1101	Simeulue	61.15	64.92	99.25	98.41	9.09	8.29	77.46	22.54	56.71	57.19
1102	Aceh Singkil	63.05	66.89	99.44	95.26	8.54	7.61	72.26	27.74	59.41	60.03
1103	Aceh Selatan	65.02	68.95	98.49	95.05	8.72	8.09	72.59	27.41	58.97	59.42
1104	Aceh Tenggara	67.30	71.26	99.42	97.04	9.64	9.26	71.09	28.91	63.72	64.22
1105	Aceh Timur	67.82	71.78	99.72	97.54	8.96	8.45	72.64	27.36	61.25	61.82
1106	Aceh Tengah	67.72	71.68	99.73	97.80	9.72	9.62	66.00	34.00	69.43	69.97
1107	Aceh Barat	68.05	72.00	97.76	92.02	8.87	8.06	72.65	27.35	61.11	61.73
1108	Aceh Besar	68.84	72.77	98.48	96.22	10.30	9.57	74.96	25.04	62.05	62.47
1109	Pidie	67.60	71.56	98.60	94.99	9.19	8.31	72.51	27.49	60.87	61.66
1110	Bireuen	70.49	74.33	99.11	98.17	9.50	9.04	63.48	36.52	69.36	69.60
1111	Aceh Utara	67.82	71.78	99.14	96.22	9.78	8.21	67.82	32.18	66.07	66.93
1112	Aceh Barat Daya	65.08	69.01	99.06	95.43	8.23	7.73	73.02	26.98	60.17	61.12
1113	Gayo Lues	65.17	69.10	93.76	86.91	9.82	7.95	66.20	33.80	63.32	64.16
1114	Aceh Tamiang	66.44	70.41	99.73	98.15	8.93	8.60	74.08	25.92	59.50	60.30
1115	Nagan Raya	67.72	71.68	94.50	88.71	8.26	7.25	74.69	25.31	59.30	60.02
1116	Aceh Jaya	66.09	70.07	97.73	92.16	9.45	8.63	60.62	39.38	67.33	67.57
1117	Bener Meriah	65.71	69.67	99.25	97.74	9.32	8.64	72.79	27.21	61.66	61.99
1118	Pidie Jaya	67.32	71.28	97.12	91.95	9.00	8.31	68.02	31.98	64.75	65.38
1171	Kota Banda Aceh	68.98	72.90	99.35	99.06	12.30	12.00	75.47	24.53	65.21	65.99
1172	Kota Sabang	69.12	73.03	99.61	98.73	10.94	10.20	69.67	30.33	67.93	68.56
1173	Kota Langsa	68.67	72.61	99.52	99.10	10.53	10.12	72.64	27.36	62.79	63.22
1174	Kota Lhokseumawe	68.91	72.83	99.69	99.58	10.20	9.93	78.05	21.95	59.87	60.71
1175	Subulussalam	64.00	67.88	98.86	95.58	8.20	7.46	64.33	35.67	65.91	66.77

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPG	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		L	P	L	P	L	P	L	P	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1200	SUMATERA UTARA	67.58	71.54	99.00	96.27	9.19	8.57	65.06	34.94	69.63	70.34
1201	Nias	67.68	71.64	96.07	85.40	7.77	6.14	53.77	46.23	68.42	69.00
1202	Mandailing Natal	61.77	65.57	99.64	98.80	8.22	7.77	56.35	43.65	69.54	70.22
1203	Tapanuli Selatan	65.16	69.10	99.87	99.70	9.15	8.70	53.19	46.81	73.38	73.96
1204	Tapanuli Tengah	66.18	70.16	98.39	94.89	8.95	7.69	58.58	41.42	69.62	70.29
1205	Tapanuli Utara	67.78	71.73	99.74	98.58	9.86	8.58	53.55	46.45	74.16	74.77
1206	Toba Samosir	68.77	72.70	99.68	97.44	10.47	9.68	57.29	42.71	74.78	75.21
1207	Labuhan Batu	67.82	71.77	99.43	97.44	8.98	8.29	70.43	29.57	67.00	67.55
1208	Asahan	67.06	71.02	98.98	96.69	8.24	7.74	75.48	24.52	60.38	61.13
1209	Simalungun	67.04	71.00	99.30	96.22	9.14	8.36	66.21	33.79	68.28	68.99
1210	Dairi	66.47	70.44	99.43	97.17	9.16	8.36	50.85	49.15	72.72	73.19
1211	Karo	70.32	74.17	99.76	98.13	9.27	9.18	56.83	43.17	74.60	75.13
1212	Deli Serdang	68.74	72.68	99.62	97.64	9.61	8.86	74.21	25.79	63.92	64.70
1213	Langkat	67.15	71.11	99.19	95.51	8.97	8.23	71.62	28.38	64.48	65.07
1214	Nias Selatan	68.09	72.04	87.58	83.61	7.49	5.74	66.44	33.56	62.01	62.52
1215	Humbang Hasundutan	65.94	69.92	99.71	96.80	9.62	8.46	51.43	48.57	71.49	71.91
1216	Pakpak Barat	65.67	69.63	99.53	94.79	8.72	8.11	53.02	46.98	70.60	70.94
1217	Samosir	67.81	71.77	99.68	95.70	9.74	9.32	50.53	49.47	73.38	73.96
1218	Serdang Bedagai	67.06	71.02	99.26	96.54	8.95	8.35	70.67	29.33	64.53	65.14
1219	Batu Bara	66.66	70.63	97.83	93.43	8.70	7.21	64.90	35.10	68.63	69.18
1220	Padang Lawas Utara	64.67	68.59	99.80	98.73	9.02	8.48	56.65	43.35	71.45	71.88
1221	Padang Lawas	65.12	69.05	99.54	99.78	8.45	7.95	60.75	39.25	69.70	70.32
1222	Labuhan Batu Selatan	68.03	71.99	99.77	98.07	8.54	7.90	68.40	31.60	67.43	68.32
1223	Labuhan Batu Utara	67.70	71.66	99.16	96.57	8.25	7.76	78.54	21.46	57.81	58.63
1224	Nias Utara	67.23	71.19	94.26	82.97	7.29	5.05	56.70	43.30	66.55	66.99
1225	Nias Barat	67.23	71.19	90.27	79.13	6.89	4.65	50.71	49.29	66.04	66.62
1271	Kota Sibolga	68.31	72.26	99.78	98.94	10.02	9.63	69.20	30.80	67.79	68.62
1272	Kota Tanjung Balai	68.52	72.46	99.68	98.68	8.97	8.72	78.18	21.82	58.51	59.34
1273	Kota Pematang Siantar	70.29	74.14	99.91	99.42	11.25	10.42	65.52	34.48	71.33	71.67
1274	Kota Tebing Tinggi	69.44	73.34	99.87	98.21	10.06	9.78	70.59	29.41	67.78	68.55
1275	Kota Medan	70.03	73.90	99.92	99.03	10.96	10.52	70.42	29.58	68.79	69.59
1276	Kota Binjai	69.89	73.76	99.61	99.09	10.30	9.74	65.88	34.12	71.21	71.67
1277	Kota Padang Sidempuan	67.67	71.63	99.75	99.53	10.53	9.88	71.92	28.08	64.94	65.81
1278	Gunung Sitoli	68.03	71.98	98.28	91.24	8.91	7.07	60.54	39.46	67.90	68.81

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPG	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		L	P	L	P	L	P	L	P	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1300	SUMATERA BARAT	67.58	71.54	98.45	96.43	8.68	8.43	65.84	34.16	68.50	69.55
1301	Kepulauan Mentawai	66.52	70.49	96.34	90.86	7.54	6.45	71.95	28.05	61.33	62.03
1302	Pesisir Selatan	65.39	69.34	96.82	92.91	8.26	7.99	66.95	33.05	65.11	65.79
1303	Solok	64.70	68.61	98.13	96.29	8.06	7.74	64.04	35.96	66.80	68.03
1304	Sawah Lunto/Sijunjung	65.01	68.94	96.91	92.00	7.73	7.32	74.35	25.65	59.53	60.50
1305	Tanah Datar	69.04	72.96	98.24	96.73	8.45	8.11	68.35	31.65	66.67	67.44
1306	Padang Pariaman	66.72	70.69	96.69	93.12	7.68	7.03	70.19	29.81	62.93	63.90
1307	Agam	67.11	71.08	98.97	97.22	8.65	8.05	61.16	38.84	69.44	70.11
1308	Limapuluh Koto	66.52	70.49	99.05	96.80	8.12	7.79	75.43	24.57	59.03	60.14
1309	Pasaman	65.52	69.47	99.35	97.65	7.90	7.52	65.17	34.83	67.82	68.73
1310	Solok Selatan	62.75	66.58	99.06	96.90	7.93	7.74	66.89	33.11	63.67	64.45
1311	Dharmas Raya	64.11	68.00	98.55	95.99	8.45	7.59	74.31	25.69	58.27	59.22
1312	Pasaman Barat	63.28	67.13	98.77	96.53	8.04	7.36	66.37	33.63	65.29	66.27
1371	Kota Padang	68.99	72.91	99.89	99.27	10.99	10.75	69.76	30.24	70.34	71.41
1372	Kota Solok	67.77	71.72	99.06	98.03	10.30	10.52	66.64	33.36	69.51	70.28
1373	Kota Sawah Lunto	69.77	73.65	98.99	98.26	9.68	9.07	72.79	27.21	62.74	63.63
1374	Kota Padang Panjang	69.41	73.31	99.76	98.88	10.76	10.35	54.56	45.44	76.55	77.16
1375	Kota Bukit Tinggi	69.65	73.53	99.97	99.77	10.59	10.51	63.90	36.10	73.45	74.42
1376	Kota Payakumbuh	68.70	72.64	99.64	98.58	9.75	9.26	64.98	35.02	70.96	71.63
1377	Kota Pariaman	67.09	71.05	99.42	98.27	10.05	9.60	70.61	29.39	64.79	65.51
1400	RIAU	69.51	73.40	99.16	97.88	8.95	8.40	73.64	26.36	65.71	66.17
1401	Kuantan Sengingi	66.40	70.37	98.71	96.85	8.41	7.66	65.56	34.44	69.21	69.66
1402	Indragiri Hulu	66.88	70.85	98.87	97.32	8.35	7.79	72.48	27.52	64.57	64.98
1403	Indragiri Hilir	69.50	73.39	99.37	98.75	7.97	6.90	71.89	28.11	65.61	66.27
1404	Pelalawan	66.89	70.86	99.06	97.19	8.65	7.72	72.67	27.33	64.40	64.83
1405	Siak	69.81	73.68	99.48	97.20	9.38	8.83	82.08	17.92	58.20	58.85
1406	Kampar	66.59	70.56	99.48	98.26	9.19	8.52	78.29	21.71	59.64	60.56
1407	Rokan Hulu	65.26	69.20	99.51	96.69	8.12	7.51	75.13	24.87	60.71	61.33
1408	Bengkalis	68.44	72.38	99.17	97.36	9.79	8.99	79.36	20.64	58.26	58.86
1409	Rokan Hilir	65.26	69.20	98.91	97.33	7.91	7.73	78.91	21.09	56.59	57.14
1410	Kepulauan Meranti	66.81	70.77	91.95	88.44	7.55	6.81	72.60	27.40	59.35	59.94
1471	Kota Pekanbaru	69.57	73.46	99.93	99.80	11.71	11.12	74.07	25.93	67.51	68.05
1473	Kota Dumai	69.75	73.63	99.82	99.14	9.92	9.49	77.60	22.40	62.62	63.46

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPG	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		L	P	L	P	L	P	L	P	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1500	JAMBI	67.18	71.14	98.15	94.35	8.42	7.66	72.62	27.38	63.32	63.95
1501	Kerinci	68.92	72.85	98.91	93.92	8.81	7.74	59.89	40.11	71.66	72.04
1502	Merangin	66.47	70.44	99.46	94.92	8.21	7.34	60.00	40.00	70.09	70.82
1503	Sarolangun	67.51	71.47	98.31	91.59	7.87	6.90	71.03	28.97	64.32	64.97
1504	Batanghari	67.24	71.20	99.20	96.75	8.49	7.27	67.62	32.38	67.79	68.73
1505	Muara Jambi	67.34	71.30	98.67	94.60	8.22	7.15	66.30	33.70	68.31	68.77
1506	Tanjung Jabung Timur	68.50	72.45	96.41	90.17	6.76	5.82	79.33	20.67	55.45	56.46
1507	Tanjung Jabung Barat	67.78	71.73	99.02	97.40	8.02	7.22	74.98	25.02	62.01	62.52
1508	Tebo	67.19	71.15	97.77	93.57	7.74	7.08	73.60	26.40	61.95	62.46
1509	Bungo	65.35	69.30	98.61	94.65	8.58	7.79	79.15	20.85	55.88	56.49
1571	Kota Jambi	67.95	71.90	99.82	98.21	11.05	9.82	73.64	26.36	65.03	65.65
1572	Kota Sungai Penuh	69.06	72.98	97.91	93.99	9.84	8.89	67.25	32.75	69.08	69.65
1600	SUMATERA SELATAN	67.68	71.64	98.57	96.55	8.14	7.53	69.17	30.83	66.00	66.84
1601	Ogan Komering Ulu	67.48	71.44	99.54	98.08	8.98	7.58	76.33	23.67	59.51	60.20
1602	Ogan Komering Ilir	66.09	70.07	98.27	94.51	7.24	6.48	76.28	23.72	57.81	58.65
1603	Muara Enim (Liot)	65.74	69.70	99.89	98.11	8.09	7.17	65.83	34.17	66.52	67.40
1604	Lahat	66.30	70.28	99.28	96.91	8.56	8.03	62.72	37.28	68.04	68.92
1605	Musi Rawas	62.72	66.55	98.85	95.20	7.26	6.67	76.72	23.28	55.36	56.11
1606	Musi Banyuasin	67.94	71.89	98.72	96.72	7.85	7.37	66.64	33.36	67.56	68.13
1607	Banyuasin	65.49	69.44	98.19	95.82	7.69	6.72	72.00	28.00	61.14	61.98
1608	Ogan Komering Ulu Selatan	67.45	71.41	98.79	97.59	7.64	7.25	76.69	23.31	59.33	60.02
1609	Ogan Komering Ulu Timur	66.43	70.40	97.69	94.11	7.46	6.82	69.95	30.05	62.16	62.76
1610	Ogan Ilir	64.38	68.28	99.39	96.90	8.00	7.09	74.51	25.49	58.32	59.34
1611	Empat Lawang	63.68	67.55	98.68	97.52	7.63	6.99	67.09	32.91	63.80	64.62
1671	Kota Palembang	69.23	73.14	99.75	98.72	10.75	9.88	72.42	27.58	66.64	67.55
1672	Kota Prabumulih	70.04	73.90	99.68	97.77	9.82	8.64	77.79	22.21	60.00	60.92
1673	Kota Pagar Alam	68.26	72.20	99.69	97.16	9.02	8.90	78.79	21.21	57.57	58.67
1674	Kota Lubuk Linggau	63.81	67.68	99.64	97.81	9.57	9.17	73.15	26.85	59.39	60.33
1700	BENGKULU	67.99	71.94	97.61	93.01	8.79	8.04	66.79	33.21	67.79	68.45
1701	Bengkulu Selatan	65.49	69.44	98.16	95.39	9.25	8.14	60.43	39.57	70.25	71.08
1702	Rejang Lebong	65.34	69.28	98.03	93.52	8.57	7.78	76.94	23.06	57.73	58.38
1703	Bengkulu Utara	67.62	71.57	96.41	89.24	8.01	7.33	62.27	37.73	68.68	69.21
1704	Kaur	65.32	69.26	98.80	93.72	8.59	7.28	63.24	36.76	66.60	67.15
1705	Seluma	63.82	67.70	97.48	90.95	8.01	7.29	67.72	32.28	62.08	62.58
1706	Mukomuko	65.88	69.85	97.32	91.34	7.86	7.33	68.01	31.99	64.89	65.43
1707	Lebong	64.75	68.67	98.23	94.19	8.30	7.35	64.00	36.00	67.21	68.07
1708	Kepahiang	62.41	66.23	98.55	94.24	8.06	7.55	65.73	34.27	63.97	64.66
1709	Bengkulu Tengah	68.20	72.15	96.90	87.13	7.68	6.79	60.92	39.08	66.30	67.09
1771	Bengkulu	68.57	72.51	99.76	98.83	11.37	10.76	69.49	30.51	69.96	70.82

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPG	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		L	P	L	P	L	P	L	P	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1800	LAMPUNG	67.58	71.54	97.74	92.75	8.14	7.49	72.23	27.77	63.00	63.50
1801	Lampung Barat	65.23	69.17	98.46	95.72	7.62	7.04	66.76	33.24	64.38	64.94
1802	Tanggamus	67.41	71.37	97.60	93.05	7.64	7.08	73.62	26.38	62.64	63.44
1803	Lampung Selatan	66.51	70.48	97.36	90.31	7.95	7.13	72.44	27.56	61.63	62.12
1804	Lampung Timur	68.31	72.26	97.19	91.63	7.91	7.23	70.26	29.74	64.28	64.93
1805	Lampung Tengah	67.33	71.29	96.21	91.05	7.83	7.10	71.83	28.17	62.74	63.48
1806	Lampung Utara	66.01	69.99	97.97	92.48	8.46	7.64	64.90	35.10	65.55	66.03
1807	Way Kanan	67.53	71.48	97.69	92.33	7.54	7.02	69.76	30.24	63.47	64.28
1808	Tulang Bawang	66.93	70.90	96.49	92.25	7.55	7.08	75.68	24.32	59.54	60.41
1809	Pesawaran	66.47	70.44	98.75	92.35	7.63	7.19	72.47	27.53	61.30	61.91
1810	Pringsewu	66.58	70.55	96.86	91.95	8.83	8.35	80.91	19.09	53.58	54.20
1811	Mesuji	66.39	70.36	95.88	89.55	6.85	6.06	72.45	27.55	58.80	59.43
1812	Tulang Bawang Barat	66.43	70.41	95.00	90.56	7.67	7.26	69.10	30.90	62.39	62.79
1871	Kota Bandar Lampung	68.96	72.89	99.20	97.64	10.49	9.91	69.31	30.69	68.54	69.02
1872	Kota Metro	70.68	74.51	99.50	97.39	10.20	9.77	67.43	32.57	70.56	71.31
1900	KEP. BANGKA BELITUNG	66.98	70.94	98.75	94.89	7.93	7.21	76.51	23.49	60.36	60.79
1901	Bangka	65.72	69.68	98.49	95.10	8.12	7.58	76.70	23.30	59.65	60.08
1902	Belitung	67.25	71.21	98.98	95.64	8.42	7.51	78.89	21.11	58.01	58.32
1903	Bangka Barat	65.85	69.82	96.99	91.03	7.19	6.52	74.65	25.35	59.74	60.25
1904	Bangka Tengah	65.99	69.97	98.79	95.85	7.71	6.78	78.73	21.27	56.46	56.89
1905	Bangka Selatan	65.79	69.76	95.78	91.37	6.78	5.99	81.04	18.96	50.36	51.29
1906	Belitung Timur	66.91	70.87	99.18	96.61	7.88	7.55	76.26	23.74	60.84	61.25
1971	Kota Pangkal Pinang	68.52	72.46	99.90	97.77	10.40	9.40	73.85	26.15	65.70	66.19
2100	KEPULAUAN RIAU	67.88	71.83	98.83	97.06	9.85	9.12	73.35	26.65	63.49	64.69
2101	Karimun	67.99	71.95	97.90	93.11	8.47	7.82	74.15	25.85	60.05	60.87
2102	Bintan	67.80	71.75	97.58	95.28	8.98	8.73	76.58	23.42	58.73	60.16
2103	Natuna	66.38	70.35	97.51	95.05	7.87	7.37	77.25	22.75	56.49	57.40
2104	Lingga	68.25	72.19	94.63	88.57	7.84	6.71	78.59	21.41	55.39	56.31
2105	Kepulauan Anambas	65.48	69.43	92.05	85.93	6.67	6.17	73.21	26.79	57.47	58.33
2171	Kota Batam	68.90	72.83	99.67	98.74	11.04	10.72	72.42	27.58	67.31	68.10
2172	Kota Tanjung Pinang	67.70	71.65	99.21	98.18	10.11	9.56	75.82	24.18	61.61	62.91

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPG	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		L	P	L	P	L	P	L	P	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3100	DKI JAKARTA	71.36	75.14	99.64	98.86	11.22	10.14	63.47	36.53	73.35	74.01
3101	Kep. Seribu	68.64	72.58	99.65	95.74	8.57	7.76	77.37	22.63	57.51	58.56
3171	Kota Jakarta Selatan	71.67	75.43	99.93	98.91	11.45	10.52	65.55	34.45	73.80	74.52
3172	Kota Jakarta Timur	71.50	75.28	99.98	98.87	11.38	10.40	67.02	32.98	73.16	73.69
3173	Kota Jakarta Pusat	70.44	74.28	99.97	99.29	11.13	10.28	62.54	37.46	74.18	74.70
3174	Kota Jakarta Barat	71.61	75.38	99.72	98.24	11.22	9.68	66.61	33.39	72.93	73.38
3175	Kota Jakarta Utara	70.97	74.78	99.85	98.95	11.08	9.65	65.00	35.00	72.46	73.17
3200	JAWA BARAT	66.27	70.25	98.03	94.61	8.42	7.64	72.62	27.38	62.38	63.25
3201	Bogor	66.94	70.90	98.14	93.30	8.21	7.48	74.58	25.42	61.52	62.14
3202	Sukabumi	65.15	69.09	99.27	96.44	7.13	6.45	74.45	25.55	59.40	60.05
3203	Cianjur	64.11	68.00	99.28	97.53	7.14	6.51	80.93	19.07	52.14	52.55
3204	Bandung	67.09	71.06	99.81	98.50	9.01	8.18	68.49	31.51	67.75	68.26
3205	Garut	63.72	67.59	99.34	98.14	7.62	7.09	70.97	29.03	62.91	63.57
3206	Tasikmalaya	66.03	70.01	99.65	98.34	7.71	7.02	74.48	25.52	59.63	60.53
3207	Ciamis	65.37	69.32	99.14	96.76	7.88	7.44	67.61	32.39	65.25	66.15
3208	Kuningan	65.55	69.51	98.41	94.59	7.73	7.12	73.34	26.66	60.19	61.17
3209	Cirebon	63.42	67.28	95.46	88.75	7.40	6.51	74.23	25.77	57.23	57.84
3210	Majalengka	64.46	68.36	98.66	92.86	7.76	6.80	76.66	23.34	56.91	57.82
3211	Sumedang	65.50	69.45	98.86	97.39	8.18	7.81	67.21	32.79	66.66	67.24
3212	Indramayu	64.92	68.84	92.85	77.44	6.97	5.23	81.35	18.65	49.47	50.79
3213	Subang	67.47	71.43	95.53	88.58	7.61	6.38	71.74	28.26	61.99	62.37
3214	Purwakarta	65.15	69.08	98.41	94.81	8.19	7.07	73.76	26.24	62.01	62.40
3215	Karawang	64.79	68.71	96.89	90.84	7.99	6.73	74.15	25.85	59.69	60.58
3216	Bekasi	67.47	71.43	96.98	91.69	9.16	8.02	76.86	23.14	58.85	59.87
3217	Kab Bandung Barat	66.72	70.69	99.37	98.88	8.44	7.80	68.28	31.72	67.72	68.17
3271	Kota Bogor	66.94	70.91	99.16	98.07	10.94	8.98	71.53	28.47	66.43	67.13
3272	Kota Sukabumi	67.52	71.47	99.93	99.36	9.89	9.32	74.26	25.74	62.87	63.63
3273	Kota Bandung	67.80	71.75	99.96	99.64	10.84	10.10	68.12	31.88	69.08	69.65
3274	Kota Cirebon	66.57	70.54	99.54	97.02	10.81	9.29	69.99	30.01	67.01	67.58
3275	Kota Bekasi	67.72	71.67	99.83	98.37	11.22	10.16	73.07	26.93	65.86	66.46
3276	Kota Depok	71.25	75.05	99.84	98.50	11.90	10.54	69.18	30.82	71.94	72.68
3277	Kota Cimahi	67.26	71.22	99.95	99.70	11.16	10.29	69.07	30.93	66.78	67.40
3278	Kota Tasikmalaya	67.94	71.89	99.85	99.28	9.33	8.44	69.40	30.60	67.44	68.11
3279	Kota Banjar	64.37	68.27	98.67	96.17	8.67	7.79	75.79	24.21	58.72	59.40

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPG	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		L	P	L	P	L	P	L	P	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3300	JAWA TENGAH	69.51	73.40	94.42	86.50	7.73	6.78	67.67	32.33	65.79	66.45
3301	Cilacap	68.91	72.83	95.36	87.67	7.38	6.36	76.46	23.54	58.41	59.37
3302	Banyumas	67.80	71.76	97.85	92.61	8.13	7.30	70.63	29.37	64.01	64.65
3303	Purbalingga	68.27	72.22	95.76	91.34	7.39	7.00	71.29	28.71	62.48	62.89
3304	Banjarnegara	67.12	71.08	92.37	85.53	6.57	6.23	72.36	27.64	59.76	60.50
3305	Kebumen	67.40	71.36	95.21	88.84	7.49	6.52	76.71	23.29	56.59	56.97
3306	Purworejo	68.61	72.55	95.66	86.88	8.43	7.40	70.26	29.74	64.67	65.49
3307	Wonosobo	68.07	72.02	93.83	88.40	6.83	6.25	77.68	22.32	56.26	56.89
3308	Magelang	68.20	72.15	95.96	88.90	8.08	7.11	64.00	36.00	68.26	69.15
3309	Boyolali	68.46	72.40	94.05	82.70	8.15	6.79	62.23	37.77	67.66	68.37
3310	Klaten	69.62	73.50	96.24	86.22	9.10	7.51	65.32	34.68	68.86	69.68
3311	Sukoharjo	68.31	72.26	95.76	87.32	9.12	8.12	60.58	39.42	71.27	71.50
3312	Wonogiri	70.42	74.26	91.04	76.40	7.03	5.75	64.12	35.88	66.27	67.12
3313	Karanganyar	70.34	74.18	93.29	82.94	8.76	7.35	64.32	35.68	68.45	69.39
3314	Sragen	70.70	74.53	90.62	80.89	8.31	6.79	64.97	35.03	66.10	66.69
3315	Grobogan	67.81	71.77	95.16	85.76	7.42	6.38	76.93	23.07	55.68	56.13
3316	Blora	69.37	73.27	90.20	81.04	6.99	6.10	66.20	33.80	64.35	65.20
3317	Rembang	68.21	72.16	95.85	87.78	7.22	6.50	67.67	32.33	64.11	64.87
3318	Pati	70.98	74.79	93.97	82.80	7.88	6.59	70.59	29.41	63.58	64.14
3319	Kudus	67.70	71.66	97.57	91.12	8.74	7.80	59.92	40.08	70.55	70.92
3320	Jepara	68.95	72.87	96.98	89.57	7.92	7.06	77.74	22.26	57.55	58.00
3321	Demak	69.50	73.39	96.86	88.37	8.18	7.03	62.38	37.62	68.76	69.63
3322	Semarang	70.61	74.44	97.89	90.52	8.59	7.71	56.51	43.49	73.07	73.72
3323	Temanggung	70.69	74.51	97.97	94.52	7.67	6.90	61.37	38.63	71.67	72.31
3324	Kendal	66.51	70.48	94.87	85.47	7.54	6.60	67.16	32.84	64.59	65.30
3325	Batang	68.20	72.15	93.84	87.62	7.24	6.21	74.91	25.09	59.17	60.02
3326	Pekalongan	67.08	71.05	95.64	88.71	7.20	6.34	75.76	24.24	57.60	58.20
3327	Pemalang	65.75	69.72	93.29	85.52	6.92	6.23	66.97	33.03	63.28	63.84
3328	Tegal	66.86	70.83	95.09	85.53	7.20	6.21	73.87	26.13	59.32	60.18
3329	Brebes	65.74	69.71	91.63	84.06	6.75	5.39	76.86	23.14	54.29	54.81
3371	Kota Magelang	68.31	72.26	99.56	95.95	10.79	9.98	60.67	39.33	73.52	73.96
3372	Kota Surakarta	70.30	74.14	99.10	95.06	11.01	9.92	58.52	41.48	75.68	76.37
3373	Kota Salatiga	69.13	73.05	99.48	94.70	10.52	9.61	59.38	40.62	74.06	74.78
3374	Kota Semarang	70.26	74.11	99.08	95.70	11.03	9.61	65.62	34.38	71.85	72.47
3375	Kota Pekalongan	68.40	72.35	98.32	93.90	9.21	8.22	73.93	26.07	63.47	64.04
3376	Kota Tegal	66.82	70.78	98.64	91.98	8.75	7.63	71.83	28.17	63.34	63.92

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPG	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		L	P	L	P	L	P	L	P	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3500	JAWA TIMUR	67.68	71.64	93.25	84.18	7.87	6.85	67.37	32.63	65.11	65.61
3501	Pacitan	69.37	73.27	97.47	88.91	7.39	6.53	62.93	37.07	68.24	68.66
3502	Ponorogo	68.01	71.96	92.70	81.82	7.54	6.23	67.08	32.92	64.86	65.50
3503	Trenggalek	69.73	73.61	96.90	89.94	7.88	6.89	64.51	35.49	68.32	68.86
3504	Tulungagung	69.59	73.48	96.72	92.19	8.33	7.62	64.31	35.69	68.93	69.38
3505	Blitar	68.97	72.89	96.33	89.16	7.79	7.02	61.13	38.87	71.34	71.67
3506	Kediri	67.74	71.70	97.00	90.15	8.25	7.33	71.87	28.13	63.55	64.31
3507	Malang	67.04	71.00	94.46	85.00	7.45	6.59	64.74	35.26	66.05	66.72
3508	Lumajang	65.25	69.19	89.67	82.83	6.96	6.10	78.47	21.53	51.45	52.54
3509	Jember	61.02	64.78	91.10	77.92	7.51	5.68	70.76	29.24	56.10	56.69
3510	Banyuwangi	65.66	69.62	94.06	81.65	7.58	6.25	70.12	29.88	60.40	61.10
3511	Bondowoso	61.40	65.17	87.86	69.94	6.57	4.94	63.55	36.45	58.39	59.24
3512	Situbondo	61.36	65.14	85.47	72.77	6.84	5.17	73.98	26.02	52.30	52.77
3513	Probolinggo	59.34	63.03	87.89	74.60	6.46	5.23	76.13	23.87	48.51	49.41
3514	Pasuruan	62.16	65.96	94.49	85.68	7.24	6.06	64.26	35.74	63.05	63.75
3515	Sidoarjo	68.64	72.58	99.17	96.58	10.65	9.46	71.56	28.44	66.62	67.23
3516	Mojokerto	68.28	72.23	98.09	92.88	8.40	7.39	66.05	33.95	68.32	69.05
3517	Jombang	68.17	72.12	96.58	90.32	8.40	7.37	74.14	25.86	61.18	61.61
3518	Nganjuk	66.96	70.93	95.82	88.33	7.99	6.88	76.81	23.19	56.84	57.42
3519	Madiun	66.97	70.94	93.47	84.97	8.08	6.74	70.66	29.34	59.95	60.45
3520	Magetan	69.27	73.18	96.98	86.14	8.37	7.08	63.91	36.09	67.88	68.50
3521	Ngawi	67.99	71.94	91.81	80.12	7.45	6.29	70.34	29.66	60.05	60.95
3522	Bojonegoro	65.23	69.17	91.09	80.33	7.24	6.15	76.36	23.64	53.57	54.31
3523	Tuban	65.86	69.83	91.15	81.00	7.02	6.42	72.26	27.74	58.76	59.33
3524	Lamongan	66.27	70.24	94.33	83.70	8.03	6.96	68.15	31.85	62.12	62.85
3525	Gresik	69.08	72.99	98.12	92.32	9.35	8.36	70.71	29.29	66.31	67.18
3526	Bangkalan	61.48	65.26	86.89	72.10	5.94	4.76	66.73	33.27	56.03	56.58
3527	Sampang	61.17	64.94	78.98	60.24	5.06	3.65	70.85	29.15	49.75	50.65
3528	Pamekasan	62.14	65.95	89.68	80.79	7.32	5.43	68.16	31.84	57.94	58.62
3529	Sumenep	62.85	66.68	86.73	70.02	6.61	4.78	65.15	34.85	58.79	59.59
3571	Kota Kediri	68.49	72.44	99.52	96.86	10.50	9.62	65.67	34.33	70.15	70.75
3572	Kota Blitar	70.36	74.21	98.83	96.56	10.27	9.57	64.82	35.18	72.35	72.77
3573	Kota Malang	68.41	72.35	99.14	95.84	11.17	10.59	65.54	34.46	71.08	71.58
3574	Kota Probolinggo	68.26	72.20	96.38	88.92	9.22	7.87	70.24	29.76	64.89	65.52
3575	Kota Pasuruan	64.48	68.38	98.78	94.53	9.67	8.45	69.58	30.42	64.37	64.83
3576	Kota Mojokerto	69.68	73.56	99.36	96.38	10.36	9.63	65.85	34.15	71.53	72.08
3577	Kota Madiun	69.11	73.03	99.26	96.80	10.96	9.98	61.77	38.23	71.82	72.29
3578	Kota Surabaya	69.11	73.03	99.80	96.74	10.92	9.62	66.34	33.66	71.43	71.93
3579	Kota Batu	67.52	71.48	98.84	96.89	8.96	8.19	71.71	28.29	64.95	65.56

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPG	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		L	P	L	P	L	P	L	P	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3400	D I YOGYAKARTA	71.37	75.16	96.28	87.09	9.78	8.67	60.82	39.18	72.51	73.07
3401	Kulon Progo	72.53	76.24	96.98	86.50	9.15	8.07	68.03	31.97	67.04	67.85
3402	Bantul	69.42	73.32	96.39	86.25	9.35	8.36	62.06	37.94	71.33	71.71
3403	Gunung Kidul	69.07	72.99	92.22	78.63	7.84	6.32	61.60	38.40	65.42	66.04
3404	Sleman	73.21	76.86	97.90	89.76	11.18	9.97	62.21	37.79	74.17	74.75
3471	Kota Yogyakarta	71.59	75.37	99.78	96.85	11.96	11.30	57.92	42.08	77.56	77.92
3600	BANTEN	63.04	66.88	98.91	94.82	8.92	7.90	70.46	29.54	62.88	63.35
3601	Pandeglang	61.92	65.72	98.21	94.81	7.22	6.52	70.11	29.89	60.75	61.25
3602	Lebak	61.45	65.23	96.99	94.17	6.75	5.86	70.86	29.14	60.34	60.92
3603	Tangerang	63.91	67.78	97.97	94.22	9.41	8.54	72.80	27.20	61.75	62.11
3604	Serang	61.67	65.46	98.02	93.95	8.02	6.66	75.25	24.75	56.96	57.44
3671	Kota Tangerang	66.45	70.42	99.33	97.58	11.12	9.50	70.30	29.70	67.67	68.13
3672	Kota Cilegon	66.65	70.62	99.53	98.12	10.28	9.64	81.24	18.76	58.01	58.44
3673	Kota Serang	63.26	67.11	98.78	94.93	8.60	7.47	74.28	25.72	60.71	61.34
3674	Kota Tangerang Selatan	66.62	70.58	98.98	96.74	11.23	10.20	75.95	24.05	62.14	62.82
5100	BALI	68.81	72.74	94.60	83.84	9.10	7.61	65.09	34.91	67.81	68.24
5101	Jembrana	69.92	73.79	96.09	86.88	8.67	7.06	62.58	37.42	69.68	70.01
5102	Tabanan	72.59	76.28	97.09	84.79	9.06	7.70	65.78	34.22	69.34	69.92
5103	Badung	69.93	73.79	97.25	88.19	10.52	8.66	64.74	35.26	70.40	70.85
5104	Gianyar	70.25	74.10	92.73	80.28	9.16	7.57	64.88	35.12	68.60	69.06
5105	Klungkung	67.18	71.14	90.76	75.89	8.26	6.51	57.74	42.26	69.06	69.61
5106	Bangli	69.76	73.64	90.77	76.40	7.35	5.79	66.00	34.00	66.07	66.61
5107	Karangasem	65.97	69.94	84.30	66.24	6.58	4.82	59.24	40.76	64.55	64.84
5108	Buleleng	67.23	71.19	94.89	82.41	8.24	6.50	62.55	37.45	66.86	67.43
5171	Kota Denpasar	71.17	74.97	99.64	96.13	11.31	10.11	60.59	39.41	76.06	76.49

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPG	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		L	P	L	P	L	P	L	P	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5200	NUSA TENGGARA BARAT	60.30	64.02	88.57	78.64	7.60	6.43	69.87	30.13	56.02	56.70
5201	Lombok Barat	59.06	62.73	84.74	70.98	6.81	5.51	69.31	30.69	53.23	54.34
5202	Lombok Tengah	59.30	62.98	84.27	71.12	6.71	5.46	65.99	34.01	54.16	54.66
5203	Lombok Timur	59.04	62.71	88.92	77.80	7.20	6.17	57.73	42.27	60.16	61.12
5204	Sumbawa	58.94	62.61	93.75	87.86	8.01	7.20	63.74	36.26	62.43	63.00
5205	Dompu	59.27	62.95	91.26	83.80	8.49	7.37	68.03	31.97	60.16	60.78
5206	Bima	61.10	64.87	91.58	82.79	7.67	7.11	75.00	25.00	53.21	53.58
5207	Sumbawa Barat	59.49	63.18	95.80	87.96	8.40	7.30	82.02	17.98	47.37	48.19
5208	Lombok Utara	58.78	62.44	80.99	68.56	6.36	4.75	74.71	25.29	46.86	47.84
5271	Kota Mataram	64.74	68.66	96.82	89.51	10.36	8.39	67.07	32.93	65.16	65.66
5272	Kota Bima	61.15	64.92	96.37	92.27	10.06	9.46	66.26	33.74	63.98	64.66
5300	NUSA TENGGARA TIMUR	65.58	69.54	90.78	86.58	7.27	6.75	60.12	39.88	64.61	65.33
5301	Sumba Barat	63.30	67.15	83.21	79.06	6.52	6.25	68.12	31.88	58.74	59.32
5302	Sumba Timur	60.14	63.86	88.14	82.94	6.62	6.19	59.05	40.95	60.94	61.35
5303	Kupang	63.57	67.44	91.48	87.58	7.57	7.05	65.99	34.01	61.25	61.94
5304	Timor Tengah Selatan	64.99	68.92	90.14	80.91	6.92	6.33	73.64	26.36	55.25	55.51
5305	Timor Tengah Utara	66.60	70.57	90.19	85.88	6.90	6.48	64.26	35.74	63.29	63.68
5306	Belu	64.11	68.00	85.01	81.85	6.52	6.17	64.88	35.12	60.13	60.62
5307	Alor	65.01	68.94	97.98	93.34	7.97	7.19	60.41	39.59	65.78	66.37
5308	Lembata	64.68	68.60	97.55	90.37	7.71	6.57	56.57	43.43	65.79	66.43
5309	Flores Timur	66.19	70.17	95.56	86.00	7.27	6.15	58.40	41.60	66.00	66.55
5310	Sikka	67.09	71.05	92.88	90.76	6.69	6.28	65.02	34.98	61.32	61.96
5311	Ende	62.95	66.79	96.83	91.65	7.83	6.89	45.90	54.10	66.40	67.22
5312	Ngada	65.25	69.19	97.87	95.12	7.63	7.61	57.69	42.31	68.00	68.76
5313	Manggarai	65.37	69.32	95.04	89.75	7.27	6.44	57.36	42.64	65.83	66.43
5314	Rote Nda	66.13	70.10	89.85	87.34	7.02	6.35	65.60	34.40	61.99	62.63
5315	Manggarai Barat	64.49	68.39	95.98	88.48	6.95	6.19	63.49	36.51	62.47	63.46
5316	Sumba Barat Daya	61.79	65.58	77.96	72.07	6.13	5.86	59.11	40.89	59.87	60.60
5317	Sumba Tengah	60.92	64.68	78.13	69.75	5.65	5.29	57.28	42.72	59.62	60.05
5318	Nageko	61.69	65.48	96.74	93.58	7.23	6.80	53.12	46.88	65.69	66.05
5319	Manggarai Timur	65.65	69.60	94.08	89.44	6.75	6.33	67.81	32.19	60.25	60.86
5320	Sabu Raijua	65.31	69.25	79.12	73.66	5.25	5.64	66.89	33.11	51.84	52.56
5371	Kota Kupang	70.91	74.72	99.16	98.04	11.42	10.64	62.50	37.50	73.53	73.99

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPG	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		L	P	L	P	L	P	L	P	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6100	KALIMANTAN BARAT	64.70	68.62	94.44	87.60	7.38	6.44	66.81	33.19	64.21	64.78
6101	Sambas	59.32	63.00	96.72	86.54	6.77	5.71	66.03	33.97	59.71	60.50
6102	Bengkayang	66.91	70.88	93.54	85.06	7.08	6.27	66.70	33.30	64.19	64.71
6103	Landak	63.59	67.45	97.26	86.84	7.74	6.74	65.16	34.84	64.46	65.21
6104	Pontianak	65.32	69.27	94.91	83.25	7.33	6.23	66.46	33.54	63.67	64.33
6105	Sanggau	66.56	70.53	95.52	87.00	7.24	5.98	67.93	32.07	63.74	64.34
6106	Ketapang	65.53	69.48	95.16	88.99	6.85	6.08	74.25	25.75	57.84	58.31
6107	Sintang	66.39	70.37	93.90	87.36	7.89	6.54	68.45	31.55	63.07	63.63
6108	Kapuas Hulu	64.68	68.60	96.17	89.61	7.91	6.52	61.15	38.85	67.38	68.08
6109	Sekadau	65.43	69.37	95.87	86.14	6.89	6.04	62.75	37.25	64.70	65.24
6110	Melawai	65.83	69.80	94.21	91.11	8.01	7.03	66.87	33.13	63.75	64.34
6111	Kayong Utara	63.79	67.66	93.14	82.62	6.23	5.31	70.22	29.78	58.35	58.94
6112	Kubu Raya	64.41	68.31	93.53	83.47	7.70	6.18	67.39	32.61	62.26	62.77
6171	Kota Pontianak	65.30	69.25	98.53	94.14	9.83	9.13	67.11	32.89	66.87	67.46
6172	Kota Singkawang	65.29	69.24	93.40	86.69	7.88	7.07	73.07	26.93	58.87	59.54
6200	KALIMANTAN TENGAH	69.31	73.21	99.85	96.70	8.62	7.72	67.67	32.33	69.32	69.80
6201	Kotawaringin Barat	69.58	73.47	98.95	93.26	8.43	7.39	77.87	22.13	60.78	61.32
6202	Kotawaringin Timur	67.64	71.60	99.82	98.33	8.73	7.72	73.95	26.05	63.52	63.91
6203	Kapuas	68.87	72.80	98.73	95.60	8.11	7.06	72.49	27.51	64.17	64.59
6204	Barito Selatan	66.35	70.33	99.86	98.81	9.74	8.11	63.60	36.40	70.75	71.30
6205	Barito Utara	70.17	74.02	99.46	97.73	9.83	8.14	58.95	41.05	74.55	74.91
6206	Sukamara	65.93	69.90	97.80	94.56	7.88	6.79	81.96	18.04	53.95	54.47
6207	Lamandau	65.30	69.24	99.24	98.50	8.38	7.41	74.50	25.50	62.13	62.62
6208	Seruyan	66.06	70.04	99.87	98.99	9.23	7.59	74.80	25.20	63.47	63.87
6209	Katingan	65.58	69.54	99.94	99.23	8.58	7.78	71.83	28.17	64.58	64.89
6210	Pulang Pisau	65.64	69.60	98.68	95.60	8.19	7.33	79.14	20.86	56.69	57.58
6211	Gunung Mas	66.03	70.01	99.95	99.49	9.80	8.68	61.97	38.03	71.59	71.85
6212	Barito Timur	65.92	69.90	99.14	97.81	9.19	8.36	60.10	39.90	71.45	71.84
6213	Murung Raya	66.18	70.15	99.97	99.91	7.71	7.16	73.99	26.01	64.40	64.83
6271	Kota Palangka Raya	71.55	75.32	99.91	99.31	11.33	10.46	67.86	32.14	71.51	71.97

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPG	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		L	P	L	P	L	P	L	P	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6300	KALIMANTAN SELATAN	61.96	65.76	98.13	94.28	8.27	7.30	65.53	34.47	65.07	65.59
6301	Tanah Laut	66.47	70.44	98.43	92.69	7.81	6.89	71.72	28.28	62.39	63.07
6302	Kota Baru	63.59	67.45	96.41	92.33	7.90	6.57	75.00	25.00	60.26	61.09
6303	Banjar	63.38	67.23	98.45	94.92	7.57	6.93	67.93	32.07	64.66	65.08
6304	Barito Kuala	60.05	63.77	98.24	92.89	7.44	6.24	60.71	39.29	65.52	65.94
6305	Tapin	65.31	69.25	99.14	94.18	7.76	6.76	52.72	47.28	70.29	70.68
6306	Hulu Sungai Selatan	62.10	65.90	99.53	95.51	7.67	7.27	75.06	24.94	57.73	58.10
6307	Hulu Sungai Tengah	63.41	67.26	99.79	96.68	7.94	7.05	48.49	51.51	70.67	71.01
6308	Hulu Sungai Utara	61.24	65.01	99.05	94.21	7.97	7.07	71.09	28.91	58.63	59.33
6309	Tabalong	61.25	65.02	99.13	93.85	8.63	7.67	72.90	27.10	59.99	60.55
6310	Tanah Bumbu	63.07	66.92	96.42	92.96	7.93	6.74	68.90	31.10	62.85	63.34
6311	Balangan	59.93	63.64	98.05	93.27	7.49	6.53	66.15	33.85	61.61	62.27
6371	Kota Banjarmasin	64.25	68.14	99.42	97.09	10.12	9.19	63.75	36.25	69.74	70.33
6372	Kota Banjar Baru	65.56	69.52	99.18	98.79	10.80	9.76	68.72	31.28	67.30	68.01
6400	KALIMANTAN TIMUR	69.31	73.21	98.31	96.34	9.53	8.82	79.11	20.89	60.37	61.07
6401	Pasir	71.25	75.04	97.67	92.72	8.63	7.84	78.77	21.23	61.04	61.92
6402	Kutai Barat	68.36	72.31	98.20	94.78	9.01	7.72	75.32	24.68	62.16	62.71
6403	Kutai	66.00	69.97	98.97	95.85	9.54	8.24	77.74	22.26	60.07	60.63
6404	Kutai Timur	66.68	70.65	98.40	98.07	8.40	8.10	84.55	15.45	53.10	54.10
6405	Berau	68.00	71.95	97.66	96.65	8.81	8.11	83.94	16.06	53.70	54.47
6406	Malinau	66.40	70.37	96.59	91.70	8.69	7.74	73.57	26.43	63.96	64.62
6407	Bulongan	71.06	74.86	97.35	93.59	8.58	7.81	79.04	20.96	60.80	61.28
6408	Nunukan	69.65	73.54	97.83	92.70	8.41	7.42	74.64	25.36	64.00	64.81
6409	Penajam Paser Utara	69.57	73.46	97.84	93.04	8.32	7.46	76.15	23.85	61.80	62.10
6410	Tana Tidung	70.79	74.61	96.92	86.32	8.14	6.98	76.02	23.98	59.15	59.54
6471	Kota Balikpapan	70.30	74.15	99.11	98.41	10.61	9.90	75.49	24.51	65.47	65.95
6472	Kota Samarinda	69.32	73.22	99.17	96.80	10.67	10.00	70.94	29.06	69.30	69.80
6473	Kota Tarakan	69.86	73.73	99.30	97.08	10.05	9.12	75.01	24.99	64.79	65.35
6474	Kota Bontang	70.55	74.39	99.73	98.61	11.13	9.88	83.68	16.32	56.38	57.12

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPG	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		L	P	L	P	L	P	L	P	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7100	SULAWESI UTARA	70.35	74.20	99.75	99.35	9.10	8.76	70.86	29.14	67.97	68.60
7101	Bolaang Mongondow	69.69	73.58	99.62	98.25	7.82	7.33	73.61	26.39	65.01	65.51
7102	Minahasa	70.61	74.44	99.88	99.50	9.26	8.94	63.41	36.59	72.91	73.27
7103	Kep.Sangihe Talaud	71.16	74.96	99.31	98.09	8.05	7.71	73.64	26.36	64.93	65.39
7104	Kepulauan Talaud	70.01	73.88	99.93	99.52	9.11	8.67	72.87	27.13	64.90	65.35
7105	Minahasa Selatan	70.42	74.26	99.94	99.63	8.84	8.53	69.52	30.48	68.18	68.73
7106	Minahasa Utara	70.75	74.57	99.66	99.84	9.47	9.27	68.18	31.82	70.78	71.31
7107	Bolaang Mongondow Utara	67.99	71.94	99.31	97.72	7.53	7.39	73.43	26.57	63.68	64.19
7108	Minahasa Tenggara	68.11	72.06	99.68	99.45	8.65	8.38	67.45	32.55	66.23	66.84
7109	Kep. Siau Tagulandang Biaro	66.69	70.66	99.88	99.68	8.39	8.65	66.98	33.02	68.32	69.10
7110	Bolaang Mongondow Selatan	69.40	73.30	98.42	98.24	6.65	6.46	72.62	27.38	61.54	62.04
7111	Bolaang Mongondow Timur	69.46	73.36	99.83	98.08	7.21	6.86	76.65	23.35	58.88	59.40
7171	Manado	70.78	74.61	99.97	99.70	10.97	10.79	66.50	33.50	71.97	72.56
7172	Kota Bitung	68.59	72.53	99.72	99.09	9.87	9.28	74.66	25.34	63.50	64.21
7173	Kota Tomohon	70.77	74.59	99.98	99.47	10.13	9.99	66.74	33.26	70.81	71.43
7174	Kota Kotamobago	69.92	73.79	99.85	99.36	9.32	9.08	75.13	24.87	62.54	63.38
7200	SULAWESI TENGAH	64.70	68.62	97.83	95.30	8.21	7.85	71.88	28.12	62.42	63.03
7201	Banggai Kepulauan	62.24	66.05	96.95	94.89	8.14	7.70	57.33	42.67	66.75	67.37
7202	Banggai	66.58	70.55	98.35	92.66	8.14	7.76	73.36	26.64	60.84	61.28
7203	Morowali	63.67	67.54	98.71	96.36	8.36	7.98	75.47	24.53	59.71	60.50
7204	Poso	63.09	66.93	99.00	96.99	9.02	8.69	72.21	27.79	63.12	63.81
7205	Donggala	63.40	67.25	97.10	93.82	7.83	7.48	71.76	28.24	61.26	61.89
7206	Toli-Toli	62.41	66.22	98.15	93.49	7.88	7.81	76.54	23.46	55.71	56.30
7207	Buol	63.51	67.36	98.84	97.91	8.31	8.11	77.72	22.28	56.31	56.70
7208	Parigi Moutong	63.29	67.14	96.82	92.62	7.53	6.72	77.57	22.43	54.96	55.41
7209	Tojo Una-Una	62.03	65.83	99.14	96.84	8.38	7.79	75.50	24.50	57.36	58.01
7210	Sigi	63.49	67.35	96.67	96.16	8.10	7.76	68.63	31.37	61.30	62.08
7271	Kodya Palu	68.07	72.02	99.72	99.19	11.63	10.67	68.17	31.83	70.12	70.82

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPG	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		L	P	L	P	L	P	L	P	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7300	SULAWESI SELATAN	68.08	72.03	90.89	86.06	8.15	7.59	70.64	29.36	61.99	62.75
7301	Selayar	65.82	69.78	95.42	88.62	7.72	6.86	69.37	30.63	60.36	61.16
7302	Bulukumba	70.06	73.92	88.17	84.99	7.40	6.87	67.33	32.67	63.47	64.28
7303	Bantaeng	71.76	75.52	82.59	78.57	6.20	5.99	65.57	34.43	63.81	64.48
7304	Jeneponto	63.14	66.98	80.04	75.95	6.49	5.97	71.33	28.67	54.81	55.57
7305	Takalar	67.74	71.70	85.77	78.96	7.28	6.26	73.72	26.28	56.87	57.59
7306	Gowa	69.72	73.60	85.66	80.67	7.47	7.01	69.82	30.18	62.60	63.53
7307	Sinjai	70.11	73.97	90.27	85.99	7.33	6.68	70.13	29.87	61.51	62.43
7308	Maros	70.43	74.27	88.86	81.71	7.81	6.83	75.08	24.92	58.40	59.40
7309	Pangkajene Kepulauan	66.87	70.83	91.31	85.33	7.74	6.63	68.18	31.82	61.31	61.73
7310	Barru	66.93	70.89	92.48	86.50	7.88	7.56	76.72	23.28	55.15	55.83
7311	Bone	67.81	71.77	89.39	83.87	7.22	6.25	69.27	30.73	60.36	61.15
7312	Soppeng	69.75	73.63	90.42	84.41	7.57	6.79	69.38	30.62	62.12	62.85
7313	Wajo	69.04	72.96	90.21	80.90	6.90	6.34	75.15	24.85	56.07	57.17
7314	Sidenreng Rappang	70.64	74.47	93.56	86.67	8.06	7.02	71.92	28.08	62.22	62.88
7315	Pinrang	70.19	74.04	95.16	87.13	7.63	7.20	67.14	32.86	66.37	67.28
7316	Enrekang	73.13	76.79	95.67	86.42	8.75	7.95	65.68	34.32	69.59	70.24
7317	Luwu	71.86	75.61	93.95	90.40	8.33	7.65	66.21	33.79	69.51	70.16
7318	Tana Toraja	72.32	76.04	90.77	84.77	8.23	7.39	63.38	36.62	68.60	69.17
7322	Luwu Utara	69.67	73.56	95.53	91.00	7.79	7.24	81.35	18.65	54.13	54.71
7325	Luwu Timur	69.05	72.97	96.41	91.48	8.38	7.97	77.10	22.90	57.88	58.18
7326	Toraja Utara	71.69	75.45	86.14	82.92	7.82	7.50	69.34	30.66	63.92	64.72
7371	Kota Makassar	71.74	75.50	98.43	95.52	11.58	10.66	66.29	33.71	72.49	73.04
7372	Kota Pare Pare	72.42	76.13	98.75	95.54	10.39	9.43	70.68	29.32	67.80	68.43
7373	Kota Palopo	70.61	74.44	99.23	95.87	10.24	9.87	66.04	33.96	70.01	70.54
7400	SULAWESI TENGGARA	65.88	69.85	95.90	89.10	8.62	7.82	67.11	32.89	63.87	64.79
7401	Buton	66.65	70.62	92.73	82.01	7.56	6.36	69.96	30.04	59.97	61.04
7402	Muna	64.09	67.97	96.65	83.00	8.33	6.88	64.57	35.43	61.51	61.94
7403	Konawe/Kab Kendari	65.37	69.31	97.90	91.94	9.09	8.02	66.24	33.76	65.23	65.91
7404	Kolaka	65.21	69.15	95.10	92.37	8.57	7.87	77.12	22.88	57.33	57.92
7405	Konawe Selatan	65.70	69.66	96.97	92.64	8.03	7.52	70.98	29.02	61.39	61.85
7406	Bombana	65.78	69.75	92.93	88.86	7.50	6.94	74.18	25.82	56.07	56.64
7407	Wakatobi	66.14	70.11	96.19	89.85	7.93	7.13	64.30	35.70	62.99	63.98
7408	Kolaka Utara	63.67	67.54	96.09	91.46	7.95	7.46	73.84	26.16	58.30	59.37
7409	Buton Utara	65.14	69.08	94.59	93.05	8.23	6.94	62.45	37.55	65.44	65.94
7410	Konawe Utara	66.35	70.32	97.22	87.91	8.92	7.69	63.78	36.22	65.55	66.48
7471	Kota Kendari	67.17	71.13	99.57	97.95	11.49	11.18	66.37	33.63	70.51	71.15
7472	Kota Bau-Bau	68.47	72.42	98.06	94.17	10.42	9.56	72.95	27.05	63.59	64.56

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPG	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		L	P	L	P	L	P	L	P	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7500	GORONTALO	64.90	68.82	96.46	95.61	7.11	7.68	76.13	23.87	56.98	57.67
7501	Boalemo	66.11	70.09	96.63	95.42	5.90	6.79	71.98	28.02	58.68	59.19
7502	Gorontalo	66.70	70.67	94.56	95.09	6.71	7.17	75.68	24.32	57.48	58.10
7503	Pokuwato	65.74	69.70	97.79	96.60	6.41	6.95	65.34	34.66	65.98	66.40
7504	Bone Bolango	66.63	70.60	97.85	97.31	7.53	8.15	71.69	28.31	61.83	62.53
7505	Gorontalo Utara	64.92	68.85	93.76	95.79	6.14	6.65	75.47	24.53	56.71	57.46
7571	Kota Gorontalo	64.72	68.63	99.34	99.74	9.93	10.25	72.76	27.24	62.97	63.88
7600	SULAWESI BARAT	65.88	69.85	91.36	86.05	7.62	6.80	64.72	35.28	65.31	65.86
7601	Majene	63.51	67.37	95.98	94.35	8.94	8.00	62.22	37.78	66.94	67.41
7602	Polewali Mamasa	63.12	66.96	90.10	83.00	7.41	6.54	64.27	35.73	62.25	63.13
7603	Mamasa	69.30	73.20	90.55	86.16	7.80	6.82	75.29	24.71	59.07	59.85
7604	Mamuju	66.58	70.55	94.75	86.90	7.39	6.79	72.96	27.04	59.94	60.42
7605	Mamuju Utara	65.63	69.59	96.54	93.92	7.44	6.92	82.81	17.19	52.42	53.84
8100	MALUKU	65.48	69.44	99.06	98.06	9.28	8.66	64.87	35.13	67.23	67.76
8101	Maluku Tenggara Barat	62.42	66.24	99.70	99.37	8.98	8.50	55.21	44.79	67.73	68.32
8102	Maluku Tenggara	66.06	70.04	99.80	99.36	9.16	8.70	66.25	33.75	66.00	66.56
8103	Maluku Tengah	63.87	67.75	99.83	98.51	8.90	8.33	66.65	33.35	65.20	65.73
8104	Buru	66.12	70.10	95.47	90.33	8.32	6.85	71.89	28.11	60.55	61.33
8105	Kepulauan Aru	65.81	69.77	99.55	98.79	8.25	7.33	60.81	39.19	68.57	68.92
8106	Seram Bagian Barat	64.66	68.58	99.12	96.44	8.69	8.25	65.31	34.69	65.50	66.19
8107	Seram Bagian Timur	63.97	67.85	98.77	97.61	8.01	7.61	71.92	28.08	60.54	61.31
8108	Maluku Barat Daya	62.29	66.10	98.78	98.05	8.15	7.76	61.79	38.21	63.37	63.86
8109	Buru Selatan	65.43	69.38	94.32	85.45	7.02	6.28	60.70	39.30	66.93	67.57
8171	Kota Ambon	71.16	74.96	99.80	99.42	11.42	11.04	59.85	40.15	76.01	76.47
8172	Kota Tual	66.78	70.75	99.80	99.45	10.08	9.39	76.21	23.79	61.77	62.48
8200	MALUKU UTARA	64.12	68.01	97.84	94.67	8.75	7.98	65.79	34.21	64.41	65.35
8201	Halmahera Barat	62.53	66.35	96.93	93.68	8.22	7.69	69.63	30.37	60.87	61.71
8202	Halmahera Tengah	64.68	68.60	98.80	96.00	8.47	7.58	72.91	27.09	60.02	61.09
8203	Kepulauan Sula	63.14	66.98	98.82	95.21	8.25	7.23	73.28	26.72	58.10	59.05
8204	Halmahera Selatan	63.59	67.46	97.78	92.94	8.08	7.41	79.84	20.16	51.51	52.37
8205	Halmahera Utara	63.98	67.86	98.78	95.79	8.26	7.29	74.90	25.10	57.73	58.92
8206	Halmahera Timur	63.45	67.30	96.84	94.93	8.41	7.48	75.99	24.01	56.73	57.57
8207	Pulau Morotai	63.36	67.21	96.06	93.53	6.84	5.77	74.93	25.07	54.59	55.78
8271	Kota Ternate	68.55	72.50	99.81	98.86	11.29	10.48	67.77	32.23	71.06	71.75
8272	Kota Tidore Kepulauan	63.19	67.04	99.14	96.18	9.24	8.51	69.61	30.39	62.44	63.49

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPG	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		L	P	L	P	L	P	L	P	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9100	PAPUA BARAT	66.58	70.55	98.13	92.62	9.64	8.14	75.82	24.18	58.87	59.24
9101	Fak-Fak	68.61	72.55	98.95	97.43	9.64	9.16	71.95	28.05	63.26	63.76
9102	Kaimana	67.79	71.75	98.13	95.64	8.79	7.10	67.66	32.34	65.57	66.28
9103	Teluk Wondama	65.59	69.54	89.82	82.30	7.15	6.20	77.29	22.71	52.75	53.10
9104	Teluk Bintuni	66.28	70.26	92.96	84.99	9.27	6.45	78.57	21.43	53.94	54.52
9105	Manokwari	66.03	70.00	94.06	83.54	10.08	7.09	73.95	26.05	57.01	57.53
9106	Sorong Selatan	64.76	68.67	99.32	83.87	8.56	7.60	74.56	25.44	57.47	57.73
9107	Sorong	65.93	69.90	96.78	88.94	8.85	7.50	80.15	19.85	53.70	54.02
9108	Raja Ampat	64.19	68.08	95.88	92.33	7.66	6.89	77.05	22.95	52.58	53.09
9109	Tambrau	64.36	68.26	81.49	72.74	6.40	5.10	57.73	42.27	49.72	49.93
9110	Maybrat	64.43	68.33	95.64	89.77	8.14	7.44	73.99	26.01	56.30	56.65
9171	Kota Sorong	70.07	73.94	99.73	98.97	11.02	10.34	77.73	22.27	64.33	64.81

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		IPG	
		(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)			
		L	P	L	P	L	P	L	P	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9400	PAPUA	66.68	70.65	81.71	71.99	7.34	5.84	64.64	35.36	61.98	62.69
9401	Merauke	60.55	64.29	97.64	85.04	9.29	9.38	64.04	35.96	63.35	64.05
9402	Jayawijaya	64.52	68.43	62.78	34.98	5.71	3.93	57.11	42.89	53.00	53.55
9403	Jayapura	65.40	69.35	98.46	95.08	10.04	9.05	68.76	31.24	66.45	67.02
9404	Nabire	65.63	69.58	86.24	74.36	8.91	6.42	66.47	33.53	62.14	62.71
9408	Yapen Waropen	66.11	70.08	90.42	86.66	8.50	6.28	67.71	32.29	65.30	66.12
9409	Biak Namfor	64.59	68.49	98.94	97.37	9.89	9.38	72.74	27.26	62.02	62.51
9410	Paniai	65.77	69.74	68.93	51.05	6.74	3.45	50.96	49.04	57.34	58.09
9411	Puncak Jaya	65.90	69.87	84.01	89.33	7.03	5.21	62.93	37.07	66.57	67.16
9412	Mimika	68.28	72.23	97.02	86.99	8.99	6.68	77.58	22.42	58.64	59.26
9413	Boven Digoel	65.15	69.09	35.07	29.25	7.77	3.12	69.40	30.60	46.69	47.54
9414	Mappi	64.29	68.19	32.36	30.69	7.26	3.98	60.87	39.13	48.92	49.56
9415	Asmat	65.31	69.25	31.22	31.00	6.05	3.74	67.29	32.71	47.56	48.10
9416	Yahukimo	64.91	68.83	45.37	24.36	3.95	2.30	51.08	48.92	49.19	49.93
9417	Pegunungan Bintang	63.88	67.76	33.39	32.03	3.67	2.15	59.37	40.63	48.20	48.76
9418	Tolikara	64.07	67.95	58.21	29.57	5.43	2.16	62.10	37.90	51.80	52.17
9419	Sarmi	64.45	68.35	95.40	86.70	8.06	6.42	62.21	37.79	66.63	67.18
9420	Keerom	65.19	69.13	93.04	89.91	8.53	6.75	66.82	33.18	65.07	65.45
9426	Waropen	63.65	67.52	87.45	74.20	7.45	6.32	67.18	32.82	60.11	61.13
9427	Supiori	64.08	67.96	97.04	95.39	8.73	7.62	71.14	28.86	62.03	62.58
9428	Membramo Raya	64.17	68.06	75.58	57.02	7.57	4.17	65.50	34.50	56.76	57.15
9429	Nduga	63.77	67.64	36.64	24.45	3.01	2.58	58.57	41.43	47.58	48.11
9430	Lanny Jaya	64.39	68.29	50.64	29.85	4.53	2.84	60.47	39.53	48.72	49.14
9431	Mamberamo Tengah	64.38	68.27	43.21	23.95	3.77	1.84	54.68	45.32	48.01	48.21
9432	Yalimo	64.45	68.36	36.24	33.13	3.02	2.47	56.60	43.40	48.43	48.91
9433	Puncak	65.52	69.47	36.91	27.33	3.18	2.45	67.34	32.66	45.17	45.87
9434	Dogiyai	65.18	69.12	67.31	21.59	4.69	3.06	37.93	62.07	45.63	46.76
9435	Intan Jaya	63.14	66.98	37.14	18.12	3.09	1.16	52.23	47.77	46.29	46.55
9436	Deiyai	63.02	66.86	44.58	22.33	4.58	1.62	36.25	63.75	42.70	43.37
9471	Kota Jayapura	66.53	70.50	99.89	98.81	11.49	10.69	66.34	33.66	70.85	71.46
0000	Indonesia	67.51	71.47	95.73	90.55	8.35	7.54	65.84	34.16	67.20	67.80

Lampiran 5. IDG Provinsi dan Kabupaten 2010 - 2011

L5

Kode	Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG	
		%	%	%	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1100	ACEH	4.35	53.76	31.67	53.40	52.06
1101	Simeulue	15.00	40.86	22.54	55.36	57.91
1102	Aceh Singkil	12.00	34.59	27.74	56.79	54.62
1103	Aceh Selatan	0.01	58.01	27.41	40.03	41.18
1104	Aceh Tenggara	12.00	50.68	28.91	53.60	58.60
1105	Aceh Timur	5.71	66.42	27.36	48.64	45.59
1106	Aceh Tengah	6.67	45.88	34.00	56.54	57.98
1107	Aceh Barat	3.33	48.06	27.35	46.50	47.06
1108	Aceh Besar	2.86	57.44	25.04	44.73	44.41
1109	Pidie	4.44	54.57	27.49	47.01	47.65
1110	Bireuen	5.71	66.14	36.52	51.68	51.78
1111	Aceh Utara	2.22	64.08	32.18	47.19	47.39
1112	Aceh Barat Daya	0.01	58.03	26.98	42.78	42.75
1113	Gayo Lues	5.00	30.78	33.80	52.28	49.27
1114	Aceh Tamiang	13.33	58.70	25.92	55.78	55.44
1115	Nagan Raya	12.00	43.38	25.31	54.93	56.62
1116	Aceh Jaya	0.01	54.96	39.38	48.65	49.20
1117	Bener Meriah	4.00	48.73	27.21	48.05	48.32
1118	Pidie Jaya	8.00	56.33	31.98	54.61	56.12
1171	Kota Banda Aceh	3.33	43.32	24.53	46.34	46.72
1172	Kota Sabang	10.00	48.93	30.33	57.92	58.45
1173	Kota Langsa	32.00	54.80	27.36	69.86	70.05
1174	Kota Lhokseumawe	12.00	57.61	21.95	52.11	52.14
1175	Subulussalam	20.00	58.63	35.67	69.54	70.67

Kode	Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG	
		%	%	%	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1200	SUMATERA UTARA	15.00	56.32	34.94	67.78	67.39
1201	Nias	4.00	21.40	46.23	53.88	46.89
1202	Mandailing Natal	7.50	55.96	43.65	59.53	63.16
1203	Tapanuli Selatan	6.67	51.17	46.81	65.18	63.72
1204	Tapanuli Tengah	20.00	53.10	41.42	68.78	73.48
1205	Tapanuli Utara	8.57	56.29	46.45	58.22	64.56
1206	Toba Samosir	12.00	51.87	42.71	61.87	67.76
1207	Labuhan Batu	10.00	61.68	29.57	58.96	57.95
1208	Asahan	8.89	53.06	24.52	51.66	53.19
1209	Simalungun	8.89	62.23	33.79	61.78	58.69
1210	Dairi	10.00	59.26	49.15	65.15	65.05
1211	Karo	11.43	72.55	43.17	63.37	60.29
1212	Deli Serdang	16.00	53.98	25.79	60.00	61.88
1213	Langkat	8.00	67.51	28.38	52.96	51.72
1214	Nias Selatan	13.33	41.90	33.56	59.84	61.27
1215	Humbang Hasundutan	4.00	43.59	48.57	57.28	57.67
1216	Pakpak Barat	5.00	55.07	46.98	58.88	58.88
1217	Samosir	12.00	42.29	49.47	67.27	67.63
1218	Serdang Bedagai	13.33	57.63	29.33	60.21	60.63
1219	Batu Bara	5.71	66.67	35.10	57.20	54.62
1220	Padang Lawas Utara	10.34	60.73	43.35	61.14	64.73
1221	Padang Lawas	3.33	60.61	39.25	55.65	55.04
1222	Labuhan Batu Selatan	7.69	64.51	31.60	69.20	55.43
1223	Labuhan Batu Utara	0.01	84.30	21.46	38.61	23.59
1224	Nias Utara	16.00	37.52	43.30	64.72	68.05
1225	Nias Barat	15.00	25.86	49.29	60.83	61.61
1271	Kota Sibolga	15.79	54.70	30.80	63.16	65.18
1272	Kota Tanjung Balai	24.00	68.60	21.82	58.32	58.47
1273	Kota Pematang Siantar	13.33	43.49	34.48	63.70	63.02
1274	Kota Tebing Tinggi	8.00	49.64	29.41	59.33	56.67
1275	Kota Medan	10.00	53.96	29.58	57.94	58.78
1276	Kota Binjai	10.00	57.92	34.12	61.09	60.86
1277	Kota Padang Sidempuan	20.00	52.16	28.08	64.83	65.92
1278	Gunung Sitoli	12.00	34.73	39.46	57.42	60.76

Kode	Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG	
		%	%	%	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1300	SUMATERA BARAT	12.73	56.13	34.16	63.04	64.62
1301	Kepulauan Mentawai	0.01	35.56	28.05	44.42	43.01
1302	Pesisir Selatan	0.01	70.60	33.05	43.93	43.04
1303	Solok	2.86	56.39	35.96	51.99	54.09
1304	Sawah Lunto/Sijunjung	7.14	66.56	25.65	50.24	49.03
1305	Tanah Datar	8.57	53.49	31.65	54.87	57.73
1306	Padang Pariaman	8.57	59.20	29.81	53.81	55.77
1307	Agam	7.50	53.31	38.84	58.28	60.10
1308	Limapuluh Koto	8.57	54.77	24.57	45.92	51.90
1309	Pasaman	3.33	44.38	34.83	54.17	54.84
1310	Solok Selatan	8.00	55.41	33.11	56.36	57.80
1311	Dharmas Raya	4.00	66.34	25.69	44.75	43.62
1312	Pasaman Barat	2.86	58.32	33.63	51.46	52.62
1371	Kota Padang	6.67	52.80	30.24	56.10	57.51
1372	Kota Solok	10.00	46.59	33.36	54.69	61.11
1373	Kota Sawah Lunto	20.00	49.91	27.21	61.08	63.03
1374	Kota Padang Panjang	20.00	56.63	45.44	74.93	75.50
1375	Kota Bukit Tinggi	16.00	54.24	36.10	73.78	69.74
1376	Kota Payakumbuh	8.00	57.44	35.02	59.16	59.85
1377	Kota Pariaman	5.00	66.68	29.39	56.00	47.95
1400	RIAU	18.18	53.65	26.36	65.14	65.34
1401	Kuantan Sengingi	2.86	49.59	34.44	53.43	55.13
1402	Indragiri Hulu	17.14	57.65	27.52	59.62	64.56
1403	Indragiri Hilir	4.44	43.67	28.11	58.99	51.54
1404	Pelalawan	0.01	53.69	27.33	45.50	45.71
1405	Siak	8.57	50.93	17.92	48.01	48.52
1406	Kampar	6.67	56.07	21.71	47.93	49.13
1407	Rokan Hulu	8.57	61.38	24.87	57.82	52.46
1408	Bengkalis	7.50	46.97	20.64	47.23	47.36
1409	Rokan Hilir	15.00	76.35	21.09	55.76	47.18
1410	Kepulauan Meranti	9.09	49.33	27.40	53.66	54.48
1471	Kota Pekanbaru	15.56	48.94	25.93	62.14	62.73
1473	Kota Dumai	6.67	49.94	22.40	54.95	49.89

Kode	Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG	
		%	%	%	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1500	JAMBI	11.11	51.73	27.38	57.91	58.89
1501	Kerinci	3.33	31.65	40.11	59.45	52.23
1502	Merangin	3.33	58.51	40.00	53.49	56.12
1503	Sarolangun	10.00	48.97	28.97	58.96	59.42
1504	Batanghari	20.00	58.98	32.38	67.52	70.59
1505	Muara Jambi	14.29	66.69	33.70	68.89	63.20
1506	Tanjung Jabung Timur	13.33	48.80	20.67	42.53	54.87
1507	Tanjung Jabung Barat	13.33	48.90	25.02	55.54	59.54
1508	Tebo	3.33	50.24	26.40	48.67	49.10
1509	Bungo	6.67	58.75	20.85	46.62	46.11
1571	Kota Jambi	8.89	49.64	26.36	53.55	55.35
1572	Kota Sungai Penuh	10.00	44.45	32.75	52.46	60.59
1600	SUMATERA SELATAN	18.46	51.79	30.83	67.32	68.34
1601	Ogan Komering Ulu	4.44	52.96	23.67	45.82	46.48
1602	Ogan Komering Ilir	6.67	66.12	23.72	48.81	46.36
1603	Muara Enim (Liot)	15.56	53.57	34.17	66.10	67.25
1604	Lahat	6.67	53.07	37.28	57.65	58.66
1605	Musi Rawas	12.50	49.50	23.28	53.32	55.88
1606	Musi Banyuasin	8.89	65.62	33.36	59.94	56.75
1607	Banyuasin	11.10	53.94	28.00	57.14	58.11
1608	Ogan Komering Ulu Selatan	5.71	53.12	23.31	48.27	48.75
1609	Ogan Komering Ulu Timur	11.36	54.03	30.05	58.26	58.82
1610	Ogan Ilir	7.50	41.42	25.49	50.07	50.94
1611	Empat Lawang	20.00	46.71	32.91	68.10	70.27
1671	Kota Palembang	16.67	50.83	27.58	63.07	64.27
1672	Kota Prabumulih	8.00	48.50	22.21	48.38	49.29
1673	Kota Pagar Alam	8.00	53.75	21.21	46.81	48.17
1674	Kota Lubuk Linggau	20.00	46.00	26.85	61.67	63.13
1700	BENGKULU	17.78	50.13	33.21	68.50	69.33
1701	Bengkulu Selatan	8.00	37.95	39.57	61.92	61.45
1702	Rejang Lebong	20.00	48.75	23.06	55.81	62.42
1703	Bengkulu Utara	8.57	49.59	37.73	61.43	62.30
1704	Kaur	8.00	37.75	36.76	59.31	57.95
1705	Seluma	10.00	40.94	32.28	58.27	58.20
1706	Mukomuko	0.01	57.66	31.99	47.43	47.60
1707	Lebong	20.00	49.56	36.00	68.00	73.07
1708	Kepahiang	16.00	47.06	34.27	66.31	67.28
1709	Bengkulu Tengah	4.55	50.35	39.08	48.95	55.81
1771	Bengkulu	26.67	55.27	30.51	66.03	74.63

Kode	Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG	
		%	%	%	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1800	LAMPUNG	18.67	49.21	27.77	65.32	65.86
1801	Lampung Barat	20.00	36.00	33.24	69.17	67.21
1802	Tanggamus	6.67	53.28	26.38	61.99	53.94
1803	Lampung Selatan	13.33	48.65	27.56	59.84	60.78
1804	Lampung Timur	13.33	50.55	29.74	62.02	62.49
1805	Lampung Tengah	10.00	49.43	28.17	57.19	58.34
1806	Lampung Utara	11.11	53.48	35.10	58.91	61.33
1807	Way Kanan	10.00	44.01	30.24	59.90	58.60
1808	Tulang Bawang	15.00	54.24	24.32	59.97	60.22
1809	Pesawaran	17.14	60.27	27.53	61.30	62.18
1810	Pringsewu	22.86	46.06	19.09	43.11	59.44
1811	Mesuji	24.00	53.91	27.55	67.66	67.87
1812	Tulang Bawang Barat	6.90	48.63	30.90	64.12	54.68
1871	Kota Bandar Lampung	13.33	48.16	30.69	59.54	62.82
1872	Kota Metro	28.00	44.62	32.57	66.34	75.74
1900	KEP. BANGKA BELITUNG	11.11	52.93	23.49	55.62	56.03
1901	Bangka	10.00	61.27	23.30	57.39	52.85
1902	Belitung	8.00	43.59	21.11	49.27	49.21
1903	Bangka Barat	12.00	61.64	25.35	53.32	56.29
1904	Bangka Tengah	4.00	52.13	21.27	52.92	44.54
1905	Bangka Selatan	8.00	60.24	18.96	39.16	43.77
1906	Belitung Timur	5.00	61.50	23.74	42.25	47.21
1971	Kota Pangkal Pinang	4.00	43.71	26.15	49.60	50.01
2100	KEPULAUAN RIAU	15.56	39.92	26.65	56.70	60.62
2101	Karimun	6.67	46.03	25.85	49.43	49.93
2102	Kepulauan Riau	20.00	56.89	23.42	49.32	61.29
2103	Natuna	5.00	46.18	22.75	43.92	45.94
2104	Lingga	0.01	44.62	21.41	37.88	38.59
2105	Kepulauan Anambas	5.00	50.98	26.79	50.40	49.96
2171	Kota Batam	22.22	34.42	27.58	59.84	65.88
2172	Kota Tanjung Pinang	12.00	46.29	24.18	51.38	56.42

Kode	Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG	
		%	%	%	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3100	DKI JAKARTA	24.47	42.53	36.53	73.23	74.70
3101	Kep. Seribu	24.47	55.50	22.63	61.47	63.35
3171	Kota Jakarta Selatan	24.47	42.36	34.45	72.47	74.70
3172	Kota Jakarta Timur	24.47	39.84	32.98	72.84	73.75
3173	Kota Jakarta Pusat	24.47	43.85	37.46	74.61	75.52
3174	Kota Jakarta Barat	24.47	42.86	33.39	73.72	74.18
3175	Kota Jakarta Utara	24.47	46.77	35.00	72.24	74.60
3200	JAWA BARAT	24.00	38.19	27.38	67.01	68.08
3201	Bogor	16.00	34.69	25.42	59.05	59.46
3202	Sukabumi	16.00	34.40	25.55	58.81	58.29
3203	Cianjur	16.00	29.38	19.07	53.96	48.93
3204	Bandung	20.00	31.58	31.51	67.15	66.11
3205	Garut	16.00	54.72	29.03	60.23	64.68
3206	Tasikmalaya	14.00	43.03	25.52	55.65	57.86
3207	Ciamis	8.00	41.27	32.39	56.62	57.56
3208	Kuningan	12.00	36.90	26.66	55.92	55.91
3209	Cirebon	14.00	38.80	25.77	56.96	57.75
3210	Majalengka	10.00	40.48	23.34	52.23	52.48
3211	Sumedang	16.00	36.63	32.79	62.73	65.14
3212	Indramayu	20.00	34.17	18.65	55.14	56.50
3213	Subang	6.00	34.03	28.26	48.31	49.80
3214	Purwakarta	20.00	35.51	26.24	66.75	64.74
3215	Karawang	12.00	46.39	25.85	53.88	58.86
3216	Bekasi	14.00	43.37	23.14	54.97	56.81
3217	Kab Bandung Barat	20.00	45.88	31.72	69.42	71.03
3271	Kota Bogor	17.78	37.98	28.47	62.60	64.75
3272	Kota Sukabumi	10.00	39.91	25.74	52.65	53.58
3273	Kota Bandung	18.00	36.92	31.88	64.53	65.76
3274	Kota Cirebon	6.90	33.12	30.01	53.28	52.37
3275	Kota Bekasi	14.00	38.21	26.93	59.19	59.49
3276	Kota Depok	34.00	35.32	30.82	77.29	76.37
3277	Kota Cimahi	20.00	44.25	30.93	66.15	66.51
3278	Kota Tasikmalaya	6.67	28.99	30.60	54.97	50.60
3279	Kota Banjar	12.00	43.32	24.21	53.85	55.80
1706	Mukomuko	0.01	57.66	31.99	47.43	47.60
1707	Lebong	20.00	49.56	36.00	68.00	73.07
1708	Kepahiang	16.00	47.06	34.27	66.31	67.28
1709	Bengkulu Tengah	4.55	50.35	39.08	48.95	55.81
1771	Bengkulu	26.67	55.27	30.51	66.03	74.63

Kode	Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG	
		%	%	%	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3300	JAWA TENGAH	19.00	46.97	32.33	67.96	68.99
3301	Cilacap	14.00	54.01	23.54	55.17	57.72
3302	Banyumas	20.00	48.43	29.37	66.57	67.64
3303	Purbalingga	22.22	45.43	28.71	66.33	67.47
3304	Banjarnegara	16.00	33.38	27.64	57.80	59.23
3305	Kebumen	26.00	48.51	23.29	63.18	65.63
3306	Purworejo	8.89	52.48	29.74	59.49	58.30
3307	Wonosobo	6.67	43.61	22.32	47.44	48.06
3308	Magelang	8.00	44.64	36.00	60.12	60.79
3309	Boyolali	15.56	47.77	37.77	68.47	68.82
3310	Klaten	18.00	45.83	34.68	69.23	70.41
3311	Sukoharjo	13.33	41.01	39.42	67.78	67.46
3312	Wonogiri	10.00	55.50	35.88	61.93	62.71
3313	Karanganyar	13.33	46.27	35.68	67.87	66.44
3314	Sragen	6.67	48.19	35.03	56.06	57.18
3315	Grobogan	18.00	39.93	23.07	57.65	57.45
3316	Blora	27.27	53.28	33.80	74.72	75.08
3317	Rembang	22.22	45.14	32.33	68.02	69.97
3318	Pati	16.00	47.62	29.41	61.44	63.63
3319	Kudus	13.33	38.87	40.08	67.01	66.05
3320	Jepara	6.00	47.90	22.26	46.11	47.23
3321	Demak	18.37	50.18	37.62	70.23	70.84
3322	Semarang	22.22	47.51	43.49	75.91	76.92
3323	Temanggung	17.78	43.98	38.63	70.83	72.00
3324	Kendal	14.29	41.18	32.84	64.42	64.65
3325	Batang	20.00	49.57	25.09	62.29	64.74
3326	Pekalongan	13.33	51.76	24.24	55.20	56.81
3327	Pemalang	20.00	47.58	33.03	70.26	69.95
3328	Tegal	6.00	51.26	26.13	49.07	51.70
3329	Brebes	12.00	44.05	23.14	53.94	53.95
3371	Kota Magelang	12.00	49.64	39.33	65.29	66.78
3372	Kota Surakarta	25.00	41.15	41.48	75.75	78.06
3373	Kota Salatiga	32.00	41.22	40.62	76.28	81.45
3374	Kota Semarang	12.00	48.64	34.38	63.46	64.48
3375	Kota Pekalongan	23.33	50.02	26.07	64.69	68.44
3376	Kota Tegal	23.33	45.89	28.17	67.77	69.18

Kode	Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG	
		%	%	%	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3500	JAWA TIMUR	18.00	48.27	32.63	67.91	68.62
3501	Pacitan	15.56	47.22	37.07	67.87	67.61
3502	Ponorogo	16.00	48.58	32.92	64.96	67.58
3503	Trenggalek	13.33	45.01	35.49	63.39	64.92
3504	Tulungagung	2.00	51.36	35.69	51.96	52.67
3505	Blitar	8.00	53.18	38.87	66.59	63.33
3506	Kediri	26.00	53.45	28.13	70.86	72.20
3507	Malang	18.00	57.93	35.26	69.49	69.51
3508	Lumajang	8.00	45.83	21.53	47.09	47.99
3509	Jember	12.00	42.42	29.24	59.47	58.76
3510	Banyuwangi	18.00	54.46	29.88	63.52	65.50
3511	Bondowoso	4.44	50.27	36.45	50.91	55.45
3512	Situbondo	26.67	41.87	26.02	67.86	68.09
3513	Probolinggo	16.00	41.62	23.87	51.28	57.01
3514	Pasuruan	24.00	41.84	35.74	73.49	73.85
3515	Sidoarjo	16.00	42.78	28.44	63.68	63.21
3516	Mojokerto	20.00	40.01	33.95	70.07	70.47
3517	Jombang	6.00	59.50	25.86	50.36	49.69
3518	Nganjuk	16.00	55.57	23.19	57.63	57.92
3519	Madiun	11.11	48.60	29.34	64.30	56.90
3520	Magetan	13.33	43.37	36.09	62.33	64.65
3521	Ngawi	20.00	50.95	29.66	65.66	66.39
3522	Bojonegoro	16.00	48.44	23.64	57.42	58.28
3523	Tuban	18.00	38.78	27.74	60.43	62.91
3524	Lamongan	8.00	50.82	31.85	55.39	56.62
3525	Gresik	14.00	49.60	29.29	62.56	63.56
3526	Bangkalan	2.22	52.75	33.27	49.38	50.20
3527	Sampang	2.22	33.40	29.15	41.13	43.26
3528	Pamekasan	4.44	44.98	31.84	48.46	51.85
3529	Sumenep	6.00	38.07	34.85	53.11	54.74
3571	Kota Kediri	21.88	46.45	34.33	70.94	71.92
3572	Kota Blitar	16.00	53.56	35.18	68.68	68.47
3573	Kota Malang	32.35	47.34	34.46	73.80	78.75
3574	Kota Probolinggo	33.33	54.75	29.76	75.70	76.14
3575	Kota Pasuruan	8.00	46.75	30.42	51.67	56.50
3576	Kota Mojokerto	12.00	47.88	34.15	63.78	64.46
3577	Kota Madiun	33.33	45.85	38.23	78.69	79.21
3578	Kota Surabaya	28.00	50.77	33.66	77.53	77.09
3579	Kota Batu	32.00	46.04	28.29	74.31	75.01

Kode	Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG	
		%	%	%	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3400	D I YOGYAKARTA	26.42	44.54	39.18	77.70	77.84
3401	Kulon Progo	12.50	44.93	31.97	61.18	61.15
3402	Bantul	13.64	46.53	37.94	67.85	68.46
3403	Gunung Kidul	11.11	44.97	38.40	59.36	62.22
3404	Sleman	18.00	44.02	37.79	70.74	70.52
3471	Kota Yogyakarta	15.00	42.74	42.08	69.85	70.00
3600	BANTEN	18.82	41.01	29.54	65.66	66.58
3601	Pandeglang	10.00	51.11	29.89	57.79	58.63
3602	Lebak	12.00	36.11	29.14	60.56	59.50
3603	Tangerang	8.00	37.95	27.20	52.00	52.88
3604	Serang	6.00	47.89	24.75	46.16	50.08
3671	Kota Tangerang	16.00	40.23	29.70	65.03	65.17
3672	Kota Cilegon	17.14	51.67	18.76	55.37	57.79
3673	Kota Serang	17.78	40.75	25.72	62.44	64.04
3674	Kota Tangerang Selatan	17.78	39.38	24.05	59.94	60.46
5100	BALI	7.27	41.32	34.91	58.53	58.59
5101	Jembrana	20.00	40.59	37.42	67.87	71.76
5102	Tabanan	5.13	41.52	34.22	54.94	55.16
5103	Badung	2.22	44.67	35.26	52.01	53.24
5104	Gianyar	7.50	40.77	35.12	59.03	59.42
5105	Klungkung	12.00	37.06	42.26	67.66	66.78
5106	Bangli	13.33	32.67	34.00	66.23	63.39
5107	Karangasem	5.00	35.48	40.76	58.76	57.69
5108	Buleleng	8.89	42.03	37.45	57.96	61.22
5171	Kota Denpasar	2.22	41.45	39.41	55.98	55.74

Kode	Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG	
		%	%	%	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5200	NUSA TENGGARA BARAT	10.91	39.37	30.13	54.49	56.57
5201	Lombok Barat	3.33	27.33	30.69	44.01	43.06
5202	Lombok Tengah	6.67	31.13	34.01	48.56	48.39
5203	Lombok Timur	8.00	43.54	42.27	57.56	59.57
5204	Sumbawa	2.50	40.59	36.26	53.33	52.92
5205	Dompu	10.00	45.70	31.97	58.38	60.94
5206	Bima	2.22	42.15	25.00	42.72	43.00
5207	Sumbawa Barat	4.00	45.03	17.98	38.85	40.01
5208	Lombok Utara	4.00	33.17	25.29	39.17	41.87
5271	Kota Mataram	8.57	33.99	32.93	57.75	54.40
5272	Kota Bima	8.00	44.30	33.74	52.45	58.41
5300	NUSA TENGGARA TIMUR	7.27	45.87	39.88	57.98	58.90
5301	Sumba Barat	0.01	39.85	31.88	46.96	46.43
5302	Sumba Timur	13.33	47.14	40.95	65.89	65.94
5303	Kupang	11.43	43.47	34.01	50.62	60.53
5304	Timor Tengah Selatan	15.00	35.05	26.36	60.23	55.53
5305	Timor Tengah Utara	10.00	40.31	35.74	62.71	58.78
5306	Belu	20.00	41.04	35.12	68.32	68.21
5307	Alor	4.00	36.22	39.59	53.67	51.94
5308	Lembata	8.00	41.53	43.43	55.38	58.78
5309	Flores Timur	6.67	57.06	41.60	56.43	58.48
5310	Sikka	6.67	57.09	34.98	52.96	53.17
5311	Ende	10.00	52.33	54.10	63.12	63.66
5312	Ngada	10.00	43.76	42.31	63.02	63.06
5313	Manggarai	10.00	45.98	42.64	58.75	62.38
5314	Rote Nda	16.00	26.18	34.40	59.75	58.14
5315	Manggarai Barat	0.01	40.92	36.51	45.56	47.70
5316	Sumba Barat Daya	6.90	44.89	40.89	59.51	59.88
5317	Sumba Tengah	6.67	48.95	42.72	51.54	60.78
5318	Nageko	0.01	65.29	46.88	49.93	49.14
5319	Manggarai Timur	3.33	21.88	32.19	44.01	39.30
5320	Sabu Raijua	12.82	46.51	33.11	49.81	56.64
5371	Kota Kupang	3.33	49.99	37.50	53.95	54.84

Kode	Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG	
		%	%	%	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6100	KALIMANTAN BARAT	5.45	43.42	33.19	55.26	56.39
6101	Sambas	11.11	35.84	33.97	61.16	59.66
6102	Bengkayang	10.34	47.06	33.30	60.27	62.15
6103	Landak	5.71	43.50	34.84	56.45	57.65
6104	Pontianak	4.44	38.23	33.54	53.14	53.73
6105	Sanggau	14.29	25.89	32.07	64.46	58.12
6106	Ketapang	5.00	47.08	25.75	46.49	49.29
6107	Sintang	11.43	37.35	31.55	54.43	59.50
6108	Kapuas Hulu	6.67	43.65	38.85	58.43	60.57
6109	Sekadau	8.00	39.61	37.25	58.25	59.19
6110	Melawai	0.01	23.84	33.13	42.84	39.13
6111	Kayong Utara	0.01	51.99	29.78	43.97	45.86
6112	Kubu Raya	4.44	43.59	32.61	53.43	53.97
6171	Kota Pontianak	13.33	49.32	32.89	53.66	64.40
6172	Kota Singkawang	8.00	43.51	26.93	53.41	53.34
6200	KALIMANTAN TENGAH	17.78	45.22	32.33	68.62	69.48
6201	Kotawaringin Barat	16.67	36.75	22.13	57.79	58.96
6202	Kotawaringin Timur	14.29	46.12	26.05	61.51	60.82
6203	Kapuas	8.57	46.71	27.51	64.28	55.99
6204	Barito Selatan	24.00	47.74	36.40	75.06	76.98
6205	Barito Utara	24.00	47.56	41.05	76.63	78.56
6206	Sukamara	20.00	41.41	18.04	55.31	58.55
6207	Lamandau	5.00	36.27	25.50	48.45	49.31
6208	Seruyan	16.00	41.20	25.20	61.72	63.33
6209	Katingan	16.00	40.55	28.17	64.72	64.16
6210	Pulang Pisau	28.00	45.92	20.86	66.10	67.22
6211	Gunung Mas	35.00	47.34	38.03	82.53	83.08
6212	Barito Timur	10.00	45.84	39.90	64.68	65.23
6213	Murung Raya	10.00	39.59	26.01	57.45	58.71
6271	Kota Palangka Raya	12.00	51.92	32.14	60.78	62.39

Kode	Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG	
		%	%	%	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6300	KALIMANTAN SELATAN	10.91	45.02	34.47	62.53	62.99
6301	Tanah Laut	16.67	53.97	28.28	63.71	63.96
6302	Kota Baru	22.86	39.63	25.00	65.32	68.68
6303	Banjar	20.00	46.54	32.07	68.17	70.31
6304	Barito Kuala	10.00	39.87	39.29	63.81	63.39
6305	Tapin	16.00	48.51	47.28	71.33	71.44
6306	Hulu Sungai Selatan	10.00	52.44	24.94	54.04	54.29
6307	Hulu Sungai Tengah	20.00	49.56	51.51	75.60	76.03
6308	Hulu Sungai Utara	6.67	46.61	28.91	55.34	52.21
6309	Tabalong	20.00	38.68	27.10	66.16	65.25
6310	Tanah Bumbu	2.86	45.74	31.10	50.74	51.50
6311	Balangan	8.00	53.34	33.85	57.50	58.53
6371	Kota Banjarmasin	28.89	42.79	36.25	78.44	78.77
6372	Kota Banjar Baru	12.00	44.61	31.28	61.13	61.79
6400	KALIMANTAN TIMUR	20.00	40.65	20.89	60.05	61.29
6401	Pasir	12.00	47.82	21.23	54.26	56.08
6402	Kutai Barat	8.00	28.71	24.68	52.78	47.77
6403	Kutai	4.44	36.28	22.26	46.73	45.81
6404	Kutai Timur	16.67	42.09	15.45	51.67	54.92
6405	Berau	12.00	43.88	16.06	46.40	49.53
6406	Malinau	10.00	34.65	26.43	56.82	56.97
6407	Bulongan	16.00	40.38	20.96	57.35	58.49
6408	Nunukan	28.00	41.12	25.36	68.93	72.04
6409	Penajam Paser Utara	20.00	56.75	23.85	64.45	63.69
6410	Tana Tidung	24.44	27.92	23.98	53.79	58.83
6471	Kota Balikpapan	15.56	35.97	24.51	66.39	58.62
6472	Kota Samarinda	8.00	42.42	29.06	62.25	57.49
6473	Kota Tarakan	12.00	49.68	24.99	52.93	58.05
6474	Kota Bontang	24.00	49.63	16.32	46.93	59.11

Kode	Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG	
		%	%	%	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7100	SULAWESI UTARA	20.00	51.04	29.14	71.05	68.61
7101	Bolaang Mongondow	20.00	46.37	26.39	66.62	67.75
7102	Minahasa	28.57	57.45	36.59	76.66	78.27
7103	Kep.Sangihe Talaud	16.00	60.08	26.36	65.76	60.96
7104	Kepulauan Talaud	10.00	42.84	27.13	55.62	55.14
7105	Minahasa Selatan	20.00	62.94	30.48	68.11	66.59
7106	Minahasa Utara	20.00	49.13	31.82	77.63	71.20
7107	Bolaang Mongondow Utara	5.00	54.88	26.57	71.40	51.33
7108	Minahasa Tenggara	0.01	54.64	32.55	69.01	46.59
7109	Kep. Siau Tagulandang Biaro	32.00	55.39	33.02	72.19	78.75
7110	Bolaang Mongondow Selatan	15.00	46.46	27.38	58.94	60.24
7111	Bolaang Mongondow Timur	25.00	54.64	23.35	65.00	64.71
7171	Manado	12.50	46.24	33.50	70.25	63.55
7172	Kota Bitung	16.00	56.89	25.34	69.64	60.46
7173	Kota Tomohon	35.00	42.34	33.26	78.40	78.40
7174	Kota Kotamobago	20.00	45.64	24.87	61.48	62.75
7200	SULAWESI TENGAH	18.18	51.00	28.12	65.37	66.08
7201	Banggai Kepulauan	16.00	39.49	42.67	69.20	68.22
7202	Banggai	17.14	41.93	26.64	61.90	61.65
7203	Morowali	12.00	49.41	24.53	57.35	58.31
7204	Poso	0.01	44.11	27.79	45.93	46.56
7205	Donggala	0.01	60.34	28.24	45.15	44.38
7206	Toli-Toli	20.00	55.55	23.46	61.55	61.86
7207	Buol	24.00	59.10	22.28	64.13	63.20
7208	Parigi Moutong	12.50	60.26	22.43	54.49	53.41
7209	Tojo Una-Una	0.01	60.47	24.50	41.28	40.38
7210	Sigi	13.33	53.14	31.37	60.47	61.25
7271	Kodya Palu	20.00	47.51	31.83	69.08	70.45

Kode	Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG	
		%	%	%	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7300	SULAWESI SELATAN	16.00	50.71	29.36	62.46	63.38
7301	Selayar	28.00	60.02	30.63	68.14	70.30
7302	Bulukumba	10.00	48.59	32.67	57.97	58.53
7303	Bantaeng	28.00	52.57	34.43	74.10	74.73
7304	Jeneponto	11.43	48.98	28.67	54.06	58.02
7305	Takalar	16.67	56.77	26.28	63.22	60.51
7306	Gowa	26.67	48.97	30.18	73.50	73.23
7307	Sinjai	13.33	55.92	29.87	56.08	59.77
7308	Maros	17.14	54.50	24.92	60.00	60.54
7309	Pangkajene Kepulauan	11.43	50.53	31.82	55.64	58.93
7310	Barru	24.00	61.09	23.28	58.98	61.67
7311	Bone	20.00	58.69	30.73	65.54	65.37
7312	Soppeng	13.33	59.00	30.62	59.76	59.75
7313	Wajo	17.14	51.11	24.85	58.66	59.49
7314	Sidenreng Rappang	3.33	56.99	28.08	55.46	47.93
7315	Pinrang	11.43	52.58	32.86	61.55	62.13
7316	Enrekang	6.67	44.48	34.32	61.09	57.52
7317	Luwu	11.43	51.35	33.79	62.61	63.76
7318	Tana Toraja	13.33	39.82	36.62	64.88	64.44
7322	Luwu Utara	2.86	54.36	18.65	39.27	39.29
7325	Luwu Timur	3.33	46.21	22.90	54.13	43.12
7326	Toraja Utara	13.33	46.40	30.66	61.69	62.83
7371	Kota Makassar	14.00	46.93	33.71	64.49	65.26
7372	Kota Pare Pare	16.00	55.40	29.32	62.60	62.80
7373	Kota Palopo	20.00	42.36	33.96	61.21	68.38
7400	SULAWESI TENGGARA	15.56	46.69	32.89	64.26	65.26
7401	Buton	20.00	50.97	30.04	64.38	66.80
7402	Muna	10.00	43.21	35.43	58.23	57.97
7403	Konawe/Kab Kendari	13.33	48.55	33.76	63.15	64.24
7404	Kolaka	14.29	51.98	22.88	57.11	57.52
7405	Konawe Selatan	10.00	43.58	29.02	56.30	56.33
7406	Bombana	12.00	52.54	25.82	54.41	54.67
7407	Wakatobi	8.00	49.94	35.70	56.19	56.77
7408	Kolaka Utara	4.00	53.18	26.16	46.06	48.81
7409	Konawe Utara	15.00	39.82	37.55	54.97	65.43
7410	Buton Utara	5.00	58.13	36.22	65.49	54.57
7471	Kota Kendari	34.48	41.94	33.63	78.52	79.37
7472	Kota Bau-Bau	13.04	45.11	27.05	56.70	59.10

Kode	Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG	
		%	%	%	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7500	GORONTALO	20.00	53.92	23.87	61.35	62.12
7501	Boalemo	8.00	61.19	28.02	51.55	50.74
7502	Gorontalo	15.00	61.96	24.32	55.67	56.02
7503	Pokuwato	24.00	44.99	34.66	73.12	74.32
7504	Bone Bolango	4.00	68.77	28.31	48.51	44.70
7505	Gorontalo Utara	8.00	53.20	24.53	50.47	51.50
7571	Kota Gorontalo	24.00	44.49	27.24	68.32	68.76
7600	SULAWESI BARAT	11.11	51.85	35.28	63.15	63.71
7601	Majene	16.00	52.85	37.78	68.38	68.38
7602	Polewali Mamasa	15.00	60.55	35.73	65.19	65.56
7603	Mamasa	4.00	40.82	24.71	47.64	46.84
7604	Mamuju	14.29	53.16	27.04	60.16	60.58
7605	Mamuju Utara	12.00	38.99	17.19	50.07	51.47
8100	MALUKU	28.89	50.81	35.13	75.94	76.51
8101	Maluku Tenggara Barat	5.00	50.15	44.79	56.91	57.65
8102	Maluku Tenggara	4.00	57.00	33.75	51.33	51.84
8103	Maluku Tengah	11.43	61.91	33.35	61.15	59.69
8104	Buru	12.00	37.90	28.11	57.25	56.68
8105	Kepulauan Aru	0.01	55.71	39.19	50.39	50.22
8106	Seram Bagian Barat	12.00	65.08	34.69	61.62	59.56
8107	Seram Bagian Timur	0.01	50.27	28.08	42.93	44.41
8108	Maluku Barat Daya	5.00	46.76	38.21	53.71	53.81
8109	Buru Selatan	5.00	50.06	39.30	57.89	59.09
8171	Kota Ambon	2.86	43.49	40.15	55.88	55.77
8172	Kota Tual	5.00	43.92	23.79	47.43	47.80
8200	MALUKU UTARA	8.89	46.27	34.21	58.17	59.38
8201	Halmahera Barat	16.00	52.66	30.37	45.20	64.50
8202	Halmahera Tengah	20.00	52.07	27.09	55.04	65.41
8203	Kepulauan Sula	4.00	44.47	26.72	46.90	47.79
8204	Halmahera Selatan	3.33	44.37	20.16	35.36	40.20
8205	Halmahera Utara	20.00	45.65	25.10	62.30	63.97
8206	Halmahera Timur	0.01	42.32	24.01	39.66	40.64
8207	Pulau Morotai	15.00	49.10	25.07	38.91	58.72
8271	Kota Ternate	16.00	47.39	32.23	66.23	67.94
8272	Kota Tidore Kepulauan	10.53	45.12	30.39	57.16	58.96

Kode	Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG	
		%	%	%	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9100	PAPUA BARAT	15.91	38.92	24.18	57.97	57.54
9101	Fak-Fak	10.00	35.23	28.05	54.08	52.47
9102	Kaimana	5.00	45.74	32.34	51.76	53.81
9103	Teluk Wondama	8.00	23.62	22.71	39.34	39.46
9104	Teluk Bintuni	0.01	45.77	21.43	30.83	38.09
9105	Manokwari	4.00	29.38	26.05	45.39	40.60
9106	Sorong Selatan	16.67	26.68	25.44	62.77	54.00
9107	Sorong	5.00	48.18	19.85	38.27	43.35
9108	Raja Ampat	10.00	55.43	22.95	44.13	48.94
9109	Tambora	0.01	26.03	42.27	37.02	31.61
9110	Maybrat	10.00	37.04	26.01	51.05	50.51
9171	Kota Sorong	6.90	43.77	22.27	57.59	50.79

Kode	Provinsi	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	IDG	
		%	%	%	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9400	PAPUA	7.14	38.33	35.36	55.42	57.74
9401	Merauke	20.00	42.46	35.96	69.66	71.24
9402	Jayawijaya	10.00	26.28	42.89	57.93	54.87
9403	Jayapura	8.00	34.57	31.24	56.70	55.88
9404	Nabire	8.00	34.88	33.53	57.98	56.43
9408	Yapen Waropen	0.01	43.74	32.29	48.10	49.99
9409	Biak Namfor	4.00	38.65	27.26	44.23	47.83
9410	Paniai	3.33	28.20	49.04	32.58	50.27
9411	Puncak Jaya	20.83	23.70	37.07	62.54	68.48
9412	Mimika	12.00	36.93	22.42	50.06	54.33
9413	Boven Digoel	0.01	27.77	30.60	39.34	41.59
9414	Mappi	10.00	55.11	39.13	60.08	61.01
9415	Asmat	5.00	8.09	32.71	39.84	31.44
9416	Yahukimo	5.71	10.47	48.92	57.88	38.27
9417	Pegunungan Bintang	15.00	25.92	40.63	60.94	60.63
9418	Tolikara	16.67	4.22	37.90	46.53	43.63
9419	Sarmi	5.00	34.54	37.79	54.60	56.66
9420	Keerom	10.00	47.85	33.18	59.00	62.03
9426	Waropen	10.00	35.75	32.82	58.24	59.63
9427	Supiori	25.00	31.31	28.86	62.62	67.63
9428	Membramo Raya	10.00	35.75	34.50	58.77	59.74
9429	Nduga	20.00	30.64	41.43	68.51	70.02
9430	Lanny Jaya	16.00	30.64	39.53	62.02	62.70
9431	Mamberamo Tengah	5.00	30.64	45.32	52.57	52.43
9432	Yalimo	5.00	23.28	43.40	51.49	47.90
9433	Puncak	10.53	20.22	32.66	48.07	49.25
9434	Dogiyai	5.00	16.50	62.07	51.70	38.53
9435	Intan Jaya	0.01	39.35	47.77	42.63	49.73
9436	Deiyai	0.01	5.61	63.75	19.61	20.24
9471	Kota Jayapura	20.69	51.10	33.66	70.54	72.63
0000	INDONESIA	17.49	45.75	34.16	68.15	69.14

